

Populasi

Volume 23 Nomor 2

Desember 2015

Artikel

Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesi
Heryanah 1

Dinamika Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita Pernah Kawin di Indonesia:
Analisis Data IFLS 1997, 2000, dan 2007 17
Eddy Kiswanto

Jumlah Anak Ideal menurut Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta 38
Umi Listyaningsih dan Sumini

Strategi Rumah Tangga Miskin Perdesaan Keluar dari Kemiskinan: Kasus Tiga Desa
di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55
Agus Joko Pitoyo dan Muhammad Arif Fahrudin Alfana

Peran Ganda Pedagang Perempuan di Pasar Seni Mertha Nadi Legian, Bali 71
Wayan Hesty Mayaswari dan I Gusti Wayan Murjana Yasa

Resensi Buku

Laki-laki Kalah atau Mengalah 85
Muhadjir Darwin

KATA PENGANTAR

Struktur penduduk Indonesia saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan. Program Keluarga Berencana yang gencar dipromosikan sejak masa orde baru telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran di Indonesia. Dengan semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, angka harapan hidup penduduk Indonesia akan naik. Heryanah menyatakan bahwa Indonesia di masa mendatang akan mengalami masalah *ageing population*. Jika dipersiapkan sejak dini dengan program-program yang bersifat *population responsive*, penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk Pemerintah Indonesia nantinya, bahkan justru akan menjadi bonus demografi kedua. Di masa itu, para lansia ini akan dapat produktif lebih lama dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Eddy Kiswanto menyatakan bahwa salah satu variabel penting untuk menurunkan angka kelahiran adalah pemakaian alat kontrasepsi. Perempuan pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi berjenis hormonal menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Walaupun penggunaan alat kontrasepsi mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti minimnya akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi, terutama pada perempuan pernah kawin yang tinggal di desa dan di luar Jawa, serta minimnya sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi.

Selanjutnya, diskusi umum yang dilakukan oleh orang tua atau kelompok penduduk yang menikah adalah anak. Namun materi yang sama menjadi bahan diskusi yang asing bagi remaja meskipun mereka telah memasuki fase remaja transisi atau berumur 17-19 tahun. Kajian Umi Listyaningsih dan Sumini terkait dengan masalah remaja menjadi menarik mengingat mereka adalah penentu fertilitas masa depan. Sebagian besar remaja masih memandang program dua anak cukup sebagai program pemerintah yang harus diikuti. Di sisi lain, mereka lebih memilih nilai-nilai dari teman sebaya dibandingkan dengan nilai-nilai keluarga yang telah tertanam sejak lama. Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi Generasi Berencana melalui teman sebaya akan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung kegiatan ini di samping memanfaatkan ruang-ruang publik yang selalu diakses remaja.

Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan tingginya angka kemiskinan di perdesaan yang menjadi salah satu permasalahan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Variasi strategi cara penduduk perdesaan keluar dari kemiskinan menarik untuk diteliti karena informasi tentang hal ini masih terbatas. Agus Joko Pitoyo dan Muhammad Arif Fahrudin Alfana meneliti strategi yang dilakukan oleh penduduk miskin di tiga desa di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan latar belakang keadaan geografis yang berbeda. Cara yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan adalah penerapan strategi lokal yang dilakukan oleh warga miskin tersebut. Sementara itu, perbedaan pemilihan strategi disebabkan oleh faktor perbedaan keadaan geografis di setiap wilayah dan karakteristik rumah tangga.

Di sisi lain, kemajuan bidang industri teknologi memacu semangat perempuan mengejar kesetaraan dengan laki-laki. Mereka bekerja tidak hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga sebuah pengakuan di masyarakat, terlebih bagi perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Kajian yang dijalankan oleh Wayan Hesty Mayaswari dan I Gusti Wayan Murjana Yasa di Legian, Bali menyoroti konflik pembagian waktu bagi perempuan dalam tugas domestik dan aktivitas sosial. Keputusan perempuan untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah beban tanggungan dan kegiatan adat. Mereka harus memikirkan waktu untuk keluarga dan tidak hanya fokus mengejar karier. Demi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarganya, perempuan selalu memiliki alasan untuk tetap bekerja selain banyaknya pekerjaan domestik yang seharusnya mereka lakukan.

Pengelola

AGEING POPULATION DAN BONUS DEMOGRAFI KEDUA DI INDONESIA

Heryanah

¹Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi

Korespondensi: Heryanah (*e-mail*: heryanah@bps.go.id)

Abstrak

Ageing population atau penuaan penduduk di masa mendatang akan menjadi isu yang krusial di Indonesia. Hasil proyeksi penduduk Indonesia mengindikasikan bahwa pada 2023 nanti jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia pensiun akan melebihi 7 persen dari total penduduk. Pada 2023 rasio ketergantungan tua akan melebihi 10 persen. Struktur penduduk Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi yang disebut sebagai penuaan penduduk. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan gambaran mengenai bonus demografi pertama, isu penuaan penduduk, dan bonus demografi kedua di Indonesia berdasarkan data dari proyeksi penduduk 2010-2035. Selanjutnya berdasarkan fakta tersebut, hendak dipaparkan implikasi ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Kata kunci: bonus demografi pertama, bonus demografi kedua, penuaan penduduk

AGEING POPULATION AND THE SECOND DEMOGRAPHIC DIVIDEND IN INDONESIA

Abstract

Ageing population will become an interesting issue in Indonesia afterward. Data of population census show that in 2023 those whose chategorize in pension age exceed 7 percent of the total population. The elderly dependency ratio of Indonesia will exceed 10 percent in 2023. The structure of population in Indonesia will become ageing in the near future. The objective of this essay is to give an overview about the first demographic dividen, ageing population issue and second demographic dividen in Indonesia based on the data of population projection 2010-2035. The economic implications and policies that should considered by the government are discuss as well.

Keywords: first demographic dividend, Second demographic dividend, ageing population

Just as economic development has implications for the pace of population growth, so the latter has implications for the rate of economic development.

Debraj Ray, 1998

Pendahuluan

Dalam analisis ekonomi pembangunan, penduduk merupakan salah satu variabel yang memegang peranan kunci. Penduduk adalah sumber daya dan sekaligus aset jangka panjang. Sebuah perencanaan pembangunan di suatu daerah akan memberikan hasil yang maksimal jika para pemangku kepentingannya memperhatikan masalah kependudukan di wilayah mereka.

Ray (1998) dalam bukunya yang berjudul *Economics Development* menyatakan bahwa tidak saja pembangunan ekonomi yang mempunyai dampak terhadap penduduk. Akan tetapi, juga sebaliknya, perubahan penduduk mempunyai implikasi terhadap pembangunan perekonomian. Di sinilah pentingnya peran kajian mengenai ekonomi kependudukan.

Aspek lain dari ekonomi kependudukan yang saat ini sering menjadi topik pembahasan adalah ekonomi penuaan penduduk atau *economics of ageing population*. Tidak hanya negara-negara maju yang sedang mengalami masalah penuaan penduduk, tetapi topik ini juga mulai menjadi pembahasan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah seminar yang diadakan baru-baru ini oleh Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Yayasan Emong Lansia – Help Age Indonesia. Seminar ini menjadi peringatan dini bagi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah kependudukan ke depannya.

Di Indonesia, kajian ataupun penelitian mengenai ekonomi kependudukan, khususnya ekonomi penuaan penduduk, belum banyak berkembang. Hal itu dapat dijelaskan karena persoalan mengenai penuaan penduduk di Indonesia bukanlah persoalan yang mendesak, seperti halnya dengan di negara-negara maju.

Tulisan ini merupakan tulisan singkat yang mengkaji sebagian sisi ekonomi kependudukan di Indonesia. Dengan segala keterbatasannya, tulisan ini hanya mengangkat transisi, masalah penuaan penduduk, dan bonus demografi sebagai peringatan dini masalah kependudukan di masa depan bagi Pemerintah Indonesia. Tulisan akan dibagi ke dalam beberapa subbagian. Pertama adalah pendahuluan. Dua subbagian berikutnya membahas sekilas mengenai kajian literatur dan piramida penduduk Indonesia. Subbagian selanjutnya membahas *ageing population* dan bonus demografi, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai implikasi ekonomi serta kebijakan kependudukan di masa mendatang. Subbagian terakhir merupakan kesimpulan.

Kajian Literatur

Ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengaitkan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Di dalam kajian ilmu ini, ada dua hal penting yang menjadi topik pembahasan. Pertama, dampakekonomiyang disebabkan oleh dinamika kependudukan. Kedua, ilmu ini di lain sisi membahas dinamika kependudukan menggunakan peralatan ekonomi (Mundiharno, 1997).

Telah sejak lama para ekonom, terutama yang berasal dari negara maju, mempunyai ketertarikan terhadap hubungan antara ekonomi dan penduduk sehingga mereka mengembangkan dua ilmu tersebut menjadi

satu disiplin ilmu tersendiri, yaitu *economics developments*. Ilmu ini terus mengalami perkembangan, terutama untuk menganalisis masalah kemiskinan, serta ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah-masalah lainnya. Pada perkembangan terakhir, ekonomi kependudukan mengambil tema yang lebih spesifik mengenai variabel dinamika kependudukan, seperti migrasi, mobilitas, dan *ageing* atau penuaan penduduk.

Di negara-negara maju, kajian ekonomi kependudukan, terutama ekonomi penuaan penduduk (*economics of ageing population*), mendapat perhatian yang luas. Kajian ini melingkupi konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan dari proses penuaan penduduk.

Ageing population atau penuaan penduduk menurut United Nation adalah fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk dari suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan yang disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas. Meningkatnya tingkat harapan hidup dan menurunnya tingkat fertilitas ini merupakan suatu keberhasilan bersama dari beberapa aspek, seperti penurunan tingkat kematian bayi, perbaikan akses terhadap pendidikan, bertambahnya lowongan pekerjaan, peningkatan kesetaraan gender, gencarnya program kesehatan produksi, dan terlebih lagi semakin terjangkaunya fasilitas kesehatan untuk sebanyak mungkin masyarakat. Kesemua faktor tersebut berkontribusi dalam menaikkan tingkat harapan hidup (UN, 2015).

Penuaan penduduk merupakan sebuah kecenderungan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan struktur usia penduduk di suatu wilayah dalam beberapa waktu belakangan.¹

Perubahan struktur usia ini merupakan hasil dari perubahan tiga aspek kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dilihat secara struktur usia, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok besar berikut.

1. kelompok usia muda, yaitu mereka yang berumur di bawah 15 tahun (0-14)
2. kelompok usia produktif, yaitu penduduk yang masuk dalam kategori umur 15 sampai 64 tahun
3. kelompok usia lanjut, yaitu mereka yang berumur 65 tahun ke atas.

Para ahli demografi mengistilahkan suatu negara atau wilayah mengalami penuaan penduduk ketika proporsi penduduk yang berusia lanjut dari suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan (Ortman, 2014). Sementara itu, yang dikatakan penduduk berusia lanjut berdasarkan UU No. 13 Tahun 1998 adalah mereka yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Secara demografis, penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran (Mundiharno, 1997), di antaranya adalah sebagai berikut.

1. rasio beban ketergantungan penduduk tua. Suatu penduduk dapat disebut sebagai penduduk tua jika angka ketergantungan penduduk tua sebesar 10 persen atau lebih, atau jika ketergantungan penduduk muda sebesar 30 persen atau kurang.
2. persentase penduduk tua, yaitu ketika proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas telah diatas 7 persen
3. umur median penduduk² 20, yang artinya bahwa 50 persen dari penduduk berumur 20 tahun ke bawah dan 50 persen lainnya berumur 20 tahun ke atas.

¹ Seminar nasional bertajuk *Penyebab, Konsekuensi, dan Penentuan Kebijakan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010*. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Yayasan Emong Lansia–Help Age Indonesia.

² Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama besarnya.

Pembahasan mengenai penuaan penduduk juga dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai bonus demografi kedua yang dipopulerkan oleh para peneliti ekonomi kependudukan di East West Centre yang di Indonesia diwakili oleh Profesor Suahasil Nazara sebagai kelanjutan dari bonus demografi (pertama). Dilihat dari definisi, bonus demografi diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang berpotensi didapatkan oleh suatu negara karena proporsi penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Dengan kata lain, bonus demografi adalah keadaan ketika terjadi penurunan *dependency ratio* yang disebabkan oleh transisi demografi. Jika Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan kondisi berlimpahnya penduduk yang termasuk kategori produktif dibandingkan dengan yang tidak, maka biaya yang ditujukan untuk pengurusan penduduk muda dan lanjut usia dapat dialihkan untuk investasi di kegiatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memicu investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jati, 2015).

Pembahasan bonus demografi yang sedang banyak dibahas berbagai kalangan, terutama para pemerhati masalah kependudukan, lebih ditujukan kepada pembahasan bonus demografi pertama. Bonus demografi (pertama) ini juga sering dihubungkan dengan pembahasan mengenai *window of opportunity* atau jendela peluang, yaitu suatu keadaan dari suatu negara pada tahun tersebut memiliki tingkat *dependency ratio* yang terendah.

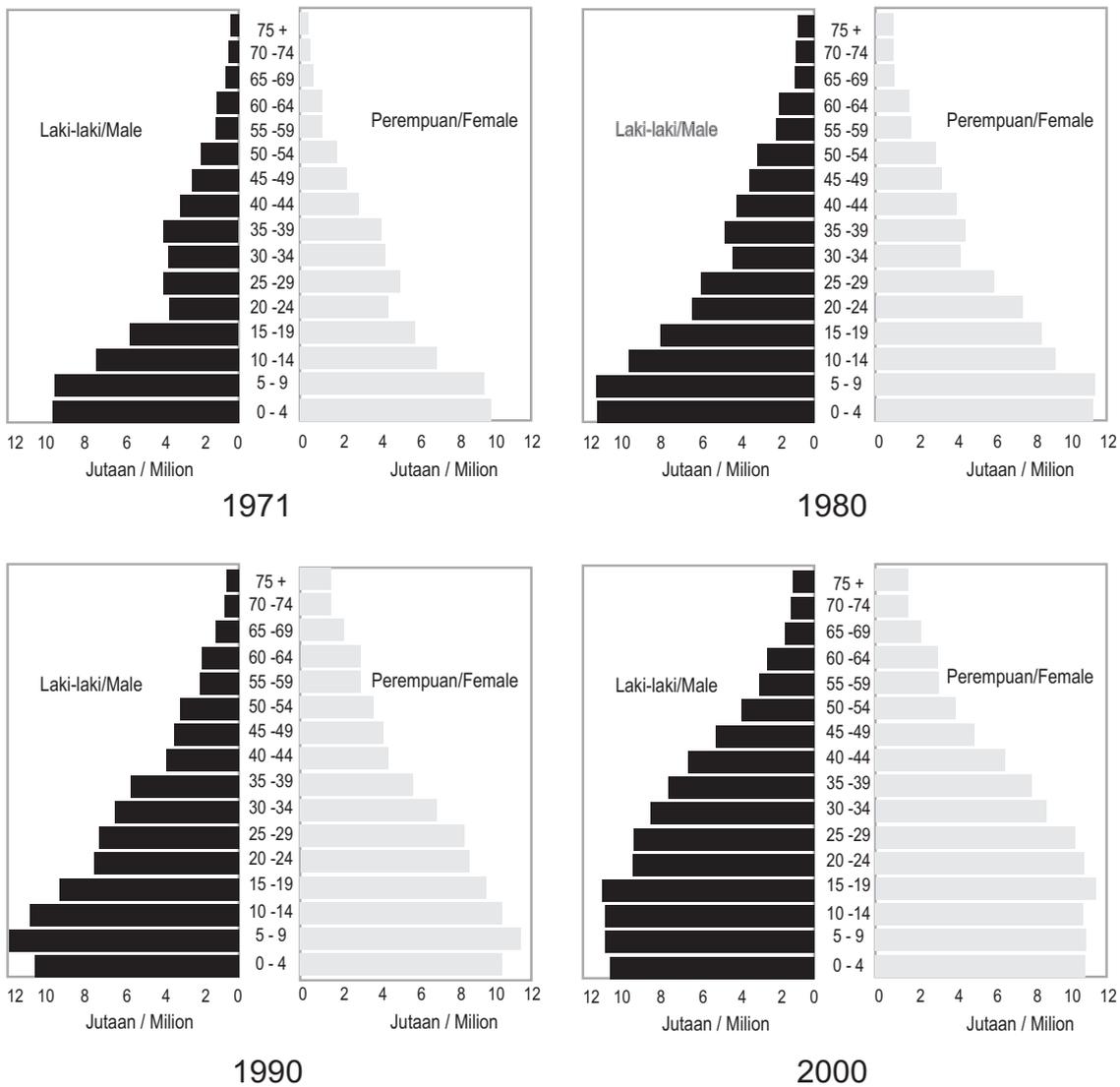
Kemudian muncul pembahasan bahwa selain bonus demografi yang sering dibahas, terdapat juga peluang untuk mendapatkan apa yang disebut dengan

bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua dideskripsikan sebagai keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua semakin banyak, tetapi mereka yang dikategorikan penduduk usia lanjut ini masih produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Melonjaknya penduduk usia lanjut ini merupakan keniscayaan ketika jumlah mereka yang berusia produktif saat ini berlimpah, tetapi beberapa tahun yang akan datang mereka akan memasuki usia lanjut atau pensiun. Dengan alasan tersebut, memikirkan kondisi dan permasalahan kependudukan di Indonesia ke depannya merupakan suatu keharusan. Bagaimanakah kondisi ke depannya serta apa struktur demografis Indonesia dan langkah kebijakan yang harus diambil Pemerintahan Indonesia untuk mengatasi kondisi kependudukan tersebut?

Proyeksi dan Piramida Penduduk di Indonesia

Sesuai amanat dari UU No.16 Tahun 1997 pasal 8 ayat 1 mengenai pelaksanaan sensus penduduk, maka pada Mei 2010, Indonesia kembali melaksanakan sensus penduduk. Ini merupakan sensus penduduk yang ke-6 yang telah dilaksanakan Indonesia. Sensus ini menghasilkan data terbaru mengenai jumlah dan kondisi penduduk beserta karakteristiknya, seperti perumahan, pendidikan, dan tenaga kerja.

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 inilah, maka pada 28 Januari 2014 Pemerintah Indonesia meluncurkan proyeksi penduduk Indonesia dan provinsi sampai dengan tahun 2035. Publikasi proyeksi penduduk ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh beberapa instansi, yaitu Badan Pusat Statistik, Bappenas, United Nations Population Fund (UNFPA), dan juga para pakar demografi.

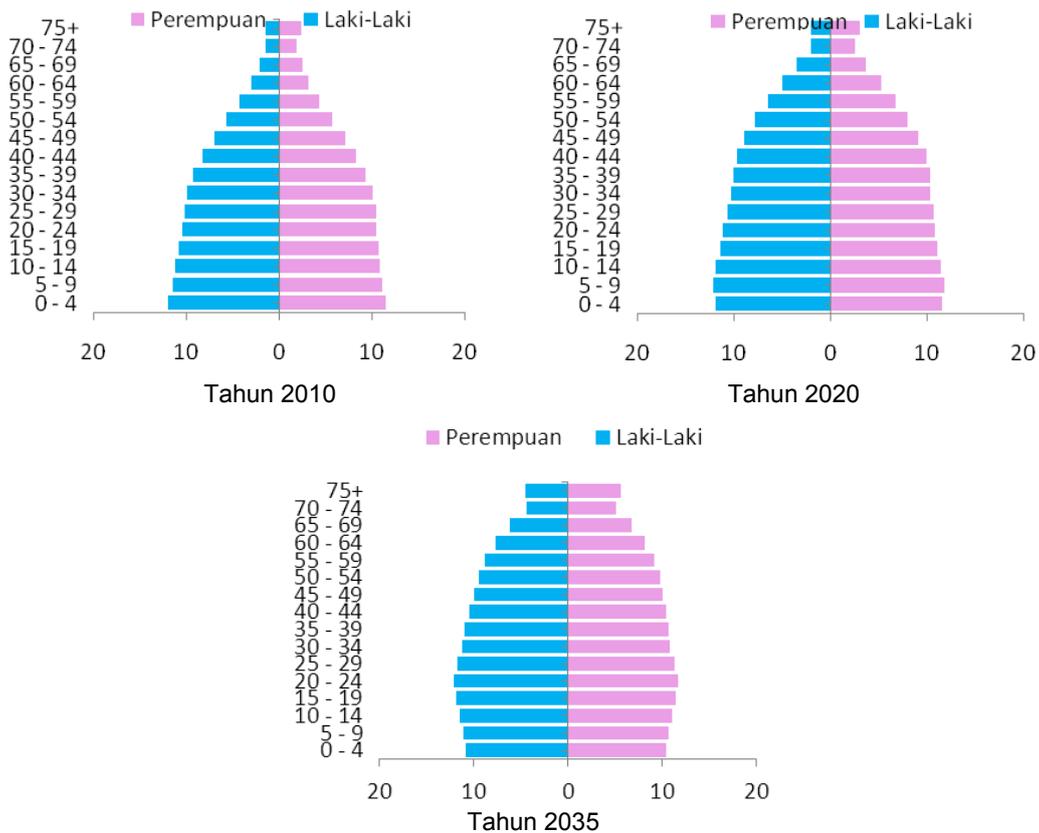


Sumber : https://uzairsuhaimi.files.wordpress.com/2011/03/age_sex_structure1.pdf

Gambar 1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971, 1980, 1990, dan 2000

Data mengenai proyeksi penduduk bukanlah merupakan data yang mudah untuk dihasilkan. Proyeksi penduduk ini menggunakan data dasar dari Sensus Penduduk Tahun 2010. Diperlukan juga asumsi-asumsi yang tepat dari elemen-elemen kependudukan untuk dapat menghasilkan sebuah data proyeksi penduduk. Asumsi-asumsi yang melandasi proyeksi penduduk 2010-2035 yang diterbitkan atas kerja sama Bappenas, BPS, dan UNPF ini didasarkan pada elemen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Selain menggunakan data kependudukan yang

dilakukan secara sensus, juga diperlukan data dari berbagai parameter demografi, seperti *Age Specific Fertility Rate (ASFR)*, *Total fertility Rate (TFR)*, *Infant Mortality Rate (IMR)*, Angka Harapan Hidup, serta data Migrasi Neto yang didapat dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Berbagai data yang merupakan asumsi dan parameter digunakan untuk mendapatkan gambaran tren kependudukan dari masyarakat Indonesia yang dilihat dari waktu lalu hingga sekarang. Kemudian disertakan juga analisis sebab-sebab yang memengaruhi dari setiap komponen pendukung data tersebut.



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (diolah)

Gambar 2 Piramid Penduduk Indonesia Tahun 2010, 2020, dan 2035

Data hasil Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, dan 2000 menunjukkan adanya perubahan struktur umur penduduk Indonesia. Pada 1971 dan 1980, piramida penduduk Indonesia memperlihatkan lebar di bagian penduduk muda karena terdapat banyak penduduk³ yang berusia muda (0-14 tahun). Sementara itu, pada piramida penduduk tahun 1990 dan 2000 telah terjadi perubahan struktur kependudukan di

Indonesia. Piramida menunjukkan adanya penambahan bagian tengah dan atas piramida kemudian bagian bawah piramida mengalami penurunan. Hal ini berarti penduduk dewasa dan penduduk tua Indonesia mengalami kenaikan, sedangkan penduduk mudanya mengalami penurunan tahun 1990 dan 2000.

Pada 2010 piramida penduduk Indonesia kembali memperlihatkan lebarnya di bagian penduduk muda, dengan penduduk

³ Dari berbagai literatur mengenai kependudukan dijelaskan bahwa piramida penduduk menggambarkan keadaan penduduk suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu yang berdasarkan distribusi usia dan jenis kelamin. Dari data ini, sejarah dan perkembangan penduduk di masa mendatang dari suatu daerah dapat dipelajari karena struktur penduduk saat ini adalah hasil kelahiran, kematian, dan migrasi dari penduduk masa sebelumnya, serta struktur penduduk saat ini akan menentukan keadaan penduduk di masa yang akan mendatang.

Secara teori, piramida penduduk dibedakan menjadi tiga jenis berikut.

- 1) Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) menggambarkan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Piramida ini menggambarkan tingginya tingkat kelahiran di suatu wilayah.
- 2) Piramida Penduduk Konstruktif menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur dewasa dengan ciri bentuk piramida ini adalah porsinya yang mengecil di kelompok umur muda dan tua. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi penurunan tingkat kelahiran, sedangkan di saat yang sama juga terjadi tingkat kematian yang rendah di suatu daerah.
- 3) Piramida Penduduk Stationer menggambarkan komposisi penduduknya seimbang pada tiap kelompok umur.

yang berusia muda (0–14 tahun) merupakan komposisi penduduk yang paling besar. Sementara itu, pada piramida penduduk hasil proyeksi tahun 2020 tampak terjadi perubahan struktur kependudukan di Indonesia, yaitu kelompok umur 0-4 tahun mulai berkurang karena penurunan jumlah kelahiran. Kelompok umur 5-9 tahun akan mengalami pembengkakan karena jumlah kelahiran yang tinggi dari masa 10 tahun sebelumnya dan jumlah penduduk kelompok 65 tahun ke atas juga mengalami kenaikan.

Pada 2035 diproyeksikan penduduk usia 0-14 tahun akan mengalami penurunan yang signifikan dengan melihat pada 2010 proporsi dari penduduk Indonesia yang berusia 0-14 tahun sebesar 28,6 persen dan pada 2035 turun menjadi 21,5 persen. Seiring dengan perkembangan penduduk, bagian tengah piramida mengalami pembengkakan, yang artinya mereka yang terkategori usia produktif mengalami kenaikan. Selanjutnya penduduk yang berusia 65 tahun ke atas juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari proporsi sebesar 5 persen pada 2010 diperkirakan naik menjadi 10,5 persen pada 2035.

Bonus Demografi dan *Window of Opportunity*

Dalam kajian demografi, Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang mengalami masa bonus demografi. Masa ini ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah penduduk usia produktif yang diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda dan semakin sedikit jumlah penduduk manula (Wasisto, 2015). Dengan kata lain, masa ini terjadi penurunan rasio ketergantungan/

dependency ratio dari penduduk Indonesia. Sementara itu, Indonesia diperkirakan akan mendapat *window of opportunity* pada 2020–2030, yaitu ketika *dependency ratio*-nya berada pada tingkat terendah sepanjang masa transisi demografi.

Bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 dan proyeksi penduduk Indonesia didapat rasio ketergantungan (*dependency ratio*)⁴ seperti yang disajikan pada Tabel 1. Secara total, rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada 2010 sebesar 50,5 persen. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 50-51 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Angka ketergantungan tersebut disumbang oleh rasio ketergantungan penduduk muda⁵ sebesar 43 persen dan rasio ketergantungan tua⁶ sebesar 7,5 persen.

Dari komposisi jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa di Indonesia pada 2010 rasio antara mereka yang termasuk kategori usia produktif dua kali lipat daripada mereka yang terkategori penduduk yang tidak produktif. Jika dibandingkan, usia produktif tahun 2010 lebih banyak menanggung penduduk usia muda dibandingkan dengan penduduk usia tua.

Tahun 2015 *dependency ratio* nasional berada pada angka 48,6 (lihat Tabel 1). Jika mengacu pada data hasil dari proyeksi

⁴ Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-59 tahun.

⁵ Rasio ketergantungan muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.

⁶ Rasio ketergantungan tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-59 tahun.

penduduk Indonesia, pada 2025 mendatang Indonesia akan mencapai *window of opportunity* dan di tahun inilah diprediksikan *dependency ratio* dari Indonesia merupakan angka *dependency ratio* yang terendah.

Berdasarkan data proyeksi penduduk per provinsi, maka *window of opportunity* ini tidak akan dialami secara serentak oleh provinsi. Ada beberapa provinsi di Indonesia

yang mengalami peluang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun ada beberapa provinsi yang diproyeksikan belum akan mengalaminya walaupun telah melewati tahun 2035.

Sebagian besar provinsi di Indonesia telah memasuki masa bonus demografi pada 2010. Dari Tabel 1 terlihat ada 12 provinsi yang telah memasuki masa *window*

Tabel 1 *Dependency Ratio* Indonesia dan Provinsi, 2010-2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
1 Aceh	56,3	54,8	53,6	50,8	47,9	45,8
2 Sumatera Utara	58,0	56,3	55,3	53,6	51,7	50,8
3 Sumatera Barat	57,7	55,8	54,8	53,6	51,7	50,6
4 Riau	54,1	51,5	49,7	48,4	47,1	46,6
5 Jambi	50,8	47,3	44,5	43,3	42,7	42,7
6 Sumatera Selatan	51,3	49,7	48,4	47,3	45,8	45,3
7 Bengkulu	51,3	47,9	46,2	44,9	44,3	44,5
8 Lampung	51,1	49,5	48,6	47,3	45,6	45,3
9 Kep. Bangka Belitung	48,6	46,2	44,9	44,3	43,3	43,1
10 Kepulauan Riau	46,8	49,7	46,4	41,8	38,1	37,9
11 DKI Jakarta	37,4	39,9	42,0	42,2	40,1	39,5
12 Jawa Barat	49,9	47,7	46,4	46,4	46,2	46,6
13 Jawa Tengah	49,9	48,1	47,7	48,4	49,9	51,7
14 D I Yogyakarta	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4
15 Jawa Timur	46,2	44,3	43,9	44,3	46,2	48,4
16 Banten	48,6	46,4	45,3	43,9	41,8	41,0
17 Bali	47,3	45,6	43,3	42,2	43,3	45,8
18 NTB	55,8	53,8	52,2	50,2	48,6	48,1
19 NTT	70,6	66,7	63,4	62,1	61,6	61,6
20 Kalimantan Barat	52,7	50,8	49,7	48,8	47,3	46,6
21 Kalimantan Tengah	50,4	46,2	43,3	41,4	40,3	39,9
22 Kalimantan Selatan	49,3	48,6	47,7	46,2	44,7	44,7
23 Kalimantan Timur	48,6	46,2	44,5	43,7	43,1	43,5
24 Sulawesi Utara	47,9	46,6	46,4	46,8	47,3	48,4
25 Sulawesi Tengah	52,7	50,6	49,7	49,5	48,6	48,6
26 Sulawesi Selatan	56,0	52,9	51,3	50,4	49,5	49,7
27 Sulawesi Tenggara	63,4	60,5	58,0	54,6	52,7	51,5
28 Gorontalo	51,7	48,6	47,5	47,7	47,7	47,9
29 Sulawesi Barat	60,5	56,0	53,8	52,7	51,5	51,1
30 Maluku	63,1	59,7	58,2	57,5	55,8	54,3
31 Maluku Utara	61,3	58,5	56,0	53,4	51,5	50,8
32 Papua Barat	53,6	49,9	47,1	45,3	44,3	43,7
33 Papua	53,8	47,5	43,7	42,0	41,6	42,2
Indonesia	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

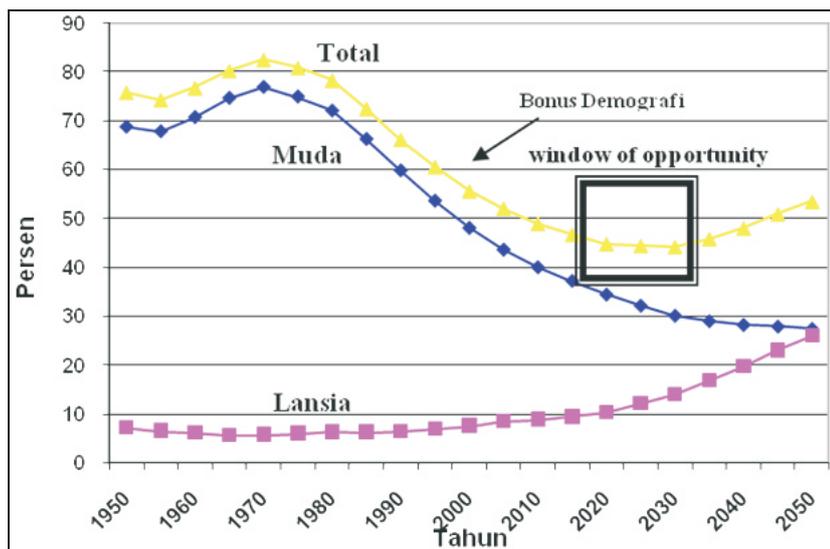
of opportunity ini, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Provinsi yang diprediksikan memasuki masa *window of opportunity* tahun 2015 adalah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pada 2020 Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah diprediksikan baru akan memasuki masa *window of opportunity*. Sementara itu, Provinsi NAD, NTB, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan memasuki masa ini pada 2030. Kemudian terdapat tujuh provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara, yang diprediksikan belum akan memasuki *window of opportunity* sebelum tahun 2035.

Menurut Kepala Lembaga Demografi FEUI, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, diperkirakan Provinsi DKI Jakarta, Kota

Batam, dan Kota Surabaya akan mengalami *window of opportunity* berkali-kali. Hal tersebut dapat kemungkinan terjadi karena ketiga kawasan tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat yang menyebabkan banyak kalangan muda datang mengadu nasib di kota-kota ini. Kemudian banyak dari mereka yang akan kembali pulang ke kampung mereka setelah memasuki usia pensiun.

Gambar 3 memberikan penjelasan secara grafik perjalanan dari *dependency ratio* Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan prediksi tahun 2050. Pada 1970-an *dependency ratio* Indonesia mencapai titik tertinggi sepanjang satu abad perjalanan demografi, yaitu melebihi angka 80. Pada masa ini Indonesia sedang mengalami apa yang dikenal dengan istilah *baby boom*, yaitu jumlah kelahiran bayi pada masa ini sangat tinggi sehingga mengakibatkan *dependency ratio* mudanya juga mencapai titik tertinggi di masa ini. Selanjutnya Pemerintah Indonesia di masa Orde Baru sangat gencar menggalakan program KB yang hasilnya dapat dirasakan dengan dapat ditekannya laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1971-1980 dari 2,34 persen per tahun



Sumber : Adi oetomo, 2008

Gambar 3 Dependency Ratio (Total, Tua, dan Muda) Indonesia Tahun 2010-2035

menjadi 1,49 persen per tahun antara 1990-2000. Dari keberhasilan program KB di masa Orde Baru tersebut, Indonesia dapat mencegah sekitar 80 juta kelahiran dan menghasilkan penurunan *dependency ratio* secara perlahan di tahun-tahun ke depannya. Seiring dengan penurunan *dependency ratio* total, angka *dependency ratio* muda juga

mengalami penurunan secara perlahan. Mereka yang masuk kategori penduduk muda ini memperlihatkan proporsi yang terus menurun (Tabel 2).

Dari Gambar 3 juga terlihat bahwa kebalikan dari *dependency ratio* total dan muda yang mengalami penurunan, terjadi kenaikan pada *dependency ratio* tua dan diprediksikan

Tabel 2 Proyeksi Proporsi Penduduk Umur 0-14 menurut Provinsi, 2010-2035 (%)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
1 Aceh	32,3	31,5	30,5	28,5	26,2	24,2
2 Sumatera Utara	32,9	32,0	30,8	28,8	26,6	24,9
3 Sumatera Barat	31,1	30,3	29,2	27,5	25,7	24,2
4 Riau	32,6	31,2	29,8	28,2	26,3	24,7
5 Jambi	30,2	28,2	26,1	24,2	22,4	20,8
6 Sumatera Selatan	29,9	28,9	27,6	25,9	23,9	22,3
7 Bengkulu	30,1	28,5	27,0	25,3	23,6	22,2
8 Lampung	29,0	28,2	27,1	25,2	22,8	21,0
9 Kep. Bangka Belitung	29,1	27,6	26,2	24,8	23,2	21,8
10 Kepulauan Riau	29,9	30,9	28,9	25,8	22,9	21,2
11 DKI Jakarta	24,2	24,8	24,7	23,2	20,2	17,7
12 Jawa Barat	28,8	27,2	25,7	24,3	22,6	21,1
13 Jawa Tengah	26,2	24,7	23,2	21,7	20,3	19,2
14 D I Yogyakarta	22,1	21,8	21,5	20,9	19,8	18,6
15 Jawa Timur	24,6	23,2	21,9	20,5	19,4	18,5
16 Banten	29,9	28,6	27,4	25,6	23,1	21,0
17 Bali	25,6	24,5	22,8	21,2	20,1	19,3
18 NTB	31,2	30,1	28,9	27,1	25,3	23,9
19 NTT	36,5	35,1	33,7	32,6	31,8	31,1
20 Kalimantan Barat	30,9	29,6	28,3	26,7	24,8	23,1
21 Kalimantan Tengah	30,6	28,6	26,7	24,9	23,1	21,5
22 Kalimantan Selatan	29,4	28,8	27,7	25,8	23,6	22,0
23 Kalimantan Timur	30,4	28,7	26,9	25,2	23,2	21,5
24 Sulawesi Utara	26,9	25,8	24,5	23,2	21,7	20,6
25 Sulawesi Tengah	30,2	29,0	28,0	26,9	25,3	23,9
26 Sulawesi Selatan	30,5	28,8	27,5	26,2	24,7	23,3
27 Sulawesi Tenggara	35,1	33,7	32,2	30,1	28,4	26,8
28 Gorontalo	30,6	28,4	27,1	26,1	24,9	23,6
29 Sulawesi Barat	33,6	31,8	30,8	29,8	28,6	27,4
30 Maluku	34,7	33,3	32,3	31,3	29,9	28,6
31 Maluku Utara	35,1	33,7	32,0	30,1	28,4	27,1
32 Papua Barat	33,1	31,2	29,4	27,8	26,3	24,8
33 Papua	33,5	30,7	28,5	26,8	25,2	23,8
Indonesia	28,6	27,3	26,1	24,6	22,9	21,5

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

akan terus mengalami kenaikan, bahkan setelah melewati tahun 2020 *dependency ratio* tua ini diprediksi akan meningkat cukup signifikan. Mereka yang dulu lahir di masa *baby boom* dan saat ini berada pada masa usia produktif akan berada di masa pensiun beberapa puluh tahun ke depan. Dengan demikian, ini akan menaikkan kembali *dependency ratio* Indonesia yang disebabkan oleh semakin tingginya *dependency ratio* tua atau banyaknya proporsi mereka yang berusia lanjut.

Apakah Pemerintah Indonesia siap menghadapi masalah kependudukan ke depan tersebut? Mampu mengantisipasi *ageing population* yang telah lebih dulu dialami negara-negara maju?

Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dengan meningkatnya kualitas kesehatan dan keadaan sosial masyarakat Indonesia. Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Indonesia tergambar dari menurunnya tingkat kematian ibu, bayi, dan anak, juga semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Jika melihat dari data BPS, angka harapan hidup

penduduk Indonesia periode tahun 2010-2015 telah mencapai 70,1 tahun. Angka ini telah jauh meningkat dari tahun 2000 yang hanya mencapai 65,5 tahun, bahkan pada 1970-an angka harapan hidup masyarakat Indonesia hanya mencapai 47 atau 48 tahun.

Konsekuensi dari semakin membaiknya angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah akan semakin banyaknya jumlah penduduk yang dikategorikan lanjut usia (lansia). Jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori usia 65 tahun ke atas berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 11,8 juta jiwa atau sekitar 5 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238,5 juta jiwa, bahkan jika dengan menggunakan ukuran usia lanjut dari mulai usia 60 tahun ke atas, jumlah lansia di Indonesia tahun 2010 mencapai 18,1 juta atau sebesar 7,56 persen.⁷ Jumlah sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai urutan kelima dengan jumlah lansia terbanyak di dunia.

Tabel 3 menyajikan gambaran bahwa selain terjadi penurunan rasio ketergantungan secara total di Indonesia, rasio ketergantungan muda juga menurun secara signifikan dari 43 persen tahun 2010 menjadi 38,5 persen tahun 2020 dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 31,7 pada 2035. Di sisi lain, rasio ketergantungan tua mengalami

Tabel 3 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Total, Muda, dan Tua Indonesia

Tahun	2010	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2035
Rasio Ketergantungan (total)	50,5	47,7	47,58	47,48	47,4	47,33	47,2	47,3
Rasio Ketergantungan muda	43	38,5	38,08	37,62	37,17	36,7	36,2	31,7
Rasio Ketergantungan tua	7,5	9,2	9,5	9,85	10,24	10,63	11	15,6

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (diolah)

⁷ Ada perbedaan batasan dalam penentuan usia lanjut usia. Sebagian menggunakan batasan usia di atas 65 tahun sebagai kriteria lanjut usia, sedangkan sebagian institusi, seperti WHO, menggunakan batasan lansia adalah mereka yang telah berusia di atas 60 tahun.

kenaikan yang berarti, dari sebesar 7,5 persen tahun 2010 menjadi 9,2 persen tahun 2020. Angka ini diprediksikan akan mencapai 10 persen tahun 2023 dan akan mencapai 15 persen pada 2035. Untuk beberapa tahun ke depannya, dapat dilihat bahwa mereka yang sekarang pada posisi usia produktif akan memasuki usia tua dan pensiun.

Tabel 4 menginformasikan proporsi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 proporsi penduduk ini baru mencapai 5 persen dari total penduduk Indonesia dan tahun 2020 diperkirakan proporsi mereka meningkat menjadi 6,2 persen. Tahun 2023 proporsi penduduk Indonesia yang berusia 65

Tabel 4 Proyeksi Proporsi Penduduk Umur 65+ menurut Provinsi 2010-2035 (%)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
1 Aceh	3,7	3,9	4,4	5,2	6,2	7,2
2 Sumatera Utara	3,8	4,0	4,8	6,1	7,5	8,8
3 Sumatera Barat	5,5	5,5	6,2	7,4	8,4	9,4
4 Riau	2,5	2,8	3,4	4,4	5,7	7,1
5 Jambi	3,5	3,9	4,7	6,0	7,5	9,1
6 Sumatera Selatan	4,0	4,3	5,0	6,2	7,5	8,9
7 Bengkulu	3,8	3,9	4,6	5,7	7,1	8,6
8 Lampung	4,8	4,9	5,6	6,9	8,5	10,2
9 Kep. Bangka Belitung	3,6	4,0	4,8	5,9	7,0	8,3
10 Kepulauan Riau	2,0	2,3	2,8	3,7	4,7	6,3
11 DKI Jakarta	3,0	3,7	4,9	6,5	8,4	10,6
12 Jawa Barat	4,5	5,1	6,0	7,4	9,0	10,7
13 Jawa Tengah	7,1	7,8	9,1	10,9	13,0	14,9
14 D I Yogyakarta	9,3	9,2	9,8	11,0	12,5	14,0
15 Jawa Timur	7,0	7,5	8,6	10,2	12,2	14,1
16 Banten	2,8	3,1	3,8	4,9	6,4	8,1
17 Bali	6,5	6,8	7,4	8,5	10,1	12,1
18 NTB	4,6	4,9	5,4	6,3	7,4	8,6
19 NTT	4,9	4,9	5,1	5,7	6,3	7,0
20 Kalimantan Barat	3,6	4,1	4,9	6,1	7,3	8,7
21 Kalimantan Tengah	2,9	3,0	3,5	4,4	5,6	7,0
22 Kalimantan Selatan	3,6	3,9	4,6	5,8	7,3	8,9
23 Kalimantan Timur	2,3	2,9	3,9	5,2	6,9	8,8
24 Sulawesi Utara	5,5	6,0	7,2	8,7	10,4	12,0
25 Sulawesi Tengah	4,3	4,6	5,2	6,2	7,4	8,8
26 Sulawesi Selatan	5,4	5,8	6,4	7,3	8,4	9,9
27 Sulawesi Tenggara	3,7	4,0	4,5	5,2	6,1	7,2
28 Gorontalo	3,5	4,3	5,1	6,2	7,4	8,8
29 Sulawesi Barat	4,1	4,1	4,2	4,7	5,4	6,4
30 Maluku	4,0	4,1	4,5	5,2	5,9	6,6
31 Maluku Utara	2,9	3,2	3,9	4,7	5,6	6,6
32 Papua Barat	1,8	2,1	2,6	3,4	4,4	5,6
33 Papua	1,5	1,5	1,9	2,8	4,2	5,9
Indonesia	5,0	5,4	6,2	7,5	9,0	10,6

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

tahun ke atas telah mencapai di atas 7 persen dari total penduduk Indonesia. Jika melihat data proporsi dan rasio ketergantungan penduduk tua, tahun 2023-2023 Indonesia telah memasuki tahap penuaan penduduk. Indonesia mulai tahun tersebut akan mengalami apa yang dialami lebih dulu oleh Jepang dan Eropa sekarang.

Walaupun bukanlah masalah yang mendesak, Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi permasalahan penuaan penduduk. Karena saat hal tersebut terjadi, berarti beban yang ditanggung para usia produktif akan sangat berat. Pemerintah harus menyiapkan program-program yang mendukung kondisi kependudukan dengan karakteristik tersebut, seperti penyediaan jaminan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Sejak dini pemerintah perlu merancang desain kebijakan kependudukan yang bersifat *population responsive*.

Negara-negara maju yang telah lebih dulu mengalami *ageing population* mempersiapkan program-program pembangunannya jauh sebelum kondisi itu terjadi. Dengan demikian, ketika mereka telah berada pada kondisi penuaan penduduk, perekonomian mereka justru mendapatkan keuntungan karena penduduk yang berusia lanjut ini masih sehat, produktif, dan masih memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Program-program pembangunan yang terbukti telah menjadikan mereka yang dikategorikan sebagai penduduk usia tua dapat beraktivitas secara ekonomi lebih lama dan bukan menjadi bahan tanggungan bagi keluarga dan negara.

Pemerintah Indonesia harus bersiap diri sehingga penuaan penduduk di masa mendatang ini menjadi apa yang disebut dengan 'bonus demografi kedua'. Bonus demografi kedua berarti proporsi penduduk yang berusia tua di suatu negara cukup

banyak (walau belum ada pembahasan mengenai seberapa banyak proporsi penduduk yang berusia tua agar dapat dikatakan suatu negara mendapat bonus demografi kedua). Penduduk tua ini pun memiliki kesehatan dan pendidikan yang memadai sehingga masih produktif dalam perekonomian dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sekali ini Indonesia berpotensi mendapatkan bonus kedua dari keadaan struktur masyarakatnya jika para lansia masih produktif dan menyumbang pertumbuhan ekonomi.

Implikasi Ekonomi dan Kebijakan di Bidang Kependudukan di Masa Mendatang

Dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, pemahaman mengenai kondisi penduduk memegang peranan sangat penting. Ketersediaan data kependudukan yang terpercaya akan memudahkan para perumus pembangunan menentukan rencana-rencana strategis mereka, misalnya perencanaan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, permukiman, dan lingkungan, yang diperuntukkan bagi masyarakatnya. Pemahaman yang baik mengenai kependudukan, seperti struktur, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin, dapat digunakan untuk sebagai dasar rencana pembangunan di suatu wilayah ke depannya.

Di negara-negara maju, topik mengenai penuaan penduduk telah mulai ramai dibahas sejak awal abad 21. Jepang dan Korea merupakan dua negara yang perkembangan penduduk tuanya paling pesat dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Di kedua negara tersebut, kebijakan dan program-program yang berkenaan dengan penuaan penduduk dan penduduk usia tua telah aktif dilaksanakan sejak lama.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Indonesia telah siap menghadapi masa tersebut? Bandingkan dengan Singapura yang telah memasuki penuaan penduduk terlebih dulu. Dengan pendapatan per kapita penduduk Singapura yang jauh lebih tinggi, negara tersebut telah mampu menjalankan program-program pembangunan yang berbasis kependudukan dan memperhatikan kondisi struktur kependudukannya. Bagaimana kasusnya dengan Indonesia?

Walaupun peluang bonus demografi kedua akan terjadi di Indonesia, sepertinya agak sulit diharapkan, kecuali ada usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mencapainya. Dikatakan kurang rasional jika kita mengharapkan bonus ini karena faktanya dapat dilihat dari beberapa data. Berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012, sebesar hampir 30 persen penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada Agustus 2014 sekitar 68,1 juta atau hampir 60 persen dari pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal (Berita Resmi Statistik, November 2014). Perpaduan dari pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang dominan di sektor informal berkonsekuensi terhadap penghasilan mereka yang juga rendah. Penghasilan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai simpanan mereka untuk saat pensiun atau menyisihkan sebagian penghasilan untuk ikut serta dalam asuransi kesehatan ataupun dana pensiun. Mereka ini minim perlindungan sosial.

Pada 2050 diperkirakan *dependency ratio* Indonesia akan naik kembali karena jumlah mereka yang berkategori lanjut usia akan semakin banyak. Jika mereka ini tidak mempunyai tabungan ketika masih produktif

dan tidak mempunyai perlindungan asuransi, maka dikhawatirkan beban bagi Pemerintah Indonesia akan semakin meningkat.

Untuk mendapatkan penduduk usia lanjut yang produktif, diperlukan program-program pembangunan yang berbasis kependudukan dan program itu bersifat jangka panjang. Manfaat dari program pembangunan ini tidak langsung dapat dirasakan, misalnya dengan pembangunan yang mengutamakan peningkatan sumber daya. Pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di sebuah wilayah. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk yang berkualitas akan menjadi modal pembangunan dan sebaliknya, banyaknya jumlah penduduk dapat menjadi beban dari suatu pemerintahan jika kualitas penduduknya rendah.

Di dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telah tercermin kesadaran pemerintah untuk menjadikan penduduk sebagai sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran yang telah terbangun ini membutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah untuk menindaklanjutinya menjadi aksi-aksi yang nyata. Karena setiap daerah akan mengalami *window of opportunity* dan bonus demografi kedua yang berbeda, maka diperlukan respons kebijakan dengan fokusnya masing-masing pada kebijakan pembangunan yang berbasis pada kependudukan sehingga momentum bonus demografi tidak terlewatkan.

Pendidikan dipercaya menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan program pendidikan tidak cukup hanya dengan memberantas buta huruf bagi masyarakat

Indonesia, tetapi dengan terus meningkatkan partisipasi sekolah dari masyarakat. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang telah sukses digalakkan pemerintah harus ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun dan seterusnya. Pemberian kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan menengah dan tinggi, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan pemberian beasiswa ataupun subsidi silang.

Program pembangunan di bidang kesehatan yang menyiapkan penduduk yang sehat dan tidak gampang sakit sehingga mereka yang nantinya masuk usia tua tetap akan sehat. Dengan kesehatan yang baik, mereka masih dapat produktif dalam perekonomian negara. Tidak hanya menyiapkan masyarakat yang tidak gampang sakit, tetapi negara juga harus melindungi mereka dengan asuransi kesehatan yang menjadi pengaman masyarakat ketika mereka sakit. Selain itu, dari sisi masyarakat, harus terus digalakkan program kesadaran menabung atau mengikuti program dana pensiun yang dapat menjadi sandaran ketika masa pensiun telah datang.

Kesimpulan

Struktur penduduk Indonesia saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan. Program Keluarga Berencana yang gencar dipromosikan sejak masa Orde Baru telah berhasil menurunkan tingkat fertilitas di Indonesia. Dengan semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan semakin tinggi kesadaran masyarakat akan kesehatan, angka harapan hidup penduduk Indonesia akan naik.

Saat ini penuaan penduduk dirasa belum menjadi masalah mendesak bagi Pemerintah Indonesia, padahal jika melihat

data hasil Sensus Penduduk 2010 dan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, porsi penduduknya yang berusia 65 tahun ke atas tahun 2023 telah mencapai angka di atas 7 persen. *Dependency ratio* tua pada 2023 telah mencapai angka di atas 10 persen dan berdasarkan kriteria struktur penduduk, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua atau *ageing population*.

Pemerintahan Indonesia harus mewaspadaikan perubahan komposisi penduduk di masa mendatang. Dalam beberapa puluh tahun ke depan, struktur penduduk akan berubah karena mereka yang termasuk kategori produktif saat ini akan menjadi 65 tahun ke atas dan memasuki usia pensiun.

Indonesia di masa mendatang akan mengalami masalah *ageing population* yang telah dialami lebih dulu oleh mayoritas negara-negara industri yang memiliki proporsi penduduk yang berkategori usia tua lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia muda dan produktif. Jika dipersiapkan sejak dini dengan program-program yang bersifat *population responsive*, penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk pemerintahan Indonesia nantinya, justru akan mendapatkan bonus demografi kedua. Di masa itu, para lansia ini akan dapat produktif lebih lama dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azis, I.J., dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Berita Resmi Statistik. 2014. *Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2014 No./85/11/Th.XVII, 5 November 2014*.
- BPS. 2011. *Fertilitas Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.

- , 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.
- , 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta.
- Butar, Erwita. 2012. "Kondisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Bentuk Piramida Penduduknya". <http://erwitabutar.blogspot.com/2012/10/kondisi-penduduk-indonesia-berdasarkan.html>. Diunduh pada 28 Januari 2016.
- HIMA KS FISIP UNPAD. 2013. "Piramida Penduduk". <http://www.slideshare.net/gnastia/piramida-penduduk>. Diunduh pada 28 Januari 2016.
- Jati, Wasito R. 2014. "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia". *Jurnal Populasi* Vol. 25 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 1-19. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Mundiharno. 1998. "Pengertian, Dampak dan Isu-Isu Sekitar Penuaan Penduduk". <https://andriwijanarko.files.wordpress.com/2012/09/pengertian-ruang-lingkup-dan-bentuk-bentuk-analisis-ekonomi-kependudukan-ec-pop1.pdf>. Diunduh pada 28 Januari Tahun 2016.
- Ortman, Jennifer M., Victoria A. Velkoff, and Howard Hogan. 2014. *An Aging Nation: The Older Population in The United States; Current population repots*. Current Population Reports P25-1140. Washinton, DC: US Bureau, Population Projections Branch.
- Ray, Debraj. 1998. *Development Economics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Suahasil, Nazara. 2012. *Handout Kuliah Economics Regional*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sutomo.2011. "Ekonomi Kependudukan". [s u t o m o _ m r . s t a f f . f e . u n s . a c . i d / 2 0 1 1 / 1 2 / 0 7 e k o n o m i - k e p e n d u d u k a n /](http://sutomo_mr.staff.fe.uns.ac.id/2011/12/07/ekonomi-kependudukan/). Diunduh pada 28 Januari 2016.
- Syukro, Ridho. 2013. "Tahun 2035, RI Akan Menghadapi Masalah Aging Population," <http://www.beritasatu.com/ekonomi/129191-tahun-2035-ri-akan-menghadapi-masalah-aging-population.html>. Diunduh pada 28 Januari 2016.
- UN, Departement of Economic and Social Affair, Population Division. 2015. *World Population Ageing 2015*.
- Witte, Claudia. 2012. "Penduduk Dunia Semakin Tua". <http://www.dw.com/id/penduduk-dunia-semakin-tua/a-15863217>. Diunduh pada 28 Januari 2016.

DINAMIKA PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI PADA WANITA PERNAH KAWIN DI INDONESIA: ANALISIS DATA IFLS 1997, 2000, DAN 2007

Eddy Kiswanto

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi: Eddy Kiswanto (*e-mail*: eddykiswanto@yahoo.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pemakaian alat kontrasepsi dari tahun 1997-2007 pada wanita kawin usia 15-49 tahun dan alasan tidak memakai alat kontrasepsi lagi berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 1997, 2000, dan 2007. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan tabulasi silang digunakan untuk mendapatkan pola penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan karakteristik individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi berada pada kelompok umur di bawah 40 tahun dan baru memiliki 1-2 orang anak. Dari sisi pendidikan, paling banyak berpendidikan rendah dan menikah pada usia muda, sedangkan wanita yang berpendidikan tinggi cenderung menunda perkawinannya. Jenis kontrasepsi yang paling banyak dipakai adalah hormonal, baik dari tahun 1997-2000 maupun dari tahun 2000-2007. Mayoritas akseptor baru tahun 2000 dan 2007 memakai alat kontrasepsi jenis hormonal, demikian juga akseptor yang berhenti memakai sebelumnya menggunakan jenis hormonal. Alasan penghentian pemakaian alat kontrasepsi terbanyak adalah karena keinginan mempunyai anak lagi. Sebagian besar mereka berada pada kelompok umur di bawah 30 tahun dan baru memiliki 1-2 orang anak.

Kata kunci: alat kontrasepsi, wanita pernah kawin, hormonal

THE DYNAMICS OF THE USE OF CONTRACEPTIVES IN EVER-MARRIED WOMEN IN INDONESIA: DATA ANALYSIS IFLS 1997, 2000 AND 2007

Abstract

The goal of this study was to determine changes in the use of contraceptives from 1997 to 2007 among married women aged 15-49 years and reasons of not using contraception anymore by using the data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 1997, 2000, and 2007. Descriptive analysis was used to expose the characteristics of ever-married women who use contraceptive tools. A cross tabulation analysis was used to gain patterns of contraceptive use based on individual characteristics. The results show that ever-married women using contraceptives are mostly in the age group below 40 years and only have 1-2 children. In terms of education, they are mostly poorly educated women married at a younger age whereas highly educated women tend to delay marriage. Based on the type of contraception, in both between 1997 to 2000 and 2000 to 2007, mostly used hormonal type. The majority of the new acceptors, as well as who stopped, in between 2000 and 2007 used hormonal contraception. The mostly reason of the cessation of the use of contraceptives was the desire to have more children. Most of them are in the age group below 30 years and only have 1-2 children.

Keywords: contraceptive tools, ever-married women, hormonal

Pendahuluan

Latar Belakang

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, keluarga berencana telah menjadi sebuah program yang dinilai berhasil di Indonesia. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, kebijakan terhadap pelaksanaan program keluarga berencana juga turut berubah, terutama pada era otonomi daerah mulai tahun 2002 kurang mendapat perhatian. Setelah lama dilupakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, yaitu antara tahun 2013-2015, keluarga berencana kembali menjadi perhatian utama. Ada beberapa alasan tertujunya kembali perhatian pemerintah pada program keluarga berencana. Pertama, keberhasilan program keluarga berencana (KB) di masa orde baru dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sarat dengan sentralisme dan kurang memperhatikan hak reproduksi individu sebagaimana diamanatkan dalam ICPD 1994. Sebagaimana diketahui, tujuan keluarga berencana adalah (1) memberikan kebebasan kepada pasangan dan individu secara bertanggung jawab untuk menentukan jumlah dan jarak anak yang akan dimiliki, (2) memperoleh informasi yang memadai mengenai pilihan-pilihan metode KB yang ada, serta (3) menyediakan secara lengkap metode yang efektif dan aman untuk pasangan atau individu yang menginginkan KB. Kemudian alasan kedua adalah pada era otonomi daerah KB tidak lagi menjadi prioritas pembangunan yang ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kelangsungan program dan kelembagaan KB yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, isu mengenai KB bagi daerah berimplikasi terhadap kebijakan penganggaran keuangan daerah karena tidak memberikan sumbangan untuk PAD (pendapatan asli daerah) dan justru menyerap anggaran tidak sedikit. Alasan ketiga adalah munculnya kekhawatiran

terjadinya ledakan penduduk (*baby boom*) apabila program KB tidak berjalan dengan baik.

Pemakaian alat kontrasepsi menjadi salah satu variabel penting untuk menurunkan angka kelahiran. Data SDKI tahun 2012 menunjukkan adanya pola hubungan antara pemakaian alat kontrasepsi dengan rendahnya fertilitas. Salah satu provinsi di Indonesia yang angka fertilitasnya rendah adalah DIY (2,1) yang memiliki angka prevalensi kontrasepsi yang tinggi (69,9 persen), sedangkan NTT yang fertilitasnya cukup tinggi (3,3) ternyata angka prevalensi kontrasepsinya hanya 47,9 persen. Namun tingginya penggunaan alat kontrasepsi bukanlah menjadi satu-satunya tujuan untuk dapat mengurangi fertilitas. Yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan penggunaan alat kontrasepsi tersebut dalam jangka panjang. Jumlah wanita yang menggunakan metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu dan kelangsungan pemakaian kontrasepsi berdampak pada efektivitas suatu metode kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Greenspan (1991) menyatakan bahwa pencapaian penggunaan kontrasepsi yang tinggi diperlukan untuk dapat mencapai tingkat penggantian kesuburan (*replacement of fertility*). Syaratnya adalah pasangan tidak hanya sesaat saja menggunakan alat kontrasepsi tersebut, tetapi berlanjut menggunakan kontrasepsi tersebut selama masa reproduksi mereka. Memastikan penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan adalah salah satu tantangan terbesar dalam bidang kependudukan. Dampak demografis penggunaan kontrasepsi tidak hanya tergantung pada prevalensi saat ini, tetapi juga pada durasi dan efektivitas penggunaan. Ketika penurunan ukuran keluarga yang diinginkan dan prevalensi

kontrasepsi meningkat, efektivitas kontrasepsi akan meningkat menjadi faktor penentu fertilitas (Wang dan Diamond, 1995).

Penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya berhubungan dengan faktor usia saja karena juga berkaitan erat dengan upaya membatasi kesuburan atau tahap dalam masa reproduksinya. Metode kontrasepsi jangka panjang cenderung digunakan ketika seseorang telah merasa lengkap keluarganya serta wanita mengubah penggunaan kontrasepsi setelah melahirkan, keguguran, dan berhenti masa suburnya (Gray dan McDonald, 2010). Lucke, dkk. (2011) menemukan bahwa wanita meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi setelah melahirkan kemudian mengurangi penggunaan mereka setelah keguguran dan mengubah metode kontrasepsi karena berakhirnya masa subur. Gray dan McDonald (2010) juga menemukan bahwa penggunaan kontrasepsi oral tertinggi dilakukan oleh wanita berusia 20-an tahun dan kondom digunakan menurun pada setiap kelompok umur. Vasektomi dan tubektomi juga banyak digunakan, terutama pada laki-laki dan wanita yang berusia 35 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shoemaker (2005), untuk lebih memahami peran penawaran dan permintaan sebagai faktor bagi wanita untuk memilih metode kontrasepsi, dapat diketahui dari keinginan mereka untuk membatasi jumlah anak. Sebagian besar wanita yang pernah menikah tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi karena alasan kesuburan. Wanita tidak menganggap diri mereka berada pada risiko kehamilan karena tidak melakukan hubungan seks secara teratur, telah menopause, dan yakin dirinya tidak subur. Alasan lainnya adalah kekhawatiran atau ketakutan tentang kemungkinan efek samping dari alat kontrasepsi yang digunakannya tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal berikut ini.

1. Perubahan pemakaian alat kontrasepsi dari tahun 1997-2007 pada wanita kawin usia 15-49 tahun
2. Alasan berhenti memakai alat kontrasepsi

Metodologi Penelitian

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan merupakan data hasil IFLS (*Indonesia Family Life Survey*) atau biasa disebut Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti). IFLS tahun 1997 dikumpulkan oleh Lembaga Demografi UI, tahun 2000 dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (PSKK), dan tahun 2007 yang dilakukan oleh PSKK UGM bersama dengan Survey Meter. IFLS adalah sebuah survei panel yang mengumpulkan keterangan demografis serta sosioekonomis secara berkelanjutan pada tingkat rumah tangga dan komunitas.

Responden

Responden yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi, yaitu responden yang menjawab buku 3A dan 4. Jumlah responden di setiap IFLS adalah sebagai berikut.

- a. 1997 sebanyak 3.150 wanita pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi
- b. 2000 sebanyak 4.012 wanita pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi
- c. 2007 sebanyak 5.230 wanita pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi.

Variabel-Variabel yang Digunakan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemakaian alat kontrasepsi (wanita pernah kawin usia 15-49 tahun). Informasi tentang hal itu diperoleh dari kuesioner IFLS buku 4. Sementara itu, variabel independen adalah umur, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status daerah tempat tinggal, dan lokasi tempat tinggal (buku 3A).

Analisis Data

Analisis tentang wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi dilakukan dengan beberapa jenis analisis data sebagai berikut.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui karakteristik responden dan menggambarkan pola perubahan penggunaan alat kontrasepsi dari tahun 1997-2007. Penggunaan alat kontrasepsi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu metode hormonal (pil, suntik, dan susuk), nonhormonal (spiral, intravag, kondom, femidom, sterilisasi pria/wanita), dan metode tradisional (sanggama terputus, pantang berkala, jamu tradisional, pijat tradisional). Selain itu, analisis deskriptif juga untuk mengetahui karakteristik wanita usia 15-49 tahun yang tidak menggunakan alat kontrasepsi.

2. Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang dilakukan dari variabel-variabel independen dengan variabel dependen untuk mendapatkan pola penggunaan kontrasepsi berdasarkan karakteristik individu.

Tinjauan Pustaka

Di negara berkembang, kelebihan penduduk dianggap sebagai salah satu penyebab

paling dasar dari keterbelakangan secara ekonomi. Negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin kini berurusan dengan masalah akut ini yang cenderung meniadakan sebagian besar upaya untuk mendorong pembangunan. Mengingat situasi ini, pemerintah negara-negara ini bersama dengan organisasi nonpemerintah dan badan-badan dunia, seperti WHO dan UNFPA, berusaha mengatasinya dengan melakukan penelitian tentang faktor-faktor penentu kesuburan di negara-negara dunia ketiga. Hal ini karena tingkat kesuburan di negara-negara ini tetap sangat tinggi.

Penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif memungkinkan pasangan untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan. Akses kepada metode tersebut dianggap hak asasi manusia yang fundamental oleh Konferensi Internasional 1994 tentang Penduduk dan Pembangunan (ICPD). Pada forum tersebut negara berkomitmen untuk bekerja mencapai tujuan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi secara universal, termasuk akses ke kontrasepsi yang efektif. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif memberikan kontribusi untuk mengurangi beban kesehatan reproduksi yang buruk dengan menurunkan angka kematian dan morbiditas kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya meningkatkan penggunaan kontrasepsi mengurangi kesuburan pada gilirannya dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan (Gakidou dan Vayena, 2007).

Keluarga berencana mengacu pada penggunaan metode pengendalian kelahiran untuk mencapai jumlah anak yang diinginkan dan memastikan waktu yang dikehendaki dari konsepsi dan jarak antar kelahiran. Metode kontrasepsi modern mencakup semua metode hormonal, yaitu pil, suntik dan implan, IUD, sterilisasi pria dan wanita, kondom, serta metode vagina modern (misalnya diafragma

dan spermisida). Keluarga berencana dan tindakan pengendalian kelahiran bertujuan untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan kematian ibu, serta mengarah ke penurunan jumlah wanita menghadapi komplikasi karena kehamilan yang tidak aman akan menurun (Husain, dkk., 2011). Manfaat lain pengendalian kelahiran, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Penggunaan kondom yang lebih besar untuk kontrasepsi akan mengurangi penularan HIV dan penyakit infeksi menular seksual lainnya sehingga membantu mengekang perkembangan AIDS.
- b. Mengurangi kelahiran yang tidak direncanakan dan ukuran keluarga akan menghemat pengeluaran sektor publik untuk pelayanan sosial, kesehatan, air, sanitasi, dan mengurangi tekanan pada sumber daya alami yang semakin langka. Dengan demikian, tujuan pembangunan sosial dan ekonomi akan lebih mudah dicapai.
- c. Mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya di kalangan remaja, akan meningkatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. Hal ini pada gilirannya memberikan kontribusi untuk meningkatkan status wanita, meningkatkan tabungan keluarga, mengurangi kemiskinan, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
- d. Menunda kehamilan pertama sering membantu wanita yang menikah pada usia dini untuk menyelesaikan pendidikannya. Hal ini meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya.
- e. Selain itu, pembatasan jumlah anak memungkinkan orang tua untuk berinvestasi lebih banyak pada anak yang ada, meningkatkan status pendidikan, dan kesehatan mereka.

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan program keluarga berencana yang sangat efektif dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan menurunkan tingkat kelahiran dalam periode yang singkat. Angka fertilitas total Indonesia dari tahun 1971 sampai 1975 adalah 5,2 kemudian turun menjadi 2,7 antara tahun 1995 sampai 1997. Demikian pula penggunaan kontrasepsi modern wanita yang telah menikah usia 15-49 pada 1976 mencapai 17 persen kemudian meningkat menjadi 51 persen pada 1997. Pada periode yang sama angka kematian bayi telah turun dari 145 menjadi 52 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan tingkat kematian anak turun dari 218 ke 70 kematian per 1.000 kelahiran hidup (BPS, 1998). Dalam tiga dekade sejak diperkenalkannya program keluarga berencana, Indonesia juga telah mengalami peningkatan partisipasi sekolah, kenaikan tingkat pendapatan, peningkatan harapan hidup, peningkatan usia pernikahan, dan terjadinya peningkatan ekonomi.

Faktor yang memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi, salah satu di antaranya, adalah faktor budaya. Kebanyakan budaya tradisional dan agama menganggap keluarga berencana adalah sesuatu yang tidak bermoral sehingga penyebaran pemakaian alat kontrasepsi tidak diharapkan. Selain itu, kondisi budaya yang berbeda dapat memengaruhi penyebaran informasi tentang keluarga berencana. Penyebaran informasi tersebut diharapkan dapat menyebar lebih cepat secara sosial pada masyarakat karena mereka memiliki nilai, norma, dan lembaga (Casterline, 2001), serta jaringan yang beragam dan besar juga bahasa yang berbeda (Basudan Amin, 2000). Faktor berikutnya adalah adanya program keluarga berencana. Program tersebut membantu memenuhi kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi (Bongaarts dan Watkins, 1996). Analisis dampak program tersebut

telah menunjukkan terjadinya pengurangan tingkat kelahiran yang tidak diinginkan.

Angeles, et. al. (2001:15), melalui penelitian secara metaanalisis di 14 negara Asia dan Afrika termasuk Indonesia dengan model Multivariat, menyebutkan bahwa faktor pendidikan, terutama pendidikan wanita (kontrol kontrasepsi), berpengaruh negatif terhadap preferensi fertilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor pendidikan wanita mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga, terutama mengenai jumlah keluarga yang ideal (2 orang anak cukup, laki-laki atau wanita sama) dan kontribusinya terhadap kualitas atau nilai anak yang diinginkan. Di samping itu, meningkatnya pendidikan seorang individu secara ekonomi berkorelasi positif dengan selera (*taste*). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin meningkat pula selera atau keinginannya terhadap anak yang diinginkan, baik kuantitas maupun kualitas. Melalui pendekatan fungsi utilitas (*indifference curve*), selera tentang nilai anak dalam suatu unit keluarga akan mengarahkan pada kualitas dan bukan jumlah anak yang dilahirkan (kuantitas).

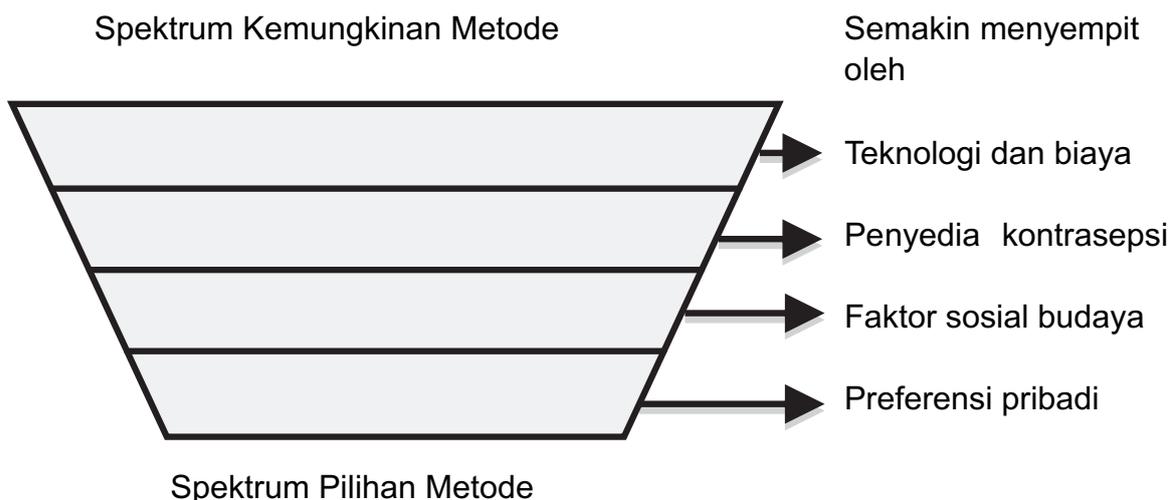
Palamuleni (2003) menyampaikan hipotesis bahwa terdapat korelasi yang positif antara penggunaan kontrasepsi dan tingkat pendidikan. Pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi yang diharapkan. Selain faktor pendidikan, Palamuleni (2003) juga menyatakan bahwa status pekerjaan wanita juga memiliki pengaruh terhadap pengetahuan dan penggunaan kontrasepsi. Wanita yang bekerja di luar rumah memiliki tingkat penggunaan kontrasepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja di luar rumah (ibu rumah tangga). Seorang wanita yang bekerja memiliki pendapatan sehingga mempunyai kontrol yang lebih besar atas keputusan

rumah tangga dan keputusan reproduksi. Pemakaian alat kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya angka kelahiran. Menurut Singarimbun (1987), yang termasuk dalam kategori kontrasepsi adalah IUD, pil hormon, suntikan hormon, kondom, sterilisasi, dan norplant, sedangkan cara-cara sederhana, seperti sanggama terputus, pantang berkala, dan abstinensi, tidak termasuk di dalamnya. Pendapat lain disampaikan oleh Hatcher, et. al. (1997) yang membagi cara kontrasepsi ke dalam tiga metode berikut. (a) Metode sangat efektif yang terdiri atas norplant, IUD, vasektomi, suntik, dan sterilisasi kemudian (b) metode efektif, yaitu LAM, serta (c) metode kurang efektif yang terdiri atas kondom, pantang berkala, dan *diaphragm with spermicide*.

Proses pemilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan dapat digambarkan seperti halnya sebuah corong. Berbagai kemungkinan metode secara bertahap dikurangi menjadi pilihan kecil sehingga akhirnya tersisa pilihan tunggal yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, teknis, dan psikologis (Palmore dan Bulatao, 1989). Analogi tersebut dikembangkan sebagai cara sederhana mewakili banyak faktor penting yang saling terkait dalam memilih metode kontrasepsi. Penjelasan tersebut digambarkan dalam sebuah model seperti pada Gambar 1. Di bagian atas corong, banyak metode kontrasepsi yang telah tersedia, termasuk yang sekarang umum, seperti kondom dan pil, juga yang eksotis, seperti obat herbal dan yang futuristik, seperti *implan biodegradable* dan vaksin kontrasepsi. Di bagian bawah corong, individu (atau pasangan) memilih satu metode (atau kadang-kadang kombinasi metode) dari pilihan yang ada. Spektrum yang menggambarkan ketersediaan metode kontrasepsi secara bertahap menyempit dan bergerak ke bawah.

Masih menurut Palmore dan Bulatao (1989), faktor sosial budaya sebagian menentukan metode kontrasepsi yang akan dipilih oleh konsumen. Faktor-faktor, seperti pendidikan dan pendapatan, telah terbukti memengaruhi pilihan antara menggunakan kontrasepsi atau tidak. Faktor lain, yakni sosiokultural, seperti agama, kedudukan sosial, dan kebiasaan tertentu, juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan. Sementara itu, Simmons (1985) telah merangkum dari berbagai penelitian terkait berbagai variabel individu yang memberikan efek terhadap fertilitas. Ada hubungan yang kuat antara pendidikan dan tingkat fertilitas wanita. Partisipasi angkatan kerja wanita, preferensi seksual, ketersediaan layanan keluarga berencana, kondisi lingkungan secara umum, serta program dan kebijakan kependudukan memiliki dampak dalam kategori menengah (medium) terhadap tingkat fertilitas. Di sisi lain, kematian bayi, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, dan jumlah anak yang diinginkan hanya memiliki dampak yang lemah terhadap tingkat fertilitas.

Faktor lain yang berasosiasi dengan pemakaian alat kontrasepsi adalah kondisi sosial ekonomi. Kondisi perekonomian rumah tangga miskin dapat ditandai oleh rendahnya daya beli masyarakat, termasuk kemampuan mereka untuk membeli alat kontrasepsi. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan angka kelahiran. Dalam salah satu studi, Bongaarts (2001) menunjukkan adanya perbedaan pola kelahiran antara negara maju dan negara miskin. Kelahiran yang diukur dengan *total fertility rate* (TFR) di Italia dan Spanyol masing-masing 1,24 dan 1,27. Sementara itu, TFR di Swedia sebesar 1,65, Thailand 1,94, Singapura 1,79, Korea 1,65, dan Hongkong 1,32. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Moldova 2,15 ataupun Albania yang mencapai 2,85. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat pemakaian alat kontrasepsi. Di Malawi, persentase wanita miskin yang menggunakan alat kontrasepsi modern cenderung lebih rendah (19,8 persen) dibandingkan dengan wanita kaya (36,2 persen). Begitu juga di Zambia, perbandingannya mencapai 10,8 persen dan 52,5 persen (USAID, 2007).



Sumber: Palmore dan Bulatao, 1989

Gambar 1 Model dalam Faktor Pemilihan Alat Kontrasepsi

Hasil penelitian Fathonah (2000) tentang pola pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia menunjukkan tingkat penghentian pemakaian alat kontrasepsi paling tinggi adalah pada kondom dan penggunaan metode vagina. Kemudian tingkat penghentian untuk implan dan IUD sangat rendah dengan durasi rata-rata penggunaan lebih dari 36 bulan. Metode yang paling umum digunakan adalah suntikan karena memiliki tingkat penghentian cukup rendah dan durasi rata-rata cukup tinggi penggunaannya (35 bulan). Wanita dalam kelompok umur tua (44-49 tahun) dan ingin berhenti melahirkan anak sama sekali cenderung memiliki jangka waktu yang lebih lama dalam penggunaan kontrasepsi (penghentian rendah) dibandingkan dengan wanita yang lebih muda dan ingin mengatur jarak kelahiran berikutnya. Alasan penghentian menggunakan alat kontrasepsi paling banyak ditemukan karena adanya efek samping/masalah kesehatan, terutama untuk jenis pil, IUD, suntikan, dan implan. Sementara itu, sebagian besar penghentian pemakaian kondom disebabkan oleh ketidaknyamanan penggunaan (CBS, et. al., 1998).

Profil Pemakai Alat Kontrasepsi

Pemakaian Alat Kontrasepsi menurut Kelompok Umur

Keberhasilan program keluarga berencana (KB) dapat diukur, salah satunya, adalah dengan melihat jumlah penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan kelompok umur wanita pernah kawin, pemakaian kontrasepsi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi menurut umur jika dilihat dari tahun 1997, 2000, dan 2007. Pada 1997 wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi jenis hormonal paling banyak berada kelompok umur di bawah 40 tahun, sedangkan jenis nonhormonal dan tradisional paling banyak berada pada kelompok

umur di atas 30 tahun. Tahun 2000 untuk pemakaian alat kontrasepsi jenis hormonal masih dominan di kelompok umur di bawah 40 tahun, bahkan menunjukkan kenaikan sekitar dua persen. Demikian pula dengan jenis nonhormonal dan tradisional masih menunjukkan pola yang sama dengan tahun 1997, yakni paling banyak berada kelompok umur di atas 30 tahun. Kondisi yang hampir sama terjadi juga tahun 2007 ketika alat kontrasepsi hormonal mayoritas dipakai oleh kelompok umur di bawah 40 tahun, sedangkan jenis nonhormonal dan tradisional tetap berada pada kelompok umur di atas 30 tahun.

Kelompok umur muda menunjukkan peningkatan pengguna kontrasepsi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 yang mengindikasikan bahwa kesadaran untuk membatasi atau mengatur jarak kelahiran telah dipahami. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan muda juga dimaksudkan untuk menunda memiliki anak. Hal ini terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan bahwa usia di bawah 30 tahun yang memakai alat kontrasepsi semakin meningkat dari tahun 1997-2000. Sedikit terjadi penurunan secara relatif dari tahun 2000-2007 sekitar empat persen. Sementara itu, untuk wanita pernah kawin yang telah memiliki 1-2 anak, secara absolut jumlahnya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun 1997-2007. Hal ini juga mengindikasikan bahwa mereka cenderung menunda keinginan untuk memiliki anak lagi. Kemudian pada kelompok umur 40-49 tahun yang telah memiliki anak lebih dari dua cenderung banyak menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jumlah anak.

Pemakaian Alat Kontrasepsi menurut Tingkat Pendidikan

Hasil analisis data IFLS menunjukkan tingkat

Tabel 1 Wanita Pernah Kawin yang Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Kelompok Umur Tahun 1997, 2000, dan 2007

	1997			2000			2007		
	Hormonal	Nonhormonal	Trad	Hormonal	Nonhormonal	Trad	Hormonal	Nonhormonal	Trad
<30	43,5	11,7	10,0	48,7	16,0	18,8	47,3	20,6	25,2
30-39	42,3	49,1	48,8	37,4	42,7	44,4	38,2	36,7	39,3
40-49	14,2	39,2	41,3	13,9	41,3	36,8	14,5	42,7	35,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	2.301	766	83	3.000	875	137	4.259	763	208

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Tabel 2 Wanita Pernah Kawin yang Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Jumlah Anak yang Dimiliki Tahun 1997, 2000, dan 2007

Jumlah Anak	1997				2000				2007			
	<30	30-39	40-49	N	<30	30-39	40-49	N	<30	30-39	40-49	N
Tidak/belum punya anak	49,6	30,0	20,4	534	79,6	14,0	6,5	1.029	75,5	18,0	6,4	648
1-2	46,1	39,3	14,7	1.589	78,4	17,2	4,4	2.396	61,3	32,5	6,1	3.555
3-4	8,8	54,7	36,5	650	23,0	45,4	31,6	382	18,1	57,1	24,7	874
>=5	1,4	31,7	66,9	376	1,4	27,1	71,5	205	5,2	37,1	57,7	153
TOTAL				3.150				4.012				5.230

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

pendidikan wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi mayoritas berpendidikan SMA ke bawah untuk semua jenis kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berstatus kawin umumnya adalah mereka yang berpendidikan rendah dan menikah pada usia muda, sedangkan wanita dengan pendidikan lebih tinggi cenderung menunda perkawinannya. Pada 1997 mereka yang menggunakan alat kontrasepsi paling banyak adalah pendidikan SMA ke bawah yang mencapai 74,9 persen kemudian turun pada 2000 menjadi 72,8 persen dan turun lagi pada 2007 mencapai 65,6 persen. Sementara itu, mereka yang berpendidikan menengah ke atas (SMA ke atas) menunjukkan peningkatan dari tahun 1997 sampai tahun 2007, yaitu dari 25,1 persen menjadi 34,4 persen.

Fakta-fakta tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan tentang faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas. Pendidikan cenderung meningkatkan usia kawin pertama sehingga mengurangi

jumlah tahun yang dapat memungkinkan untuk melahirkan anak. Hubungan antara pendidikan wanita dan usia saat menikah telah ditemukan di hampir semua studi tentang fertilitas. Penelitian Cleland dan Jejeebhoy (1996) menunjukkan bahwa di hampir setiap negara di Asia Selatan, wanita berpendidikan akan menikah "kira-kira dua sampai lima tahun kemudian dibandingkan wanita yang tidak berpendidikan". Sebuah studi dari 26 negara berkembang yang disponsori oleh PBB (United Nations, 1995) menemukan bahwa usia kawin selalu meningkat seiring dengan tingkat pendidikan di semua negara yang diteliti meskipun fakta menunjukkan bahwa "usia kawin bervariasi di seluruh negara". Menurut Jejeebhoy (1995), usia saat menikah dipengaruhi oleh pendidikan yang mengindikasikan adanya kebebasan untuk pengambilan keputusan, interaksi yang lebih luas, otonomi secara emosional dan kemandirian.

Tabel 3 Wanita Pernah Kawin yang Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1997, 2000, dan 2007

Tingkat Pendidikan	1997			2000			2007		
	Hormonal	Non	Trad	Hormonal	Non	Trad	Hormonal	Non	Trad
Tidak sekolah/Tidak lulus	29,9	21,7	0,0	21,5	18,4	30,0	17,2	12,6	24,2
Lulus SD/ sederajat	33,3	25,8	33,3	33,6	25,9	40,0	29,5	14,9	13,7
Lulus SMP/ sederajat	18,2	12,5	0,0	22,0	14,4	0,0	23,3	16,7	16,8
Lulus SMA/ sederajat	14,9	29,2	33,3	19,3	24,7	30,0	23,9	32,2	26,3
Lulus DI/DII/DIII	2,4	5,8	0,0	2,4	6,9	0,0	3,4	8,8	5,3
Lulus >=S1	1,3	5,0	33,3	1,2	9,8	0,0	2,7	14,9	13,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	2.301	766	83	3.000	875	137	4.259	763	208

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Proporsi Pemakai Alat Kontrasepsi Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal dan Wilayah

Tabel 4 memperlihatkan proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi terhadap total wanita pernah kawin umur 15-49 tahun menurut daerah tempat tinggal dan wilayah tempat tinggal. Menurut status tempat tinggal, diketahui proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi terhadap total wanita pernah kawin di wilayah perkotaan tahun 1997 mencapai 52,6 persen. Sementara itu, proporsi yang menggunakan alat kontrasepsi untuk wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan karena besarnya hanya mencapai 47,4 persen. Pola yang sama juga terjadi tahun 2000, proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi

lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan tahun 1997 (52,4 persen dibandingkan 47,6 persen). Perbedaan proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi antara perkotaan dan perdesaan semakin berkurang tahun 2007 karena proporsi yang tinggal di perkotaan sebesar 51,7 persen dan perdesaan 48,3 persen.

Proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi terhadap total wanita pernah kawin menurut wilayah tempat tinggal yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni Jawa dan luar Jawa. Pada 1997 terlihat perbedaan proporsi yang cukup besar, yaitu wanita pernah kawin yang tinggal di Jawa mencapai 62,1 persen dan wanita pernah kawin yang tinggal di luar Jawa mencapai

Tabel 4 Proporsi Wanita Pernah Kawin yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Umur 15-49 Tahun menurut Status dan Wilayah Tempat Tinggal

TAHUN	Status Tempat Tinggal		Wilayah Tempat Tinggal	
	Kota	Desa	Jawa	Luar Jawa
1997	52,6	47,4	62,1	37,9
2000	52,4	47,6	60,6	39,4
2007	51,7	48,3	58,5	41,5

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

*N tahun 1997=3.150, 2000=4012, dan 2007=5230

37,9 persen. Tahun 2000 terjadi perubahan proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi terhadap total wanita pernah kawin yang bertempat tinggal di Jawa dan luar Jawa, yaitu 60,6 persen dan 39,4 persen. Tahun 2007 perbedaan antara wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi yang tinggal di Jawa dan luar Jawa semakin mengecil, yaitu 58,5 persen dan 41,5 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa penggunaan alat kontrasepsi dapat dikatakan telah menyebar tidak hanya di wilayah Jawa, tetapi di luar Jawa juga semakin meningkat dengan pesat.

Kecenderungan Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Perubahannya

Pemakaian Alat Kontrasepsi Berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan

Pemakaian kontrasepsi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan metode yang digunakan, yaitu hormonal, nonhormonal, dan tradisional. Metode hormonal meliputi pil, suntik, dan susuk, sedangkan nonhormonal terdiri atas spiral, intravag, kondom, femidom, dan sterilisasi pria/wanita. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan metode tradisional, antara lain, adalah sanggama terputus, pantang berkala, jamu tradisional, dan pijat tradisional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan metode hormonal adalah yang paling banyak dibandingkan dengan metode lainnya. Rata-rata pengguna jenis hormonal mencapai 75,3 persen dari 1997-2007 dengan peningkatan

pada tiap periodenya. Hal yang sebaliknya terjadi dengan mereka yang memakai alat kontrasepsi jenis nonhormonal karena tampak adanya gejala penurunan dari 1997-2007. Pada 1997 angkanya mencapai 25,5 persen dan kemudian menjadi 14,9 persen tahun 2007 atau turun kurang lebih sebesar 11 persen. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada pemakaian alat kontrasepsi jenis nonhormonal antara tahun 1997 sampai dengan 2007 yang ternyata beralih menggunakan jenis hormonal dan tradisional. Hal ini terlihat dari penggunaan metode tradisional yang menunjukkan peningkatan, bahkan kenaikan terjadi hampir dua kali lipat dari 1997-2007.

Hasil analisis data IFLS dalam hal pemakaian alat kontrasepsi tersebut sejalan dengan temuan dari SDKI. Data IFLS menunjukkan bahwa metode paling banyak dipilih adalah jenis hormonal, baik dari tahun 1997, 2000, dan 2007. Hasil SDKI 2012 (BKKBN, dkk., 2013) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu pemakaian jenis hormonal merupakan pilihan utama. Pada SDKI 1997 pemakai hormonal mencapai 88,2 persen kemudian sedikit turun pada 2002-2003 menjadi 85,7 persen dan naik kembali menjadi 86,1 persen tahun 2007. Pola yang berbeda antara data IFLS dan SDKI dapat terlihat dari pemakaian alat kontrasepsi jenis nonhormonal. Pada data SDKI pola yang terbentuk tidak linier karena dari tahun 1997 ke tahun 2002-2003 mengalami kenaikan dari 7,1 persen menjadi 8,3 persen. Namun pada 2007 jumlah pemakai jenis nonhormonal

Tabel 5 Alat Kontrasepsi yang Digunakan/Dipilih Tahun 1997, 2000, dan 2007

Metode KB	1997	2000	2007
Modern Hormonal	71,8	72,9	81,1
Modern Nonhormonal	25,5	23,7	14,9
Tradisional	2,7	3,4	4,0
Total	100,0 (N=3.150)	100,0 (N=4.012)	100,0 (N=5.230)

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

tersebut kembali turun menjadi 7,4 persen. Selain perbedaan pola pemakaian dari tahun ke tahun, perbedaan lain hasil IFLS dengan SDKI, terutama jenis nonhormonal, adalah proporsi wanita yang menggunakannya. Jika pada data IFLS menunjukkan dari 100 wanita yang memakai alat kontrasepsi, terdapat 15 orang yang memakai alat kontrasepsi jenis nonhormonal. Kemudian dari data SDKI tampak bahwa dari 100 orang, hanya terdapat 7 orang yang memakai jenis nonhormonal. Sementara itu, untuk pemakaian alat kontrasepsi jenis tradisional, data IFLS dan SDKI memperlihatkan pola yang sama, yaitu keduanya mengalami kenaikan dari 1997, 2002-2003, dan 2007 (dari 4,7 persen menjadi 6,5 persen).

Tren penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan metode yang dipilih menunjukkan adanya perbedaan. Jenis kontrasepsi hormonal dari tahun 1997 sampai tahun 2007 adalah yang paling banyak dipilih oleh wanita pada kelompok umur di bawah 30 tahun. Untuk metode nonhormonal, tampak adanya kecenderungan yang berbeda, yaitu kelompok umur yang paling banyak memakainya pada 1997 dan 2000 adalah kelompok umur 30-39 tahun. Kemudian tahun 2007 kecenderungannya berubah pada kelompok umur 40-49 tahun. Metode tradisional memiliki pola yang berbeda dengan kedua metode lainnya karena paling banyak berada pada kelompok umur 30-39

tahun yang konsisten dari tahun 1997 sampai tahun 2007 meskipun secara persentase menunjukkan kecenderungan penurunan. Secara persentase jumlah pengguna alat kontrasepsi jenis tradisional ini menunjukkan peningkatan dari 1997-2007 meskipun kenaikannya tidak terlalu besar.

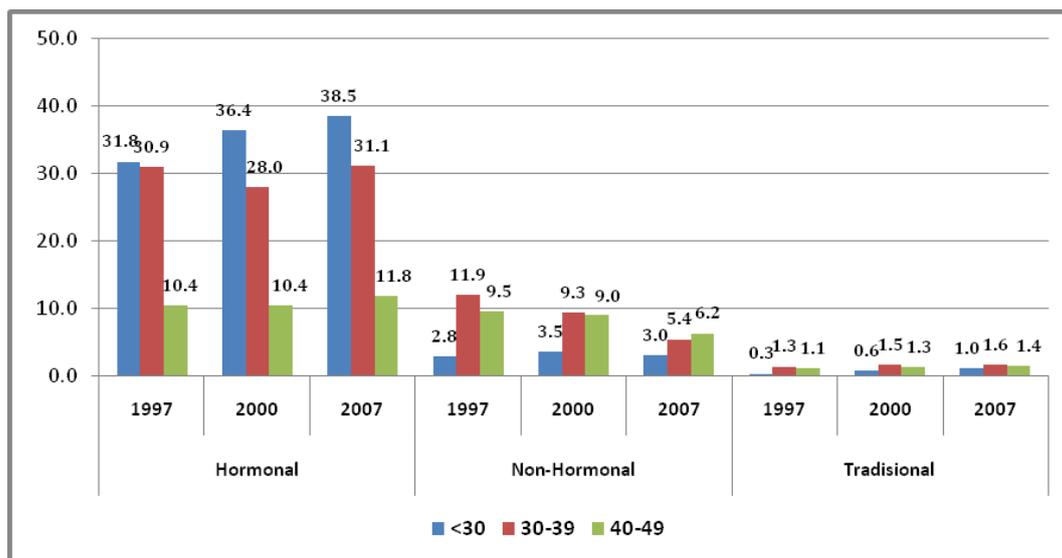
Perubahan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Sebelum membahas tentang perubahan pola penggunaan alat kontrasepsi, sebelumnya akan dijelaskan perubahan jumlah wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Data IFLS menunjukkan tahun 1997 jumlah wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi mencapai 3.150 orang. Setelah dilakukan survei ulang tahun 2000 ditemukan perubahan dengan adanya penambahan jumlah akseptor KB baru yang mencapai 1.553 orang atau mencapai 49,3 persen dari jumlah pemakai tahun 1997. Selain itu, terdapat 691 orang (21,9 persen) yang menggunakan alat kontrasepsi tahun 1997 yang tidak menggunakan lagi tahun 2000. Hasil yang hampir sama juga terlihat di kurun waktu 2000-2007. Dari pengguna alat kontrasepsi tahun 2000 sebanyak 4.012 orang bertambah menjadi 5.230 orang tahun 2007. Penambahan tersebut disebabkan oleh adanya akseptor KB baru sebanyak 2.086 orang atau 52 persen dari total pemakai tahun 2000. Sementara itu, pengguna alat

Tabel 6 Tren Pemakaian Alat/Cara KB Tertentu, Indonesia 1997-2007

Metode KB	SDKI 1997	SDKI 2002-2003	SDKI 2007
Hormonal	88,2	85,7	86,1
Nonhormonal	7,1	8,3	7,4
Tradisional	4,7	6,0	6,5
Total	100,0	100,0	100,0
N	15.433	16.742	18.930

Sumber: Data SDKI 1997, 2002-2003, dan 2007



Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Gambar 2 Tren Pemakaian Alat Kontrasepsi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kontrasepsi yang Dipilih Tahun 1997-2007

kontrasepsi tahun 2000 yang tahun 2007 tidak menggunakan lagi terdapat sebanyak 868 orang atau 21,6 persen dari total pemakai tahun 2000. Hasil analisis data IFLS tentang pemakaian alat kontrasepsi dari 1997-2007 juga menunjukkan bahwa akseptor baru mengalami kecenderungan naik, sedangkan akseptor yang kemudian berhenti memakai semakin berkurang meskipun hanya sedikit.

Pada Tabel 7 telah diuraikan tentang perubahan jumlah pengguna alat kontrasepsi dari 1997-2007. Perubahan pola penggunaan alat kontrasepsi dapat dilihat dari berubahnya metode yang digunakan dari tahun ke tahun. Perubahan yang dimaksud adalah terjadi penggantian dengan menggunakan

metode lainnya, baik dari hormonal ke nonhormonal atau tradisional dan demikian juga sebaliknya. Data IFLS menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 1997-2000 total wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi bertambah dari 3.150 orang menjadi 4.012 orang dan 691 orang tidak menggunakannya lagi. Dari 2.459 wanita pernah kawin yang masih menggunakan alat kontrasepsi, sebanyak 2159 menggunakan jenis hormonal, 234 jenis nonhormonal, dan 66 jenis tradisional. Apabila dilihat dari tahun 1997-2000 menurut jenis kontrasepsi yang digunakan, mereka yang bertahan menggunakan alat kontrasepsi jenis hormonal sebesar 2.142 (96,7 persen) kemudian untuk

Tabel 7 Jumlah Wanita Pernah Kawin yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Tahun 1997-2000 dan 2000-2007

Tahun	Jumlah Pemakai	Akseptor Lama	Akseptor Baru	Persentase Perubahan Akseptor Baru terhadap Jumlah Pemakai	Akseptor yang Berhenti Memakai KB	Persentase Perubahan Akseptor yang Berhenti terhadap Jumlah Pemakai
1997	3.150					
2000	4.012	2.459	1.553	49,3	691	21,9
2007	5.230	3.144	2.086	52,0	868	21,6

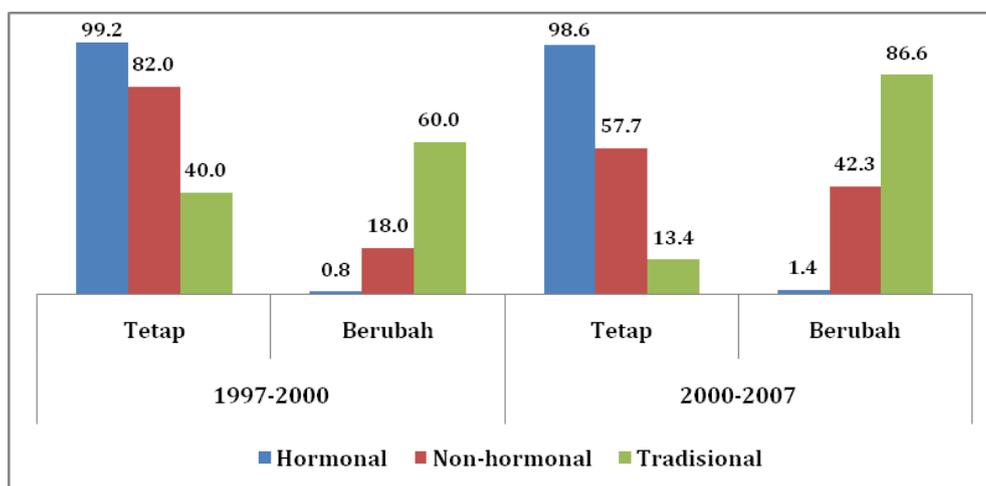
Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

yang nonhormonal, dari 234 orang, tersisa sebanyak 88,7 persen (192 orang) masih menggunakannya. Sementara itu, untuk jenis tradisional, dari 66 orang yang masih menggunakannya sebanyak 40 persen (27 orang) tetap memilih jenis ini.

Pola yang hampir sama juga terjadi di rentang waktu 2000-2007, yaitu jenis kontrasepsi hormonal adalah yang paling banyak tetap bertahan dibandingkan dengan jenis lainnya. Jumlah wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi tahun 2000 mencapai 4.012 orang dan 3.144 di antaranya masih tetap menggunakan sampai tahun 2007. Dari sejumlah 3.144 orang, yang

stabil tertinggi dari 1997-2007 dibandingkan dengan metode nonhormonal dan tradisional.

Pada Tabel 8 digambarkan para pengguna alat kontrasepsi baru dari tahun 1997 sampai tahun 2000 dan tahun 2000 sampai tahun 2007 berdasarkan kelompok umur. Dalam rentang waktu 1997-2000 wanita pernah kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi tahun 1997, tetapi menggunakannya tahun 2000 terbanyak memilih jenis hormonal yang mencapai 61,5 persen. Kemudian jenis nonhormonal dan tradisional mencapai 28,9 persen dan 9,6 persen. Menurut kelompok umur, diketahui untuk ketiga jenis alat kontrasepsi, metode



Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Gambar 3 Perubahan Penggunaan Alat Kontrasepsi Tahun 1997-2000 dan Tahun 2000-2007 menurut Metode Kontrasepsi

menggunakan jenis hormonal mencapai 2.804 orang, nonhormonal sebanyak 214, dan tradisional sebesar 126 orang. Jika dilihat dari perubahan penggunaan alat kontrasepsi antara 2000-2007, diketahui yang masih tetap menggunakan jenis hormonal mencapai 94,9 persen (2.804), nonhormonal turun menjadi 70,4 persen (214 orang), dan tradisional hanya 13,4 persen (17 orang). Dari data IFLS ini dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi yang masih tetap bertahan paling tinggi adalah jenis hormonal karena jumlah pemakainya

hormonal adalah yang paling banyak dipilih oleh kelompok umur di bawah 30 tahun, yakni sebesar 68,8 persen selanjutnya adalah umur 30-39 tahun yang sebanyak 35,6 persen, dan umur 40-49 tahun sebanyak 26,3 persen. Untuk jenis nonhormonal dan tradisional, yang paling banyak adalah kelompok umur 40-49 tahun yang mencapai 43,8 persen dan 30 persen.

Pola yang sama terjadi antara tahun 2000-2007 untuk wanita pernah kawin yang tidak menggunakan, tetapi kemudian

Tabel 8 Akseptor Baru KB Tahun 1997-2000 dan Tahun 2000-2007 menurut Metode Kontrasepsi

Perubahan Jenis Kontrasepsi	1997-2000				2000-2007			
	< 30	30-39	40-49	Total	< 30	30-39	40-49	Total
Hormonal	68,6	35,6	26,3	61,5	64,8	43,1	32,9	61,1
Nonhormonal	25,7	40,8	43,8	28,9	29,0	39,4	43,6	30,7
Tradisional	5,7	23,6	30,0	9,6	6,2	17,5	23,6	8,2
Persen	100,0							
N	955	449	149	1.553	1.275	641	170	2.806

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

menggunakan alat kontrasepsi. Untuk jenis hormonal, justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan rentang waktu 1997-2000, yakni menjadi 91,2 persen. Selanjutnya pengguna jenis nonhormonal menjadi lebih rendah dibandingkan dengan jenis tradisional, yakni masing-masing sebesar 4,3 persen dan 4,5 persen. Jika diamati menurut kelompok umur, diketahui untuk jenis hormonal yang paling tinggi berada kelompok umur di bawah 30 tahun yang mencapai 95,6 persen, sedangkan jenis nonhormonal dan dan tradisional paling banyak berada pada kelompok umur 40-49 tahun, yakni 16,1 persen dan 13 persen.

Alasan Wanita Berhenti Memakai Alat Kontrasepsi dan Karakteristiknya

Alasan Berhenti Memakai Alat Kontrasepsi

Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, terdapat 691 orang (21,9 persen) yang menggunakan alat kontrasepsi tahun 1997 yang tidak menggunakan lagi tahun 2000. Kemudian pengguna alat kontrasepsi tahun 2000 yang tidak menggunakan lagi tahun 2007 terdapat sebanyak 868 orang atau 21,6 persen dari total pemakai tahun 2000. Alasan paling banyak berhenti memakai alat kontrasepsi adalah ingin mempunyai anak

lagi yang mencapai 65,8 persen dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Alasan terbanyak kedua berhenti memakai alat kontrasepsi adalah faktor kesehatan, yakni sebanyak 22 persen yang terjadi pada wanita yang telah memiliki anak lebih dari empat (78,9 persen). Sementara itu, antara dari tahun 2000 sampai tahun 2007 alasan yang paling banyak dikemukakan juga adalah keinginan mempunyai anak lagi yang besarnya mencapai 53,3 persen. Alasan berikutnya adalah karena faktor kesehatan yang terdiri atas adanya efek samping yang ditimbulkan dan saran dokter untuk tidak memakai alat KB, yaitu sebesar 27,9 persen, dan jenis kontrasepsi yang dipakai paling banyak adalah hormonal.

Terkait dengan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi tampak adanya perubahan yang cukup baik. Pada rentang waktu dari tahun 1997 sampai tahun 2000 sukarnya memperoleh alat KB sebanyak 2,5 persen kemudian tahun 2000 sampai tahun 2007 turun menjadi 1,5 persen. Hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa alat kontrasepsi semakin mudah diperoleh.

Wanita pernah kawin yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi dapat dikaitkan dengan variabel lain, yaitu umur

dan jumlah anak yang telah dimiliki. Terkait dengan umur, paling banyak yang berhenti memakai alat kontrasepsi adalah kelompok umur di bawah 30 tahun dengan alasan ingin mempunyai anak yang mencapai sekitar 66 persen antara tahun 1997 sampai tahun 2000. Alasan kedua terbanyak adalah karena faktor kesehatan yang mencapai 22 persen yang berada pada kelompok umur 40-49 tahun dan jenis kontrasepsi yang digunakannya sebelumnya adalah hormonal. Untuk rentang waktu tahun 2000 sampai tahun 2007, alasan berhenti memakai alat kontrasepsi paling banyak adalah keinginan untuk mempunyai anak yang mencapai 53,3 persen dan berada pada kelompok umur di bawah 30 tahun. Alasan lainnya adalah faktor kesehatan sebesar 27,9 persen yang berada kelompok umur 40-49 tahun dan jenis kontrasepsi

yang dipakai sebelumnya adalah hormonal. Jika dikaitkan dengan jumlah anak yang dimiliki, dalam rentang waktu antara tahun 1997 sampai tahun 2000 yang paling banyak adalah mereka yang telah memiliki 3-4 anak dengan persentase mencapai 73,7 persen. Demikian juga antara tahun 2000 sampai tahun 2007 yang paling banyak berhenti memakai alat kontrasepsi adalah wanita yang telah memiliki 3-4 anak (54,1 persen). Jumlah wanita dengan 3-4 anak tersebut menunjukkan penurunan karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi untuk wanita yang memiliki anak lebih dari empat mencapai 32,1 persen (sebelumnya hanya 19 persen).

Perubahan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan dapat dilihat dari kelompok umur. Tahun 1997-2000 perubahan yang terjadi dari menggunakan alat kontrasepsi

Tabel 9 Alasan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi

Alasan Tidak Menggunakan KB lagi	1997-2000		2000-2007	
	N	Persen	N	Persen
Ingin punya anak	455	65,8	463	53,3
Alasan kesehatan	152	22,0	242	27,9
Baru melahirkan	35	5,1	28	3,2
Suami tidak di rumah	30	4,3	63	7,3
Alat KB sukar didapatkan	17	2,5	13	1,5
Lainnya	2	0,3	59	6,8
Total	691	100,0	868	100,0

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Tabel 10 Akseptor KB yang Berhenti Menggunakan Alat Kontrasepsi Tahun 1997-2000 dan Tahun 2000-2007 menurut Metode Kontrasepsi

Perubahan Penggunaan Kontrasepsi	1997-2000				2000-2007			
	< 30	30-39	40-49	Total	< 30	30-39	40-49	Total
Hormonal	92,6	84,3	67,0	80,6	90,6	84,5	72,7	79,0
Nonhormonal	6,8	10,8	24,3	14,2	8,5	10,9	19,7	15,2
Tradisional	0,7	4,9	8,7	5,2	0,9	4,6	7,6	5,8
Persen	100,0							
N	148	325	218	691	106	304	458	868

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

menjadi tidak memakai terbanyak adalah jenis hormonal pada setiap kelompok umur. Pada kelompok umur di bawah 30 tahun jumlahnya mencapai 92,6 persen, umur 30-39 sebanyak 84,3 persen, dan kelompok umur 40-49 tahun sebanyak 67,0 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa kelompok umur di bawah 30 tahun adalah yang paling tinggi secara persentase tidak lagi memakai alat kontrasepsi karena keinginan untuk mempunyai lagi. Fakta tersebut diperkuat dari data yang telah diuraikan di atas, yaitu kelompok umur di bawah 30 tahun adalah yang paling banyak berhenti memakai alat kontrasepsi karena keinginan mempunyai anak lagi yang disebabkan oleh sebagian besar baru memiliki 1-2 anak. Sementara itu, perubahan dari menggunakan alat kontrasepsi jenis nonhormonal dan tradisional menjadi tidak menggunakan paling banyak terjadi pada kelompok umur 40-49 tahun. Pada jenis nonhormonal mencapai 24,3 persen dan tradisional sebanyak 8,7 persen. Pada kelompok umur 40-49 tahun tersebut beralasan tidak setuju dengan KB.

Dari tahun 2000 sampai 2007 perubahan dari menggunakan alat kontrasepsi jenis tertentu menjadi tidak menggunakan lagi memiliki pola yang sama antarsetiap jenis. Untuk jenis hormonal, paling banyak terjadi perubahan pada kelompok umur di bawah 30 tahun (90,6 persen), sedangkan nonhormonal dan tradisional terjadi perubahan paling banyak di kelompok umur 40-49 tahun, yakni

masing-masing mencapai 19,7 persen dan 7,6 persen. Banyaknya kelompok umur di bawah 30 tahun yang berhenti menggunakan alat kontrasepsi antara tahun 2000 sampai tahun 2007 ini juga disebabkan oleh keinginan untuk mempunyai anak lagi.

Wanita Berhenti Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Status dan Wilayah Tempat Tinggal

Tabel 11 menunjukkan proporsi wanita pernah kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi menurut status tempat tinggal dan wilayah tempat tinggal. Menurut status tempat tinggal, diketahui proporsi wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi tahun 1997 dan tidak menggunakan lagi tahun 2000 di wilayah perkotaan mencapai 50,7 persen. Sementara itu, proporsi yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi untuk wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan karena besarnya hanya mencapai 49,3 persen. Pola yang sama juga terjadi tahun 2007 ketika proporsi wanita pernah kawin yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (54,8 persen dan 45,2 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wanita di perkotaan semakin banyak yang tidak memakai lagi dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan karena alasannya ingin mempunyai anak lagi.

Tabel 11 Akseptor KB yang Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Status dan Wilayah Tempat Tinggal

TAHUN	Status Tempat Tinggal		Wilayah Tempat Tinggal	
	Kota	Desa	Jawa	Luar Jawa
1997-2000	50,7	49,3	62,2	37,8
2000-2007	54,8	45,2	60,3	39,7

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Seperti halnya dengan status wilayah, untuk wilayah tempat tinggal, dibagi menjadi dua kelompok, yakni Jawa dan luar Jawa. Wanita yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi lebih banyak bertempat tinggal di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa meskipun persentasenya menunjukkan penurunan antara 1997-2000 dengan 2000-2007. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang berhenti memakai alat kontrasepsi memperlihatkan gejala semakin meningkat untuk wanita yang berada di Jawa.

Wanita Berhenti Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Tingkat Pendidikan

Data menunjukkan tingkat pendidikan wanita pernah kawin yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi mayoritas berpendidikan SMA ke bawah yang jumlahnya mencapai 69 persen tahun 1997-2000 dan sebesar 73 persen tahun 2000-2007. Pola ini sejalan dengan wanita yang hingga saat ini masih menggunakan alat kontrasepsi dominan berpendidikan SMA ke bawah. Sementara itu, wanita yang tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan tingkat pendidikan tinggi, yakni diploma 1 ke atas, mempunyai persentase yang tergolong kecil, yaitu hanya 8,8 persen tahun 2000 dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 10,8 persen tahun 2007.

Kesimpulan

Jenis kontrasepsi yang stabil dipakai antara tahun 1997 sampai tahun 2007 adalah hormonal. Berdasarkan karakteristik pemakai alat kontrasepsi, paling banyak berada pada kelompok umur di bawah 40 tahun dan baru memiliki 1-2 orang anak. Menurut tingkat pendidikan, diketahui mayoritas berpendidikan rendah dan menikah pada usia muda karena wanita yang berpendidikan tinggi cenderung menunda perkawinannya. Hasil IFLS dan SDKI tentang pemakaian alat kontrasepsi dari tahun 1997 sampai 2007 menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu jenis hormonal adalah yang paling banyak dipakai.

Terjadi perubahan pemakaian alat kontrasepsi antara tahun 1997 sampai tahun 2007. Pada rentang waktu antara tahun 1997 sampai tahun 2000 terdapat 49,3 persen akseptor baru dan akseptor yang berhenti memakai sebesar 21,9 persen. Sementara itu, dari tahun 2000 sampai 2007 akseptor baru mencapai 52 persen dan akseptor yang berhenti sebanyak 21,6 persen. Akseptor baru tahun 2000 dan 2007 mayoritas memakai alat kontrasepsi jenis hormonal dan kebanyakan akseptor yang berhenti memakai kontrasepsi pada tahun yang sama sebelumnya juga menggunakan jenis hormonal.

Tabel 12 Akseptor KB yang Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	1997-2000		2000-2007	
	N	Persen	N	Persen
Tidak sekolah/tidak lulus SD	120	17,4	282	32,4
Lulus SD/ sederajat	219	31,7	246	28,4
Lulus SMP/ sederajat	138	20,0	106	12,2
Lulus SMA/ sederajat	153	22,2	141	16,2
Lulus DI/DII/DIII	30	4,4	47	5,4
Lulus >=S1	30	4,4	47	5,4
Total	691	100,0	868	100,0

Sumber: Data IFLS 1997, 2000, dan 2007, diolah

Alasan utama tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi adalah keinginan untuk mempunyai anak lagi. Sebagian besar mereka berada pada kelompok umur di bawah 30 tahun dan baru memiliki 1-2 orang anak. Hampir 70 persen wanita yang tidak memakai alat kontrasepsi lagi berpendidikan rendah, yaitu SMA ke bawah antara tahun 1997 sampai tahun 2000 dan tahun 2000 sampai tahun 2007.

Rekomendasi Kebijakan

Wanita pernah kawin yang menggunakan alat kontrasepsi menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 1997 sampai tahun 2000 yang mencapai 27,4 persen dan dari tahun 2000 sampai 2007 sebesar 30,4 persen. Namun berdasarkan pada temuan-temuan dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan, yang antara lain adalah sebagai berikut.

1. perlunya perluasan akses untuk mempermudah mendapatkan alat kontrasepsi, terutama pada wanita pernah kawin yang tinggal di desa dan di luar Jawa
2. peningkatan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi secara intensif melalui berbagai media, seperti melalui televisi, poster, majalah, koran, dan media sosial. Hal ini dilakukan agar kesadaran tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat, terutama yang berpendidikan tinggi karena sebagian besar yang menggunakan alat kontrasepsi berpendidikan rendah.
3. peningkatan layanan KB melalui berbagai cara, seperti.
 - a. pelayanan KB yang tepat sasaran, khususnya dengan penyediaan pelayanan KB gratis

- b. penyebaran informasi yang lengkap tentang KB dan kesehatan reproduksi secara menyeluruh sehingga membantu dalam penentuan alat kontrasepsi yang akan dipakai
4. revitalisasi program KB dengan mengembalikan fungsi utama BKKBN dalam mengontrol fertilitas dengan menggalakkan kembali program KB dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan kependudukan, terutama di daerah.

Daftar Pustaka

- Ananta, et. al. 1993. "Fertility Determinants in Indonesia: A Sequential Analysis of The Proximate Determinants". *Demographic Series, No.9 June*. Jakarta, Demographic Institute.
- Angeles, Gustavo, Jason Dietrich, David Guilkey, Domkinic Mancini, Thomas Mroz, Amy Tsui, and Feng Yu Zhang. 2001. *A Meta-Analysis of The Impact of Family Planning Programs on Fertility Preferences, Contraceptive Method Choice and Fertility*. Chapel Hill, Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill.
- Basu A. M. and Sejeda Amin. 2000. "Conditioning Factors for Fertility Decline in Bengal: History of Language, Identity and Openness to Innovations." *Population and Development Review*, 26(4): 761-794.
- BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, dan ICF Internasional. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.
- Bongaarts, J. and S.C. Watkins. 1996. "Social Interactions and Contemporary Fertility Transitions." *Population and Development Review*, 22(4): 639-682.

- Bongaarts, Jhon C. 2001. Fertility and Reproductive Preferences in Post-Transitional Societies, in R.A. Bulatao and J.B Casterline (eds), *Global Fertility Transition*, Supplement to *Population and Development Review*, 27: 260-281.
- BPS dan Macro Int. 1993. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS dan Macro Int. 1995. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS dan Macro Int. 1998. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS dan Macro Int. 2004. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2003-2003*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS dan Macro Int. 2008. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS dan Macro Int. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta, BPS dan Macro Internasional.
- BPS. 1998. *Indonesia and Health Survey 1997*. Columbia, MD: Macro International.
- Bruce, Judith. 1990. "Fundamental Elements of Quality Care: A Simple Framework". *Studies in Family Planning*, 21 (2): 61-91.
- Central Bureau of Statistics (CBS) [Indonesia] and State Ministry of Population/National Family Planning Coordinating Board (NFPCB) and Ministry of Health (MOH) and Macro International Inc. (MI). 1998. *Indonesia Demographic and Health Survey 1997*. Calverton, Maryland: CBS and MI.
- Cleland, John and Shireen Jejeebhoy. 1996. "Maternal Schooling and Fertility: Evidence from Censuses and Surveys". *Girl's Schooling, Autonomy and Fertility Change in South Asia*. Roger Jeffery and Alaka M. Basu (eds.). Thousand Oaks, C.A.: Sage Publications.
- Fathonah, Siti. 2000. *Patterns of Contraceptive Use in Indonesia*. National Family Planning Coordinating Board Jakarta Indonesia and Macro International Inc. Calverton Maryland USA.
- Gakidou, Emmanuela and Effy Vayena. 2007. Use of Modern Contraception by the Poor Is Falling Behind. *Plos Medicine*. February 2007, Volume 4, Issue 2.e31.
- Gray, E., and McDonald, P. 2010. "Using a Reproductive Life Course Approach to Understand Contraceptive Method Use in Australia". *Journal of Biosocial Science*, 42(1): 43-57.
- Greenspan, Allan. 1991. "Adding choice to the contraceptive mix: lessons from Indonesia". *Asia Pasific Population Policy*, Dec (19):1-4.
- Hatcher, R.A., et.al. 1997. *The Essentials of Contraceptive Technology*. Baltimore, John Hapkins University School of Public Health, Population information Program.
- Husain, Zakir, et.al. 2011. *Contraceptive Use Among Illiterate Women in India: Does Proximate Illiteracy Matter?* Delhi: Institute of Economic Growth, Delhi, Presidency University, Presidency University.
- Jejeebhoy, Shireen J. 1995. *Women's Education, Autonomy, and Reproduction Behaviour: Experience from Developing Countries*. Oxford, Clarendon Press.
- Lucke, J., Herbert, D., Watson, M., and Dobson, A. 2011. "Contraceptive Changes after Reproductive Events among Australian Women Born in 1973 to 1978: A longitudinal Study from 1996 to 2009". *Women's Health Issues*, 21(6), 438-443.
- Palamuleni, Martin E. 2003. "Socio-Economic and Demographic Factors

- Affecting Contraceptive use in Malawi". *African Journal of Reproductive Health* September 2013. North West University, Mafikeng Campus, Private Bag X2046, Mmabatho 2735, Republic of South Africa.
- Palmore, James A. and Rodolfo A. Bulatao. 1989. "The Contraceptive Method Mix: An Overview". *Choosing a Contraceptive Method Choice in Asia and the United States*. Rodolfo A. Bulatao, et.al. (ed.) The East-West Population Institute East-West Center Honolulu, Hawaii.
- Shoemaker, Juan. 2005. "Contraceptive Use Among the Poor in Indonesia". *International Family Planning Perspectives*, 31 (3), September.
- Simmons, George B. 1985. "Research on the Determinants of Fertility". *Fertility in Developing Countries: An Economic Perspective on Research and Policy Issues*. Pp. 67-108. Ghazi Farooq and George B. Simmons (eds.). London: Macmillan.
- Singarimbun, Masri. 1987. "Hubungan Keluarga Berencana dan Fertilitas". Makalah. Disampaikan pada Lokakarya Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Yogyakarta, 16 Februari-7 Maret.
- United Nations. Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division. 1995. *Women's Education and Fertility Behaviour*. New York: United Nations.
- USAID. 2007. *Inequities in the Use of Family Planning and Reproductive Health Services: Implications for Policies and Programs*. USAID collaboration with the Centre for Development and Population Activities (CEDPA), White Ribbon Alliance for Safe Motherhood and World Conference of Religions for Peace.
- Wang, Duolao and Ian Diamond. 1995. "The Impact on Fertility of Contraceptive Failure in China in the 1980s". *Journal of Biosocial Science*, 27: 277-284.

JUMLAH ANAK IDEAL MENURUT REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Umi Listyaningsih¹, Sumini²

¹Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, ²Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi: Umi Listyaningsih (*e-mail*: listyaningsih_umi@yahoo.com)

Abstrak

Persepsi jumlah anak ideal dan jumlah anak yang diinginkan sering kali digambarkan oleh pasangan usia subur (15-49 tahun). Sementara itu, persepsi remaja mengenai hal serupa juga tidak kalah penting karena dapat menggambarkan fertilitas di masa mendatang. Itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karenanya, dilakukan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam kepada remaja di kabupaten/kota di DIY. Sebanyak 500 remaja dipilih secara acak dari setiap kabupaten/kota yang juga merupakan representasi dari remaja perkotaan dan perdesaan. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa persepsi jumlah anak ideal remaja sebanyak 2,17, sedangkan persepsi jumlah anak yang diinginkan adalah 2,11. Remaja menilai bahwa kehadiran anak penting dalam keluarga karena manfaat yang diperoleh, seperti untuk membantu orang tua, sebagai sumber kebahagiaan keluarga, penerus keturunan, dan jaminan di hari tua.

Kata kunci: remaja, persepsi jumlah anak ideal, jumlah anak yang diinginkan

IDEAL NUMBER OF CHILDREN BY ADOLESCENTS IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Abstract

The perception on the ideal number of children and children desire tend to be described by couple age 15-49. Meanwhile, the teenager perception in such was also important, because it would be describing the fertility in future. That was the focus of this research. Therefore, interview to particular teenager in regency/city DIY was held. Total 500 teenagers were chosen randomly from each regency/city that represented teenager of rural and teenager of urban. The research found that the ideal number on teenager perception was 2.17, but perception on the children desire was 2.11. As teenager opinion, existence of the children in the family were important because it can give benefit, such as for helping the parents, the source of parents' happiness, the successors and a guarantee in the old days.

Keywords: teenagers, perception on the ideal number of children, perception on the children number desire

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir fertilitas di Indonesia tidak menunjukkan penurunan secara signifikan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 menunjukkan angka fertilitas total (TFR) Indonesia stagnan pada 2,6. Sementara itu, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru angkanya mengalami peningkatan dari 1,80 tahun 2007 menjadi 2,1 tahun 2012. Dengan kondisi ini, dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai target fertilitas 2,1 dan *Nett Reproduksi Rate* (NRR) sama dengan satu tahun 2015. Terlebih di wilayah DIY terdapat gap atau perbedaan persepsi anak ideal antara remaja dan orang tua. Ada kecenderungan persepsi jumlah anak ideal menurut remaja lebih rendah dibandingkan dengan persepsi orang tua, tetapi apabila dibandingkan dengan TFR, angkanya lebih tinggi. Hal ini berarti angka kelahiran pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat mengingat persepsi remaja terhadap jumlah kelahiran dan anak ideal berada di atas angka TFR.

Kajian fertilitas yang melibatkan pasangan usia subur usia 15-49 telah banyak dilakukan, sedangkan kajian fertilitas yang melibatkan remaja masih jarang ditemui. Sebagaimana diketahui, remaja tidak dapat memberikan gambaran fertilitas saat ini, tetapi dapat memberikan gambaran fertilitas di masa mendatang. Remaja memiliki persepsi tentang jumlah anak yang diinginkan kelak di kemudian hari setelah menikah. Besarnya tentu sangat beragam tergantung banyak faktor. Hal penting yang perlu dicatat adalah remaja berada pada tahap perubahan. Secara fisik, perubahan itu ditandai dengan semakin siapnya organ-organ reproduksi. Apabila tidak diiringi dengan pendampingan keluarga secara memadai, maka tidak menutup kemungkinan remaja akan terjerumus dalam persoalan yang disebabkan oleh

ketidakmampuan mereka menjaga sistem reproduksinya yang semakin siap pada fase itu.

Banyak hasil kajian menunjukkan bahwa kurangnya peran keluarga dalam pendidikan remaja menyebabkan remaja menghadapi persoalan terkait perilaku merokok, tindak kriminalitas, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, dan perilaku seksual berisiko. Remaja yang terjerat pada perilaku-perilaku tidak baik itu cenderung memiliki prestasi sekolah yang buruk. Ilmu dan pengetahuan yang diberikan di sekolah tidak dapat dipahami dengan baik karena konsentrasi yang lemah. Oleh karena itu, tidak jarang mereka berakhir dengan memiliki prestasi kelas yang buruk, bahkan putus sekolah.

Remaja dihadapkan pada tantangan persoalan yang tidak sedikit. Selain yang telah disebutkan, remaja juga dihadapkan pada persoalan sanksi sosial. Masyarakat memberikan stigma negatif kepada remaja-remaja yang berperilaku tidak wajar, seperti hamil di luar nikah. Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah tidak diterima secara baik di lingkungan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja yang belum menikah dianggap sebagai anak haram, serta membawa keburukan dan kesialan bagi masyarakat. Remaja pun juga harus keluar dan menghentikan sekolahnya karena sekolah tidak memperbolehkan peserta didiknya hamil ataupun menikah.

Persoalan-persoalan itu sering kali terjadi di kalangan remaja yang secara kuantitas, mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Di Indonesia, remaja (15-24 tahun) meningkat jumlahnya dari 2.488.544 tahun 1971 menjadi 3.457.591 tahun 2010. Jumlah yang terus meningkat itu dapat menjadikan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap angka kelahiran. Kemampuan dan kualitas remaja dalam membentuk harapan di masa depan terkait jumlah anak atau kelahiran yang diinginkan

adalah cerminan rata-rata angka kelahiran total. Oleh karena itu, penilaian remaja terhadap kelahiran di masa mendatang merupakan hal penting untuk diketahui.

Selama ini diskusi mengenai remaja cenderung memperbincangkan masalah remaja pada perspektif sosial dan persoalan kesehatan reproduksi. Hal ini telah mengakibatkan terabaikannya aspek-aspek yang lebih substansial, khususnya yang terkait dengan fertilitas, seperti jumlah anak ideal, jumlah anak yang diinginkan, dan bagaimana persepsi tersebut dapat terbentuk dalam kerangka berpikir remaja. Pada kerangka inilah kajian ini dilakukan dengan memfokuskan diri pada persepsi remaja terhadap jumlah anak ideal dan jumlah anak ideal yang diinginkan.

Besarnya angka kelahiran di masa mendatang secara tidak langsung dapat digambarkan dari jumlah kelahiran yang diinginkan dan jumlah anak ideal menurut remaja saat ini. Hal ini tentu bukan menjadi satu parameter mutlak karena respons atau persepsi yang disampaikan remaja dapat berbeda seiring bertambahnya usia dan pendidikan. Terdapat banyak hal dan faktor yang dapat memengaruhinya. Namun justru studi ini dapat menemukan dan merumuskan kebutuhan remaja, khususnya akses terhadap media informasi tentang kesehatan reproduksi.

DIY memiliki keunikan demografi, yaitu memiliki TFR terendah se-Indonesia. TFR hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 di DIY sebesar 1,9. Tingkat kelahiran di DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan TFR tahun 1999, yaitu sebesar 1,44. Sementara itu, hasil publikasi Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia Tahun 2007 menunjukkan remaja di DIY menginginkan jumlah anak ideal, sebanyak 2,3 untuk remaja perempuan dan 2,2 untuk remaja laki-laki. Angka tersebut jauh lebih

rendah daripada persepsi remaja secara nasional, yaitu 2,5 sampai 2,7, bahkan lebih rendah daripada persepsi orang tua di Amerika terhadap jumlah anak ideal, yaitu 2,5, tetapi lebih tinggi daripada tingkat fertilitas yang telah dicapai. Keinginan jumlah anak ideal yang melebihi nilai TFR merupakan tantangan pada masa yang akan datang, yaitu terjadinya peningkatan jumlah kelahiran.

Studi Nilai Anak

Tessa (2000) menyebutkan dua teori yang sesuai untuk mengkaji keputusan fertilitas: jumlah anak yang diinginkan. Teori pertama disebut sebagai teori perilaku yang direncanakan (*planned behaviour*). Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bentuk kesadaran dan perilaku yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. (a) Penilaian terhadap anak, yaitu penilaian positif dan penilaian negatif, (b) nilai-nilai sosial yang diakui dalam kehidupan, dan (c) kemampuan untuk menampilkan perilaku yang didasarkan pada pendapatan atau sumber daya lainnya. Teori ini tidak menyertakan niat pasangan untuk memiliki atau tidak memiliki anak meskipun niat pasangan untuk tidak memiliki anak diasumsikan dapat memengaruhi nilai atau norma kepercayaan individu. Seseorang yang menginginkan untuk memiliki anak lainnya dan hal itu tidak disampaikan kepada pasangannya dapat membentuk atau menciptakan satu kepercayaan baru bahwa pasangan tidak menginginkan memiliki anak lainnya. Persepsi ini dapat memengaruhi penilaian responden terhadap kelahiran yang dimilikinya. Dalam Konferensi Kesehatan Reproduksi Dunia Ajzen 2010 diklarifikasi bahwa hubungan antara persepsi dan perilaku memiliki peran sebagaimana

yang diharapkan hanya ketika perilaku dikhususkan pada empat komponen, yaitu target, aksi, konteks dan waktu. Pada ranah kelahiran, target adalah anak, aksi adalah melahirkan, konteks adalah pasangan, dan waktu dapat berupa jangka pendek yang dapat membuat niat untuk memiliki anak menjadi lebih realistis.

Teori berikutnya, menurut Tessa (2000) adalah perilaku yang tidak direncanakan. Di sini, perilaku merupakan sebuah determinan yang menentukan apakah terjadi kelahiran sebagai langkah terakhir dari sebuah motivasi untuk mencapai tahap-tahap selanjutnya. Dalam memutuskan untuk mencapai atau tidaknya sebuah kehamilan, biasanya perilaku reproduksi melewati beberapa tahap. Pada tahap pertama, perilaku menunjukkan motivasi, rasa, dan pikiran untuk menghargai sebuah kelahiran. Kemudian tahap kedua cenderung memperhatikan tujuan, emosi, atau harapan yang tidak disertai atau tidak mendorong terjadinya tindakan langsung. Tahap ketiga menunjukkan pada niatan, tujuan, dan hasrat yang diikuti dengan niatan dan komitmen untuk melakukan aktivitas yang sama untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Studi mengenai anak pernah dilakukan tahun 1958. Studi yang dikembangkan oleh Leibenstein tersebut didasarkan pada teori fertilitas tentang faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kelahiran yang diinginkan keluarga. Dalam teori tersebut, orang tua diposisikan sebagai produsen yang menghasilkan anak. Selain itu, orang tua juga diposisikan sebagai konsumen, yaitu pihak yang harus membuat perhitungan antara jumlah anak yang akan dilahirkan dengan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan keputusan untuk memiliki anak lagi.

Perhitungan-perhitungan yang terjadi dalam memutuskan untuk memiliki anak lagi atau tidak adalah representasi dari nilai seorang anak. Fawcett (1984) mengungkapkan bahwa ada dua nilai yang melekat pada seorang anak, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Seorang anak dianggap memiliki nilai positif karena memberikan keuntungan emosional, ekonomis, perkembangan dan pengayaan kepribadian, proses identifikasi bersama anak, serta kelanjutan dan keakraban keluarga. Sementara itu, nilai negatif berupa biaya emosional, biaya ekonomis, biaya kesempatan dan keterbatasan, kebutuhan fisik, serta biaya keluarga.

Nilai anak sebagaimana disampaikan Fawcett secara sederhana dapat dimaknai bahwa sesungguhnya penilaian terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis (Ancok, 1986). Kehadiran seorang anak merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara suami-istri dalam rumah tangga, menjadi kebanggaan orang tua, dan anak merupakan generasi penerus. Secara psikologis, ibu rumah tangga merasa tenteram apabila dapat memberikan anak kepada suaminya. Kehadiran anak merupakan pendukung terbentuknya ikatan suami istri dalam rumah tangga.

Menurut Todaro (2000), anak di banyak negara sedang berkembang dipandang sebagai investasi, yaitu sebagai tambahan untuk menggarap lahan dan tumpuan hidup di hari tua. Dengan demikian, penentuan permintaan terhadap anak merupakan bentuk pilihan rasional bagi pasangan. Pilihan menambah jumlah anak diperoleh dengan cara mengorbankan pilihan terhadap barang lain. Jumlah anak yang diinginkan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan keluarga. Di sisi lain, jumlah anak yang diinginkan akan berhubungan secara negatif dengan biaya

pemeliharaan anak dan kuatnya keinginan untuk memiliki barang lain.

Sementara itu, Siregar (2003) menyebut istilah harga neto anak, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kehidupan anak, dan yang termasuk di dalam harga neto adalah sebagai berikut (1) Biaya emosi: ketegangan emosi dalam mendisiplinkan anak, mendidik dan menumbuhkan tingkah laku dan moral yang baik, kekhawatiran terhadap kesehatan, kegaduhan dalam keluarga, serta kerewelan anak. (2) Biaya ekonomi: biaya merawat kesehatan anak dan biaya pendidikan. (3) Biaya oportunitas: keterbatasan untuk bersosialisasi dan kesempatan untuk mengurus diri sendiri, keterbatasan dalam bekerja, tidak punya waktu untuk memperhatikan kebutuhan diri sendiri. (4) Kebutuhan fisik: kegiatan rumah tangga menjadi lebih banyak, merawat anak kehilangan waktu istirahat, keharusan memenuhi kebutuhan pakaian anak. (5) Biaya keluarga: munculnya ketidaksepakatan dalam perawatan anak dan berkurangnya kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada pasangan.

Menurut Mayer (1981), kehadiran anak dalam rumah tangga mempunyai dua penilaian. Pertama, anak adalah pendukung rumah tangga dan kedua, anak adalah beban rumah tangga. Penilaian anak sebagai biaya atau keuntungan tersebut memosisikan anak sebagai komoditas ekonomi layaknya barang yang dapat berfungsi aspek produksi dan jaminan hari tua. Nilai tersebut tidak selalu konstan atau dapat berubah dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh survei mengenai preferensi anak di negara Eropa (OECD) dilakukan secara panel dan telah terselenggara pada pertengahan tahun 2001 dan 2006 menemukan jawaban tentang nilai anak yang berubah-ubah. Hal itu terlihat dari adanya gap antara jumlah anak yang diinginkan, baik oleh laki-laki maupun

perempuan usia 15 tahun dan lebih selama periode tiga tahunan. Gap tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang digunakan di dalam kuesioner, yaitu "berapa jumlah anak ideal dan anak yang diinginkan?". Penggunaan kata ideal atau keinginan anak tersebut merupakan hal sensitif. Ukuran ideal dalam kerangka umum menghasilkan nilai estimasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ideal dalam kerangka personal (pribadi). Karena kata 'general' dan 'personal' tidak diterapkan dalam survei-survei kelahiran, termasuk survei ini, sehingga angka preferensi kelahiran sedikit *overestimate*.

Selain itu, keinginan terhadap anak bukanlah hal yang stabil berdasarkan waktu dan usia. Sebagai contoh di Belanda, Liefbroer (2009) menemukan kebanyakan penduduk cenderung mengurangi jumlah anak yang diinginkan seiring bertambahnya usia. Begitu juga di Australia, Wilkins, *et.al.* (2009) menemukan sekitar 40 persen laki-laki dan 35 persen perempuan umur 18-39 tahun 2001 dilaporkan memberikan jawaban yang berbeda terhadap jumlah anak yang diinginkan pada 2006. Jumlah anak yang diinginkan tahun 2001 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006.

Metode

Penelitian ini merupakan analisis data primer yang bersumber pada hasil wawancara terhadap remaja di empat kabupaten dan kota di DIY. Remaja yang diwawancarai merupakan remaja berusia 17-19 tahun dengan dua pertimbangan pertimbangan berikut. (1) Remaja tersebut merupakan kelompok usia yang mendapat dispensasi untuk menikah. (2) Remaja tersebut merupakan remaja transisi yang secara psikologis lebih labil, rentan terhadap berbagai persoalan termasuk KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan), belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang

kesehatan reproduksi secara memadai seperti remaja usia 20-24 tahun, tetapi lebih baik daripada remaja usia 15-16 tahun.

Lokasi penelitian di setiap kabupaten/kota dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan kondisi geografisnya dan jumlah remaja terbanyak. Sampel dipilih secara acak dengan mendasarkan pada kuota yang telah ditentukan, yaitu 100 remaja di setiap kabupaten/kota. Untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi remaja terhadap anak ideal, studi ini menggunakan analisis deskriptif.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan meliputi karakter demografis (umur, jenis kelamin), latar belakang pendidikan, persepsi tentang jumlah anak ideal, jumlah anak yang diinginkan, persepsi tentang nilai atau manfaat anak. Wawancara dilakukan oleh pewawancara yang sebelumnya telah dilatih dan dibekali pengetahuan mengenai tujuan penelitian, konsep, dan maksud pertanyaan dalam kuesioner.

Pembahasan

Karakteristik Remaja

Karakteristik remaja diuraikan menggunakan data hasil survei di wilayah DI Yogyakarta. Survei dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta, dan Sleman. Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul memiliki kesamaan ciri, yaitu karakter perdesaan, sedangkan Sleman mencirikan wilayah pinggiran dan Yogyakarta mencirikan wilayah perkotaan. Sampel remaja yang diwawancara berimbang untuk setiap kabupaten/kota, yaitu 100 remaja. Komposisi remaja yang berhasil diwawancarai di setiap kabupaten kota disajikan pada Tabel 1.

Jumlah remaja laki-laki yang diwawancarai lebih banyak dibandingkan dengan remaja perempuan, yaitu 57,62 persen banding 42 persen. Pola yang sama juga ditemukan di kabupaten/kota, yaitu jumlah remaja laki-laki yang diwawancara lebih banyak daripada perempuan.

Sebagian remaja yang diwawancarai (56,6 persen) masih berstatus sekolah. Mereka aktif dalam kegiatan belajar-mengajar setiap hari di sekolah. Namun ada juga remaja yang tidak aktif lagi di sekolah dan jumlahnya relatif banyak, yaitu 43,4 persen. Saat ini mereka telah bekerja di berbagai sektor atau lapangan pekerjaan, seperti industri dan bangunan, serta perdagangan dan jasa. Ada kecenderungan remaja laki-laki bekerja di sektor industri dan bangunan, sedangkan remaja perempuan bekerja di sektor perdagangan dan jasa meskipun ada juga sebagian remaja laki-laki yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Spesifikasi ini dapat berhubungan dengan beban pekerjaan. Di sektor industri dan bangunan, beban pekerjaan lebih berat sehingga lebih banyak remaja laki-laki yang terserap di sektor ini. Remaja laki-laki yang bekerja di sektor ini mengaku mengerjakan kegiatan berat, seperti mengangkut pasir/batu atau memotong kayu. Sementara itu, remaja laki-laki yang terserap di sektor perdagangan dan jasa umumnya bekerja sebagai penjual bakso, penjual bakwan kawi, penjual mie ayam, dan sejenisnya. Remaja perempuan yang berstatus bekerja diketahui saat ini bekerja sebagai pramuniaga, pramusaji, *sales promotion girl*, dan lain sebagainya.

Selain bekerja pada sektor-sektor tertentu, ditemukan juga sebagian remaja yang bekerja sebagai wiraswasta, seperti pengrajin bambu dan anyaman serta pembuat aksesoris (gelang, penjepit rambut, bros). Ini menandakan bahwa remaja juga memiliki kemampuan untuk

Tabel 1 Distribusi Sampel Remaja menurut Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Persen		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Sleman	54,00	46,00	100,00 (N=100)
Yogyakarta	58,25	41,74	100,0 (N=100)
Kulon Progo	61,39	38,61	100,00 (N=100)
Gunungkidul	62,38	37,62	100,00 (N=100)
Bantul	52,00	48,00	100,00 (N=100)
Total	57,62	42,38	100,00 (N=500)

Sumber: Data Primer, 2014

menciptakan lapangan pekerjaan walaupun remaja umumnya mengakui bahwa untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan bukanlah hal yang mudah. Peran orang tua, keluarga atau kerabat, teman, dan tetangga cukup besar membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Sekitar 29,6 persen remaja mengaku mendapatkan pekerjaan berdasarkan informasi dari temannya. Di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul, remaja yang mendapatkan pekerjaan berdasarkan informasi dari teman cukup tinggi, masing-masing sebesar 35,1 persen dan 53,3 persen. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa remaja memiliki interaksi yang cukup kuat dengan teman.

Berdasarkan tingkat penghasilan yang diperoleh, sekitar 44,4 persen remaja yang bekerja berpenghasilan kurang dari Rp500.000,00 per bulan, 40,4 persen berpenghasilan antara Rp500.000,00 hingga Rp1 juta per bulan, dan selebihnya berpenghasilan antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Sebagian remaja mengaku penghasilan yang diterima belum sesuai dengan harapan sehingga mereka berkeinginan mendapatkan pekerjaan lainnya.

Dalam kesehariannya remaja melakukan aktivitas rutin yang dapat diidentifikasi berdasarkan status sekolah dan tidak sekolah atau status bekerja dan

tidak bekerja. Remaja yang sekolah memulai aktivitas di pagi hari dengan membantu orang tua membersihkan rumah kemudian berangkat ke sekolah dan belajar di sana hingga siang hari. Sore harinya sebagian remaja membantu orang tua membersihkan rumah dan sebagian ada yang mengisi waktu untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Interaksi tersebut dapat terjadi di lapangan olahraga, di warnet, atau di rumah. Di malam hari remaja menggunakan waktunya untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah serta istirahat malam.

Aktivitas remaja berstatus kerja cenderung stabil, yaitu bekerja di pagi hari hingga sore, kemudian di malam hari mereka menggunakan waktunya untuk bersantai, seperti menonton televisi, bercengkerama dengan keluarga, dan beristirahat malam. Pola tersebut berbeda pada hari Minggu karena mereka menggunakan waktunya untuk kegiatan bebas, termasuk jalan-jalan, mengunjungi rumah saudara atau teman. Untuk menunjang aktivitas keseharian, remaja membutuhkan alat komunikasi berupa telepon genggam. Total remaja yang memiliki telepon genggam berdasarkan hasil penelitian ini adalah 98,2 persen. Mereka menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi, browsing internet, mendengarkan musik, dan aplikasi hiburan (permainan).

Persepsi Remaja tentang Jumlah Anak Ideal dan Anak yang Diinginkan

Anak mempunyai nilai tertentu bagi sebuah ikatan perkawinan sehingga sebuah keluarga rela mengeluarkan berlembar-lembar rupiah untuk mendapatkan anak. Orientasi pemilikan anak pun pada akhirnya sangat bervariasi mulai dari penerus garis keturunan, keharmonisan keluarga, status sosial, nilai ekonomi kehadiran anak, seperti sumber tenaga kerja; jaminan hidup hari tua, hingga persoalan budaya terkait dengan maskawin dan sebagainya. Latar belakang persepsi tentang anak tersebut kemudian menjadi perhatian pemerhati fertilitas untuk mendiskusikan hal tersebut. Leibenstain (1958), Davis dan Blake (1968), Freedman (1982), serta Fawcett (1984) melakukan kajian tentang nilai anak dari berbagai sudut, seperti sosiologi, ekonomi, budaya, dan pemerintahan.

Seorang ekonom menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi jumlah kelahiran yang diinginkan keluarga merupakan fungsi dari beban biaya dan manfaat yang diperoleh atas kehadiran seorang anak. Keputusan mempunyai anak lagi akan muncul ketika biaya yang harus dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai manfaat kehadiran seorang anak. Salah satu manfaat dari kehadiran anak adalah karena anak sebagai pembantu produktif untuk menambah pendapatan keluarga. Keinginan memiliki anak diasumsikan secara positif berhubungan dengan tingkat pendapatan keluarga dan tingkat harga dari waktu yang dihabiskan untuk merawat anak serta menekankan pada tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Untuk itu, anak-anak dapat bernilai positif dan negatif. Nilai positifnya berupa keuntungan emosional, keuntungan dan jaminan ekonomis, perkembangan dan pengayaan kepribadian, proses identifikasi bersama anak, serta kelanjutan dan keakraban

keluarga. Adapun nilai negatif anak berupa biaya emosional, biaya ekonomis, biaya kesempatan dan keterbatasan, kebutuhan fisik, serta biaya keluarga

Anak diibaratkan sebagai titipan Tuhan bagi orang tua. Anak memiliki nilai tertentu dan menuntut dipenuhinya beberapa konsekuensi atas kehadirannya. Latar belakang sosial yang berbeda, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, adat istiadat atau kebudayaan suatu kelompok sosial, serta penghasilan atau mata pencaharian yang berlainan menyebabkan pandangan yang berbeda mengenai anak.

Anak menjadi bahan diskusi yang umum dilakukan oleh orang tua atau kelompok penduduk yang menikah. Namun mendiskusikan materi yang sama menjadi barang asing bagi remaja meskipun mereka telah memasuki fase remaja transisi atau berumur 17-19 tahun. Keadaan inilah yang menjadikan kajian ini semakin menarik mengingat remaja adalah penentu fertilitas masa depan, tetapi pada sisi yang lain keterbukaan media informasi dan teknologi telah membawa berbagai arus informasi mengalir tanpa ada filter yang jelas dan tegas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang diinginkan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata jumlah anak ideal. Kondisi tersebut mengikuti pola umum di beberapa negara menurut Survei Demografi dan Kesehatan yang ditanyakan kepada penduduk dengan status menikah atau pernah menikah.

Anak ideal bagi remaja merupakan 'barang asing' yang tidak pernah diperhatikan, tetapi setiap saat fenomena anak ada di depan mata. Hal ini berarti serba-serbi kehidupan keluarga terkait dengan keberadaan anak disaksikan setiap saat. Berikut ini ungkapan dari seorang remaja terkait dengan pernikahan usia dini karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Tabel 2 Rata-Rata Jumlah Anak Ideal dan Jumlah Anak yang Diinginkan menurut Remaja di Kabupaten /Kota di DIY

Kabupaten	Rata-Rata Jumlah Anak Ideal	Rata-Rata Jumlah anak yang diinginkan
Bantul	2,05	1,99
Gunungkidul	2,25	2,12
Kota Yogyakarta	2,25	2,16
Kulon Progo	2,18	2,18
Sleman	2,10	2,10
DIY	2,17	2,11

Sumber: Data Primer, 2014

“Teman-teman perempuan saya, beberapa sudah menikah dan punya anak satu. Suaminya ya dari sekitar sini saja, paling beda desa. Ya ... tidak apa-apa kan? (kalimat penekan untuk meyakinkan bahwa kondisi ini bukan suatu kesalahan). Pernikahan dini yang dilakukan bisa karena hamil duluan, tapi ada juga yang memang diinginkan oleh mereka, bukan dipaksa orang tua, meskipun kasus pemaksaan juga masih ada”.

Ungkapan di atas menunjukkan remaja belum memahami akibat pernikahan dini, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Fenomena pernikahan dini dianggap sebagai suatu kewajaran, utamanya bagi remaja perdesaan yang selama ini banyak mengetahui terjadinya kasus pernikahan dini. Sementara itu, remaja perkotaan semakin tidak pernah mendiskusikan rencana memiliki anak dalam kehidupannya karena kesibukan kegiatan akademis maupun hal-hal lain yang terkait dengan sekolah, seperti kursus dan pelatihan. Berikut ini ungkapan salah satu remaja dari Kabupaten Sleman.

“Maaf, jangankan jumlah anak, rencana menikah saja belum terpikirkan, saya cuma pengen sekolah dan terus sekolah ... yah pemerintah kan, sudah program jumlah anak dalam keluarga dua orang

dan memang sih jumlah tersebut pas kan, ada laki-laki dan perempuan, masing-masing satu. Banci tidak usah lha ya ... pacar ya punya (sedikit malu-malu) ... kan masih sekolah, senang-senang dulu main dengan teman-teman, pergi ke sana kemari”.

Diskusi remaja terbatas pada perkenalan, pertemanan, dan pacaran. Kondisi inilah yang justru menjadi tantangan demografi mengingat fenomena pergaulan bebas dan pernikahan dini berkembang subur di sekelilingnya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun pada sisi yang berbeda, remaja belum merasa membutuhkan diskusi tentang besaran keluarga. Hal yang dikhawatirkan adalah remaja tidak memiliki kemampuan melakukan perencanaan, termasuk remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah. Kehidupan mengalir seperti air, bahkan dalam menentukan pasangan hidup pun sangat mudah. Harapan terhadap kehidupan masa depan sangat sederhana. Kondisi ini tentu saja tidak dapat dibiarkan. Remaja harus memiliki pandangan ke depan yang jauh lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menuntut suatu kondisi tertentu yang harus dipersiapkan sebelumnya. Generasi Berencana menjadi salah satu program yang sangat strategis untuk memotivasi remaja keluar dari kehidupan masa lalu yang kurang mendukung, seperti keluarga yang

kurang membekali pengetahuan kesehatan reproduksi kepada remaja.

Berikut ini adalah optimisme remaja dalam menatap masa depan meskipun berangkat dari keluarga pertanian yang notabene mendapat perhatian yang kurang dari orang tua terhadap tumbuh kembang mereka.

“Cita-cita saya pengen kuliah, tapi jika orang tua tidak mampu membiayai ya bagaimana lagi. Saya akan menikah ketika sudah mampu lahir batin dan bisa membahagiakan orang tua. Saya tidak pengen seperti kakak saya yang membebani orang tua meskipun sudah menikah. Saya memiliki ketrampilan menggambar sehingga saat ini pun saya bersama teman-teman telah mengembangkan usaha sablon, tapi ... karena kami masih sekolah, usaha ini hanya dilakukan ketika libur saja. Jika nanti sudah lulus, saya akan fokus di sini. Pemasaran saya lewat online”.

Hal-hal senada lebih banyak diungkapkan oleh remaja dari perkotaan. Lingkungan sosial dan kompetisi hidup dimungkinkan menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan hal ini. Meskipun ada perbedaan dalam pola perilaku dan kegiatan remaja di perkotaan dan perdesaan, dalam hal persepsi tentang jumlah anak ideal dan anak yang diinginkan tampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara remaja di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anak ideal menurut remaja di perkotaan sebesar 2,11 dan rata-rata jumlah anak ideal menurut remaja perdesaan sebesar 2,17. Pengetahuan remaja tentang jumlah anak ideal dua sebagai program pemerintah telah dipahami dengan baik. Sebagian besar dari remaja pun menginginkan jumlah anak dua untuk kehidupannya kelak, bahkan rata-rata

jumlah anak yang diinginkan di Kabupaten Bantul di bawah dua. Angka 2 merupakan titik yang sangat ideal karena memperhatikan beban ekonomi rumah tangga, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga, pengawasan orang tua, dan aspek psikologis anak.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa remaja pada umumnya memahami slogan Keluarga Berencana: dua anak lebih baik atau dua anak cukup. Poster, spanduk, dan simbol-simbol tentang keluarga kecil tersosialisasi melalui kantor-kantor pemerintah, seperti BKKBN, puskesmas, serta kantor-kantor kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Kantor-kantor ini cukup strategis untuk sosialisasi pesan keluarga berencana karena tingginya frekuensi kunjungan masyarakat.

“Kami tahu tentang Keluarga Berencana dari spanduk-spanduk yang dibentangkan di kantor-kantor pemerintah, yang gambarnya begini kan (sambil menunjukkan telapak tangannya)? Kantor dusun dan kampung juga ada pertemuan terkait dengan pernikahan dini. Kalau menurut saya, mereka menikah karena tidak punya kesibukan, mereka kan, sudah tidak sekolah, temannya penjual-penjual itu, sehingga pilih cari uang daripada mengeluarkan uang untuk sekolah, dan biasanya mereka tidak pintar”.

Informasi tentang Keluarga Berencana juga diperoleh remaja melalui televisi. Beberapa pesan singkat yang ditayangkan oleh beberapa televisi swasta cukup efektif mengedukasi remaja terkait dengan persepsi jumlah anak ideal. Beberapa remaja pada umumnya pernah menyaksikan pesan Keluarga Berencana dari televisi.

Remaja tidak mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang besar keluarga dari keluarga. Hal ini menunjukkan komunikasi orang tua terkait dengan persoalan anak,

kesehatan reproduksi, dan keluarga tidak berjalan dengan baik. Orang tua beranggapan anak-anak masih belum pantas menerima informasi tentang anak atau orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembang anak dalam setiap fase pertumbuhannya. Kondisi inilah yang menjadi dasar utama remaja mencari informasi yang dibutuhkan pada teman sebaya yang memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda. Berikut merupakan salah satu contoh perlawanan yang dilakukan remaja agar dapat diterima dalam kelompok teman sebaya.

Pengorbanan Remaja untuk Kelompoknya

R adalah remaja berprestasi secara akademik. Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikan formal anak. Disiplin merupakan kata kunci yang dipahami R sejak kecil hingga saat ini. R tidak memiliki keberanian melanggar aturan orang tua, misalnya untuk menonton televisi setelah pukul 19.00 WIB. Namun sejak R memiliki grup media sosial yang berasal dari teman-teman sekolahnya, R berani mencuri-curi waktu menonton televisi untuk melihat tayangan sinetron yang menjadi tontonan wajib semua anggota kelompok ketika orang tua sedang tidak di rumah. R menggunakan instagram untuk mengikuti jalan cerita sinetron tersebut agar tidak mendapatkan hukuman orang tuanya (sumber wawancara mendalam, 2014).

Cerita pada kotak mengilustrasikan besarnya pengaruh teman sebaya dalam tumbuh kembang remaja. Kondisi inilah yang dimaksudkan peneliti bahwa remaja mulai mengganti nilai-nilai keluarga yang ditanamkannya selama ini dengan nilai-nilai baru dari teman sebaya. Selektif mencari teman sebaya menjadi kata kunci penting agar remaja tidak salah arah dalam pergaulannya.

Pengalaman menjadi variabel penting dalam mendiskusikan persoalan jumlah anak. Remaja yang berasal dari keluarga

besar cenderung berkeinginan memiliki jumlah anak yang besar pula dan remaja dari keluarga kecil memiliki kecenderungan menginginkan jumlah anak yang sedikit pula. Teladan dari keluarga dan lingkungan menjadi hal penting untuk memengaruhi persepsi seseorang. Interaksi sosial serta fungsi pancaindera mata dan telinga menjadi titik penting dalam memengaruhi jumlah anak. Remaja dengan frekuensi melihat dan mendengar tentang keluarga kecil yang lebih banyak akan memiliki persepsi keluarga kecil yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi adalah pengetahuan, pengalaman, dan harapan. Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya sebatas pendidikan formal, tetapi juga meliputi pendidikan informal. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan formal tidak berpengaruh terhadap persepsi remaja tentang jumlah anak ideal. Rata-rata jumlah anak ideal yang dipersepsikan remaja dengan pendidikan rendah dan tinggi sama, yaitu 2,1 jiwa. Sementara itu, pengalaman dan harapan memiliki pengaruh yang signifikan. Remaja yang memiliki persepsi jumlah anak ideal kecil cenderung memiliki persepsi jumlah anak yang diinginkan pun kecil. Namun terdapat pula remaja yang memiliki persepsi jumlah anak ideal kecil dan menginginkan jumlah anak yang lebih besar daripada nilai rata-rata jumlah anak idealnya. Berikut ini adalah salah satu pernyataan dari seorang remaja terkait dengan perbedaan persepsi jumlah anak ideal dengan jumlah anak yang diinginkan. Remaja ini setelah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan pertama kemudian melanjutkan pendidikannya salah satu pondok pesantren besar di Kediri. Remaja ini memiliki pemikiran yang sangat berkembang terkait dengan perencanaan keluarga. Berikut ini adalah pernyataannya.

“Saya tahu pemerintah memiliki program tentang keluarga kecil, yaitu anak yang dimiliki setiap keluarga disarankan dua orang untuk mendapatkan keluarga yang sejahtera. Menurut saya, kesejahteraan keluarga tidak ditentukan oleh jumlah anak yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh tanggung jawab orang tua. Anak adalah titipan dari Allah sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin anak. Jika orang tua tidak mampu memenuhinya, berarti masuk kategori tidak bisa menerima amanah. Insya Allah saya akan berusaha menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk membesarkan empat orang anak yang saya inginkan. Namun itu baru keinginan, jika kemudian ternyata kehidupan ekonomi saya tidak seperti yang saya rencanakan, ya semuanya bisa berubah”.

Ungkapan tersebut senada dengan ungkapan salah satu remaja dari perkotaan dengan pendidikan SMK.

“Jumlah anak ideal menurut pemerintah itu memang dua, namun kenyataannya kehidupan kami sekeluarga dengan dua bersaudara juga tidak sejahtera. Jika orang tua memiliki pekerjaan atau pendapatan yang memadai mesti sejahtera sekalipun jumlah anaknya lebih dari dua. Sebaliknya, meskipun anaknya satu, tetapi jika tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ya tetap sengsara. Jadi menurut saya, permasalahan ada pada kesempatan kerja. Di sini ini, anak-anak berpendidikan SMA, tetapi pekerjaannya paling pelayan toko, kalau tidak pergi ke Jakarta. Kan bisa ditebak berapa gajinya, punya anak satu saja sudah Senin-Kamis”.

Persepsi Remaja tentang Nilai Anak

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, anak bukan merupakan tema yang bagus untuk

didiskusikan dengan remaja. Namun dengan pendekatan kualitatif, peneliti mampu mengidentifikasi persepsi remaja tentang anak. Berikut ini akan dibahas persepsi remaja tentang manfaat anak.

Menurut remaja, anak dalam sebuah keluarga berfungsi sebagai pewaris keturunan. Orang tua akan resah dan tidak nyaman ketika belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya. Sebanyak 36 persen remaja di Yogyakarta menyatakan bahwa anak adalah penerus keturunan. Pola yang sama juga terjadi pada remaja menurut tempat tinggalnya ataupun tidak ada perbedaan persepsi manfaat anak menurut daerah penelitian.

Anak berfungsi membantu ekonomi rumah tangga. Tiap kelahiran seorang anak telah besaran rezekinya telah digariskan. Hal itu diungkapkan dalam kalimat yang sering diucapkan oleh beberapa remaja ketika wawancara mendalam: anak membawa rezeki tersendiri. Kehadiran anak, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki keberuntungan yang berbeda-beda dan tidak dapat dipertukarkan. Terdapat tiga hal yang oleh ditentukan Tuhan bersamaan dengan kelahiran seorang bayi, yaitu, umur, jodoh, dan rezekinya. Berdasarkan kepercayaan inilah, beberapa remaja merasa optimis dengan memiliki jumlah anak melebihi dari yang diprogramkan, mereka tetap akan mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan. Rezeki yang telah melekat dalam takdir seseorang inilah yang menyebabkan beberapa orang remaja berani memutuskan jumlah anak yang dimiliki melebihi jumlah ideal yang ditentukan pemerintah.

Anak mampu mengubah suasana keluarga. Kehadiran seorang anak telah membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Suasana rumah menjadi lebih hangat, harmonis, dan ramai. Kondisi ini

Label 3 Manfaat Anak menurut Remaja

Manfaat Anak	Bantul	Gunungkidul	Yogyakarta	Kulon Progo	Sleman	DIY
Membantu Orang Tua	55,56	37,62	17,48	37,62	24,00	34,46
Kebahagiaan keluarga	5,05	27,72	27,18	18,81	34,00	22,57
Penerus keturunan	31,31	26,73	53,40	31,68	38,00	36,24
Jaminan hari tua	8,08	7,92	1,94	11,88	4,00	6,73
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Data Primer, 2014

juga menjadi pertimbangan remaja ketika ditanyakan manfaat memiliki anak. Namun ada pula remaja yang menyatakan pada suatu titik tertentu kehadiran seorang anak justru membawa konflik keluarga, seperti ketika anak tumbuh remaja atau dewasa melakukan pelanggaran norma-norma yang ada.

Manfaat lain terkait dengan kehadiran seorang anak adalah sebagai teman di hari tua sebagaimana diungkap oleh 6,73 persen responden remaja di DIY. Dalam usia tua ketergantungan seseorang terhadap orang lain sangat besar. Dalam hal ini, anak dapat dijadikan sebagai tempat bergantung atau pelindung ketika memasuki masa tua. Beberapa remaja, bahkan tidak sepakat dengan adanya panti wreda untuk penduduk lanjut usia. Merawat lansia menjadi kewajiban dan balas budi anak atas apa yang telah dilakukan orang tua untuk merawat, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya. Fungsi perawatan ini paling sesuai jika dilakukan oleh remaja perempuan.

Jumlah anak ideal sama dengan dua yang disampaikan remaja dengan syarat jenis kelamin anak lengkap, yaitu laki-laki dan perempuan, karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam perawatan dan pengasuhan penduduk tua/lanjut usia. Anak laki-laki memiliki kewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga secara layak dan pelindung keluarga. Sementara itu, anak perempuan memiliki

fungsi yang lain, yaitu merawat orang tua, membersihkan rumah ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik.

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa alasan utama remaja menentukan jumlah anak dua dalam suatu keluarga adalah karena pertimbangan program pemerintah di bawah kendali BKKBN. Kondisi ini membawa angin segar atas fenomena akses informasi yang dilakukan remaja. Sosialisasi program pemerintah keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera harus terus dilakukan sehingga pancaindera anak akan terus berinteraksi dengan simbol-simbol pesan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selain itu, sosialisasi juga dapat diperlebar melalui media sosial sehingga ketika remaja membuka *Whatsapp*, *Line*, atau media sosial lainnya, mereka akan langsung berhubungan dengan pesan dua anak lebih baik.

Ekonomi menjadi alasan penting kedua yang diungkapkan oleh remaja dalam menentukan jumlah anak ideal dalam keluarga sebanyak dua orang. Beban ekonomi keluarga serta ketidakmampuan merawat dan membesarkan anak secara baik menjadi dasar pertimbangan bahwa nilai angka dua merupakan nilai yang paling tepat. Berikut ini adalah salah satu ungkapan dari remaja terkait dengan hal tersebut.

“Orang tua ketika ditanya apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk kehidupan anaknya adalah membesarkan,

menyekolahkan, memberikan yang terbaik yang orang tua miliki. Mereka minta kita belajar, tetapi mereka tidak pernah menemani kita belajar. Mereka menghendaki kehidupan anaknya lebih baik, tetapi mereka tidak memfasilitasi lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut misalnya sekolah, gizi, dan lainnya ... Saya tidak ingin besuk kalau menikah belum siap mengurus istri dan anak. Syaratnya orang menikah mestinya punya pekerjaan, punya rumah atau punya uang untuk kontrak rumah, bisa membahagiakan keluarga ... Menurut saya, memang dua paling sesuai untuk semua faktor, biaya, kebahagiaan, repot, pengawasan, pendidikan, kesehatan dan banyak aspek kehidupan.”

mengaksesnya dengan mudah. Namun pengalaman struktur keluarga sewaktu kecil, yaitu jumlah saudara kandung yang dimiliki, tetap akan berpengaruh terhadap persepsi remaja tentang anak ideal dan anak yang diinginkan.

Persepsi remaja terhadap jumlah anak ideal merupakan gambaran keinginan anak yang diinginkan di masa depan. Informasi mengenai jumlah dan nilai anak, seperti manfaat anak dan alasan memiliki anak, diperoleh dari sekolah, terutama pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Dengan pemberian materi-materi tentang nilai dan manfaat anak, remaja memperoleh informasi yang tepat dan dapat mendiskusikannya dengan guru, orang tua, atau teman. Meskipun dalam analisis di

Tabel 4 Alasan Menentukan Jumlah Anak “Dua” menurut Remaja

Pertimbangan menentukan jumlah anak	Bantul	Gunungkidul	Kota	Kulon Progo	Sleman	Yogyakarta
Program pemerintah	44,44	22,77	46,60	48,51	55,00	43,37
Ekonomi	22,22	51,49	33,98	34,65	21,00	32,87
Pengasuhan	28,28	11,88	11,65	12,87	17,00	16,24
Lainnya	5,05	13,86	7,77	3,96	7,00	7,52

Sumber: Data Primer, 2014

Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Persepsi Jumlah Anak Ideal

Persepsi remaja tentang jumlah anak ideal atau jumlah anak yang diinginkan tidak terlepas dari aspek status sosial ekonomi (pendidikan dan status ekonomi keluarga). Hal tersebut didukung oleh perkembangan teknologi yang memudahkan remaja mengakses sumber informasi tentang nilai keluarga kecil. Banyak remaja yang telah memahami konsekuensi dari jumlah anak yang dimiliki sehingga mereka memilih anak ideal satu hingga dua. Kebanyakan informasi mengenai nilai anak diperoleh remaja dari berbagai media informasi. Mereka dapat

bagian atas dijelaskan tidak ada hubungan signifikan antara pendidikan dan persepsi remaja tentang jumlah anak ideal ataupun yang diinginkan, interaksi yang terjadi di dalamnya menjadi penting karena merupakan sumber informasi tentang keluarga kecil atau jumlah anak ideal bagi remaja. Selain itu, juga dapat melatih keterampilan remaja dalam membuat keputusan terkait jumlah anak. Keterampilan tersebut akan semakin baik seiring dengan pemahaman tentang nilai dan manfaat anak yang semakin baik pula. Dalam kajian ini ditemukan bahwa remaja laki-laki mempersepsikan jumlah anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja perempuan.

Persepsi remaja terhadap jumlah anak ideal berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga. Dalam hal ini, dapat digambarkan bahwa keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai keluarga kecil yang memadai. Tingkat ekonomi yang baik memungkinkan keluarga dari kelompok ini dapat mengakses informasi lebih luas. Pengetahuan dan pemahaman itu menjadi modal dasar bagi keluarga atau orang tua untuk melakukan diskusi secara intensif mengenai perencanaan keluarga kecil melalui media nonformal, seperti diskusi dalam acara keluarga, diskusi di sela-sela makan malam atau diskusi di sela-sela waktu belajar di rumah. Diskusi mengenai hal ini secara tidak langsung dapat membangun persepsi positif remaja terhadap keluarga kecil. Kegagalan dalam proses edukasi di tingkat keluarga ini berisiko terhadap peningkatan fertilitas. Sebagai contoh adalah kehamilan yang tidak dikehendaki pada remaja dan adanya dispensasi menikah dari KUA yang dapat mempertinggi fertilitas remaja. Kehamilan ini terjadi tanpa didasari perencanaan matang sehingga sering menimbulkan persoalan-persoalan dari sisi demografi dan kesehatan reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pemahaman remaja terkait nilai-nilai keluarga kecil yang masih kurang. Kajian ini menemukan hanya tiga persen remaja yang berdiskusi dengan orang tua untuk membahas nilai-nilai keluarga kecil.

Persepsi remaja terhadap jumlah anak ideal dan anak yang diinginkan berkaitan dengan partisipasi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa remaja yang bekerja memiliki persepsi jumlah anak ideal lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja (dengan perbandingan 2,2 banding 2,15). Peningkatan partisipasi bekerja merupakan sebuah nilai yang menguntungkan untuk memperpanjang usia kawin pertama.

Berdasarkan sumber data yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi jumlah anak ideal menurut remaja. Remaja di perkotaan cenderung memiliki persepsi jumlah anak yang rendah karena pada umumnya mereka masih memfokuskan pada pendidikan atau sekolah. Sementara itu, pada remaja di perdesaan dalam usia 17-19 tahun, pacaran dan mencari pasangan hidup telah dikibarkan bersamaan dengan kehidupan sekolah.

“Kalau sore hari di lapangan ini ramai sekali. Masyarakat berkumpul di lapangan untuk berolahraga voli dan sepak bola. Beberapa cewek melihat pertandingan sambil cari-cari pacar atau kenalan. Kadang olahraganya antardusun atau kampung”.

Perbedaan perilaku remaja di perkotaan dan perdesaan juga menjadi variabel penting dalam menjelaskan kondisi tersebut. Contohnya adalah pemanfaatan telepon genggam. Remaja-remaja di perkotaan memanfaatkan telepon genggam secara beragam, mulai dari mengirim pesan singkat, bertelepon, *Whatsapp*, *BBM*, *Line*, dan *Facebook*. Beberapa remaja di perkotaan menggunakan grup di *Whatsapp* untuk mengembangkan sayap bisnis *online*-nya, seperti menjual telepon genggam, makanan, kaos, dan jasa rental. Sementara itu, pemanfaatan facebook bagi remaja di perdesaan hanyalah sebatas pertemanan serta penelusuran *Youtube* untuk akses musik dan olahraga.

Jumlah saudara menjadi variabel penting yang memengaruhi persepsi jumlah anak ideal dalam keluarga. Jumlah saudara kandung merupakan pengalaman langsung yang dirasakan remaja. Jumlah saudara kandung memiliki pengaruh positif, artinya jumlah saudara kandung yang banyak akan

memengaruhi persepsi jumlah anak yang banyak pula. Hal ini dapat dipahami jika keramaian, kebahagiaan, dan kehangatan keluarga menjadi pertimbangan utama.

Dua variabel lain yang tidak berpengaruh terhadap persepsi jumlah anak ideal adalah pendidikan dan tenaga kerja. Tidak ada perbedaan persepsi jumlah anak antara yang berpendidikan tinggi dan remaja yang tidak berpendidikan. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan pemanfaatan media komunikasi yang telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Sekitar 95 persen remaja telah memiliki telepon genggam dan lebih dari 80 persen remaja telah memiliki akun media sosial.

Telepon genggam sebagai alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk komunikasi via pesan singkat dan telepon saja, tetapi juga dapat difungsikan untuk bermain-main yang menggunakan fasilitas internet. Pola pergaulan dan wawasan remaja dengan alat ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan ruang fisiknya. Hal ini menunjukkan remaja bukan merupakan penduduk yang buta informasi dan teknologi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menjadi kurang logis jika pada akhirnya remaja tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar dan jelas terkait dengan perencanaan keluarga. Pemerintah perlu membuat terobosan inovatif jalur sosialisasi Generasi Berencana lewat media sosial.

Status pekerjaan menurut data yang ada juga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan jumlah anak ideal menurut remaja. Remaja yang bekerja ataupun yang sedang bersekolah memiliki pengetahuan yang sama tentang Generasi Berencana. Kepada remaja harus selalu ditanamkan pemikiran perencanaan keluarga dalam setiap langkah kehidupan keluarganya. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan bukti nyata

bahwa remaja tidak memiliki perencanaan yang memadai untuk hidupnya.

Kesimpulan

Remaja memiliki pemahaman yang baik tentang nilai keluarga kecil atau jumlah anak ideal sebagai suatu program pemerintah. Sebagian kecil remaja mampu menerjemahkan program dua anak cukup yang dikaitkan dengan tekanan demografi, tetapi sebagian besar remaja yang lain masih memandangnya sebagai suatu program pemerintah yang harus diikuti. Rata-rata jumlah anak yang diinginkan oleh mereka lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata jumlah anak ideal dalam keluarga meskipun nilai rata-ratanya masih di atas dua.

Remaja fase akhir lebih memilih nilai-nilai dari teman sebaya dibandingkan dengan nilai-nilai keluarga yang telah tertanam sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi Generasi Berencana melalui teman sebaya akan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (internet) perlu dioptimalkan untuk mendukung kegiatan ini di samping pemanfaatan ruang-ruang publik yang selalu diakses remaja, seperti lapangan (alun-alun), tempat-tempat wisata, dan sekolah.

Daftar Pustaka

- Arindita, S.I. 2003. *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*. Surakarta: Fakultas Psikologi.
- Biglan, C. Dent. 2004. "Relation between Access to Tobacco and Adolescent Smoking". *Research paper*.
- BPS. 2008. *Indonesian Demographic and Health Survey 2007*. Calverton: BPS and Macro International.

- BPS. 2010. *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *Indonesian Demographic and Health Survey 2012*. Calverton: BPS and Macro International.
- European Commission. 2006. *Childbearing Preference and Family Issues in Europe*.
- Fawcett, James T. 1984. *Psikologi dan Kependudukan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Hoffman, L. W. and Hoffman, M.L. 1973. "The Value of Children to Parents". Fawcett. *Psychological perspectives on population* (pp. 19-76). New York: Basic Books.
- Kagitcibasi. 1982. *The Changing Value of Children in Turkey*. Honolulu: East West Population Center.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Kotler, Philip. 2003. *Marketing Manajemen: Analysis, Planning, Implementation and Control 9th Edition*. New Jersey.
- Rosyadi, I. 2001. "Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan melalui *Capabilities-based Competition*: Memikirkan Kembali tentang Persaingan berbasis Kemampuan". *Jurnal Benefi*. Volume 5 Nomor 1. Surakarta: Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta.
- Singarimbun, Masri. 1985. *Kependudukan: Liku-liku dalam Penurunan Kelahiran*. Yogyakarta: LP3ES bekerja sama dengan Lembaga Kependudukan UGM.
- Testa, Maria Rita, et.al. 2000. "The Decision of Whether to Have a Child: Does Couple Disagreement Matter?". *Working Paper*. Vienna Institute of Demography.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diakses dari www.lbh-apik.or.id.
- USAID. 2010. *Desired Number of Children 2000-2008*. USAID.
- UNFPA. 2005. *UNFPA Annual Report*, diakses dari <http://unfpa.org/sites/default>.
- Walgito, Bimo. 1993. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

STRATEGI RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN KELUAR DARI KEMISKINAN: KASUS TIGA DESA DI KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agus Joko Pitoyo¹ dan Muhammad Arif Fahrudin Alfana²

¹Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, ²Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi: Agus Joko Pitoyo (*e-mail*: jokokutik@yahoo.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan strategi masyarakat perdesaan di tiga desa dengan kondisi geografis yang berbeda untuk keluar dari kemiskinan. Terpilihnya tiga desa itu karena jumlah penduduk miskinnya secara absolut dan relatif tinggi. Perbedaan itu menarik untuk diteliti karena ada variasi strategi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara pada 323 rumah tangga yang tergolong miskin. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada variasi strategi rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Rumah tangga miskin di tiga desa menerapkan beberapa strategi. Namun diversifikasi sumber-sumber pendapatan merupakan strategi yang paling banyak dipilih oleh penduduk miskin. Usaha diversifikasi yang dilakukan adalah mengusahakan ternak sapi dan menambah jumlah pohon kakao. Perbedaan pemilihan strategi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis di setiap desa

Kata kunci: kemiskinan, strategi kelangsungan hidup, perdesaan

STRATEGIES OF RURAL POOR HOUSEHOLDS TO ERADICATE POVERTY: CASE OF THREE VILLAGES IN KULON PROGO, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Abstract

The purpose of this study is to describe the strategy of rural community out of poverty. The study was done in three villages with different geographical conditions whose high number of poor people. It is important to distinguish village based on the variations of geographical conditions which is referring to different strategies out of poverty. Operationally, the survey has been implemented by interviewing 323 poor households. Data was analyzed using descriptive analysis. The results showed there are variations in household strategies for coping with poverty. Poor households in three villages implemented more than one strategy. However, diversification of income sources is a strategy most preferred by the poor. Diversified business are to commercialize cattle and to increase the number of cocoa trees. The difference geographical condition comes to difference strategy.

Keywords: poverty, survival strategy, rural area

Pendahuluan

Pada 2012 jumlah desa yang tergolong miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 260.830 desa (BPS, 2015). Dari 260.830 desa itu, terdapat variasi kondisi geografis. Di desa yang terletak di dataran tinggi, seperti Kulon Progo dan Gunungkidul, jumlah desa miskinnya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa yang di daerah dataran, seperti Bantul dan Kota Yogyakarta. Perbedaan jumlah desa miskin itu disebabkan oleh ada perbedaan strategi penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Variasi strategi bagaimana penduduk keluar dari kemiskinan menarik untuk diteliti karena informasi tentang hal ini masih terbatas.

Tingginya kemiskinan di perdesaan menjadi salah satu permasalahan di negara berkembang.¹ Di Indonesia kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 15,72 persen, jauh lebih tinggi daripada kemiskinan di perkotaan yang tercatat sebesar 9,23 persen (Bappenas, 2012). Menurut Tukiran (2010), tingginya kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya di perdesaan untuk mengelola pembangunan. Selain itu, tingginya kemiskinan di perdesaan juga karena program pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kondisi riil secara mikro dan menyeluruh di daerah perdesaan. Menurut Tukiran (2010), dua hal inilah yang menyebabkan kemiskinan di perdesaan selalu menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai.

Berbagai program telah dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan di perdesaan. Terlebih sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program pengentasan

kemiskinan senantiasa menjadi prioritas pembangunan (Manning dan Miranti, 2015). Berdasarkan laporan TNP2K (2010), tercatat saat ini beberapa program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Program itu, antara lain, adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program kebijakan tersebut biasanya bersifat *top down* dengan pembuat keputusan sebagai aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Dengan kata lain, program kebijakan yang berasal dari inisiatif lokal dengan kebijakan yang bersifat *bottom up* belum banyak ditempuh.

Penduduk miskin sebenarnya memiliki berbagai cara agar keluar dari kemiskinannya (Bird dan Shinyekwa, 2004; Alfana, 2014; Marianti, 2014). Cara yang dilakukan oleh penduduk miskin juga berbeda dan beragam sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggalnya (Baiquni, 2006; Bank Dunia, 2007; Sesabo, 2007; Sutanto, 2008). Dengan keberagaman kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki, penduduk miskin memiliki inisiatif lokal untuk mempertahankan hidupnya dan berusaha keluar dari kemiskinan yang dihadapi (Maloney, 2003; Moyo, 2007; Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009; Akram-Lodhi, Borras, Jr. dan Kay, 2007).

Tulisan ini berusaha memahami inisiatif lokal² dari penduduk miskin perdesaan dalam menerapkan berbagai strategi untuk keluar dari kemiskinannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan

¹ Permasalahan kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh terbatasnya akses ekonomi dan sumber daya yang menyebabkan rendahnya pendapatan (Ellis, 1998; Dalal-Cyaton, *et al.*, 2003; Ellis dan Freeman, 2004; Borras, Jr., Kay dan Akram-Lodhi, 2007; Brandt dan Otzen, 2007).

² Inisiatif lokal merupakan beragam strategi, pengetahuan atau petunjuk yang dipakai oleh manusia dengan ciri sederhana, ekonomis, mudah diaplikasikan dan spesifik, serta dapat digunakan untuk menghadapi dan mengadaptasi lingkungan tempatnya tinggal (ILO, 2003; TIM BPTP NTB, 2005; Arief dan Agusanty, 2007).

strategi masyarakat perdesaan di tiga desa yang memiliki kondisi geografis berbeda untuk keluar dari kemiskinan. Perbedaan kondisi geografis tersebut dibedakan menjadi daerah dataran yang diwakili oleh Desa Banjararum, daerah peralihan dataran dan perbukitan yang diwakili Desa Banjarsari, serta daerah perbukitan yang tinggi diwakili oleh Desa Pagerharjo.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga desa: Desa Pagerharjo dan Desa Banjarsari di Kecamatan Samigaluh serta Desa Banjararum di Kecamatan Kalibawang (Gambar 1). Desa-desanya ini dipilih karena banyaknya rumah tangga miskin dengan kegiatan pertanian sebagai basis perekonomiannya (BPS, 2011). Desa Banjararum merupakan daerah yang terletak antara 62,5-600 meter di atas permukaan laut. Desa Banjararum terletak pada lokasi hamparan dengan kemiringan lerengnya yang sedang, yaitu antara 2-25°. Desa Banjararum dilewati oleh sungai-sungai yang mendukung pertanian yang diusahakan penduduknya. Sementara itu, Desa Banjarsari memiliki ketinggian 300-800 meter di atas permukaan laut, sedangkan Desa Pagerharjo memiliki ketinggian antara 300-1200 meter di atas permukaan laut. Desa Banjarsari dan Pagerharjo terletak lebih ke timur yang merupakan lereng Pegunungan Menoreh, tetapi keduanya tidak memiliki kemiringan lereng yang tidak terlalu ekstrem, yaitu sekitar 15-25°.

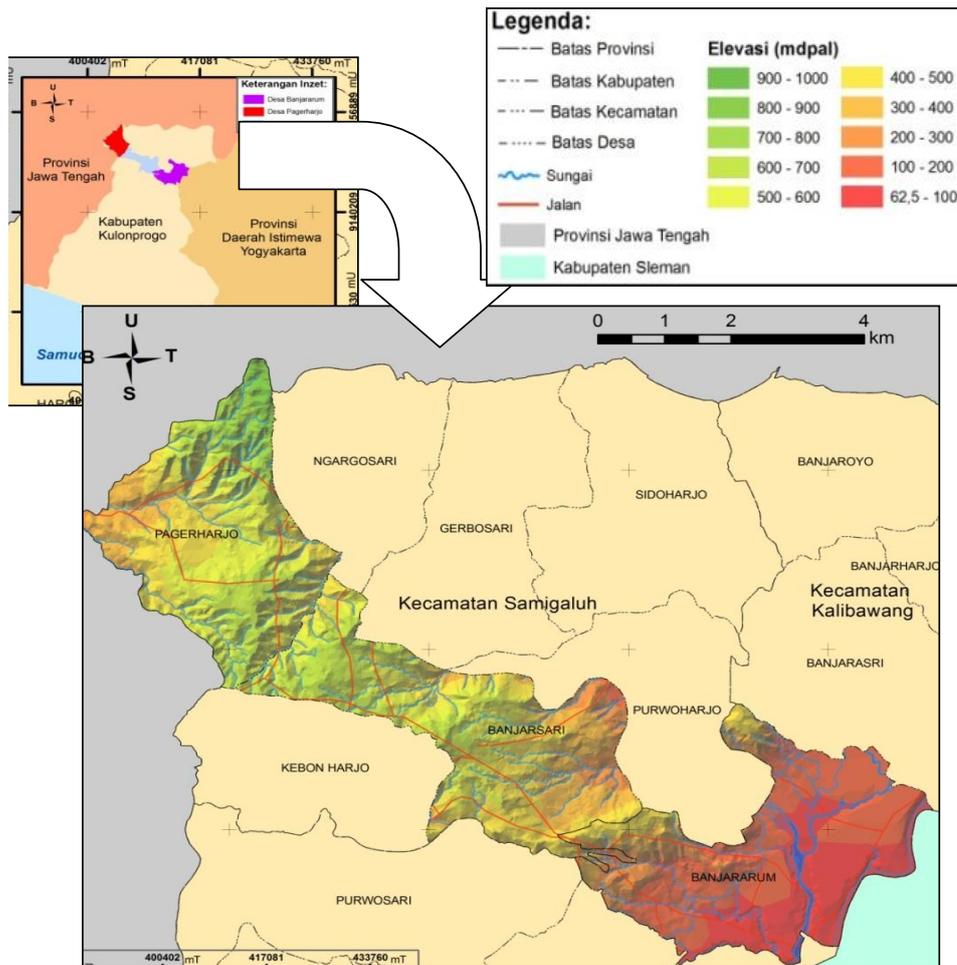
Desa Pagerharjo merupakan desa pertanian yang mengandalkan kegiatan

perkebunan kakao sebagai komoditas utamanya dan juga kegiatan peternakan. Kondisi alam Pegunungan Menoreh dengan akses yang terbatas menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Desa Pagerharjo. Selain itu, banyaknya penduduk tua³ yang tinggal di desa ini menjadikan perekonomian desa kurang berkembang dan kemiskinan lebih sulit diatasi. Sementara itu, Desa Banjarsari lebih bervariasi dengan kemiringan lereng yang beragam. Sebelah timur desa ini merupakan daerah pertanian, sedangkan sebelah baratnya merupakan daerah perkebunan kakao. Kondisi fisik daerah penelitian secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Selain kondisi fisik wilayah yang beragam, kondisi kependudukan di tiga daerah penelitian juga bervariasi. Jumlah rumah tangga yang ada di daerah kajian seluruhnya berjumlah 5.184 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak berada di Desa Banjararum dengan jumlah sebesar 2.741 rumah tangga, sedangkan yang terendah adalah Desa Banjarsari dengan jumlah rumah tangga sebesar 1.010 rumah tangga. Menurut struktur rumah tangganya, rata-rata jiwa per kepala rumah tangga sebesar 4 jiwa, yang artinya tiap rumah tangga memiliki dua orang anak. Untuk kondisi kesejahteraan rumah tangga, dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk di tiga desa penelitian tergolong dalam kategori miskin. Tahapan rumah tangga Pra-KS dan KS-1⁴ dikategorikan BPS sebagai penduduk miskin. Sebanyak 70 persen kepala keluarga di Banjararum tergolong rumah tangga miskin,

³ Persentase penduduk tua (65+) di Desa Pagerharjo menurut BPS (2012) hampir sebesar 60 persen terhadap total penduduk.

⁴ Keluarga Prasejahtera (Pra-KS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Indikatornya adalah adanya salah satu atau lebih indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah anggota keluarga melaksanakan ibadah, pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian; bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah, dan bila anak sakit, dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern. Tahapan Pra-KS dan KS 1 dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; BKKBN, 2014).



Sumber: RBI Digital Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dari Balai Informasi Geospasial

Gambar 1 Peta Administrasi Daerah Kajian

Tabel 1 Banyaknya Rumah Tangga menurut Tahapan Keluarga di Tiga Desa

Desa	Pra-KS		KS -I		KS -II		KS -III		KS -III+		Jumlah
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Banjararum	1.208	44,07	724	26,41	276	10,07	525	19,15	8	0,29	2.741
Banjarsari	618	61,19	156	15,45	73	7,23	160	15,84	3	0,30	1.010
Pagerharjo	782	54,57	177	12,35	59	4,12	394	27,49	21	1,47	1.433

Sumber: Kecamatan Kalibawang dalam Angka dan Kecamatan Samigaluh dalam Angka (BPS Kulon Progo, 2010)

sedangkan di Banjarsari 76 persen dan di Pagerharjo sebanyak 66 persen tergolong dalam keluarga miskin. Berdasarkan data Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), jumlah penduduk miskin di tiga desa sebesar 2.012 kepala keluarga. Tingginya penduduk miskin di tiga desa juga menjadi pertimbangan pemilihan daerah penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Jumlah populasi rumah tangga miskin di tiga desa seluruhnya berjumlah 2.012 rumah tangga dari data Pendataan Sosial Ekonomi (PSE).⁵ Dari seluruh populasi rumah tangga miskin, diambil 323 rumah tangga sampel atau sebesar 25 persen dari seluruh populasi. Penentuan jumlah sampel

ini didasarkan pada perhitungan Tabel Krejcie dan Morgan dengan taraf keyakinan 95 persen dan *sampling error* sebesar 5 persen ($\alpha=0,05$). Pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random sampling*⁶ dari tiap-tiap desa. Pengumpulan informasi data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner. Untuk menambah informasi yang lebih detail, dilakukan studi kasus pada rumah tangga miskin sebagai narasumber dengan wawancara mendalam dan observasi.

Berdasarkan analisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan bantuan tabel frekuensi dan tabel silang. Kemudian analisis kualitatif dilakukan dengan penjabaran dari informasi yang bersumber dari wawancara mendalam. Cara analisisnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif.

Strategi Penghidupan Rumah Tangga Perdesaan: Tinjauan Teoretis

Salah satu modal penduduk untuk keluar dari kemiskinannya adalah kekuatan fisik (Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Kekuatan fisik ini, oleh Scoones (1998), didefinisikan sebagai aset modal manusia. Aset ini akan memengaruhi jenis strategi yang dipilih oleh penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Selain aset modal manusia, beberapa penguasaan aset lain juga memengaruhi strategi yang dipilih oleh rumah tangga miskin. Penguasaan aset

tersebut meliputi aset modal manusia, aset alam, aset ekonomi, aset sumber daya fisik, dan aset jaringan sosial (Scoones, 1998; Department for International Development, 1999; Gunasinge, 2010).

Strategi penghidupan, menurut Scoones (1998), merupakan kegiatan mengatur atau merencanakan dengan cermat cara merespons perubahan dalam kehidupan secara cermat untuk memperoleh target atau sasaran yang diinginkan. Kegiatan tersebut akan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain dan akan berbeda pula antara strategi yang diterapkan di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Strategi yang diterapkan antara daerah perdesaan dengan kegiatan utama di perikanan dengan daerah perdesaan dengan kegiatan utama di pertanian juga akan berbeda. Untuk strategi penghidupan rumah tangga pertanian di perdesaan, White (1991) dalam Baiquni (2006) membedakan tiga strategi penghidupan rumah tangga sebagai berikut.

1. Strategi akumulasi (*accumulation strategy*), yaitu strategi yang dinamis oleh petani atau pengusaha yang memiliki sumber daya yang banyak. Dalam hal ini, mereka memiliki lahan yang luas dan ditunjang aset-aset produksi sehingga mampu memupuk modal dari surplus yang diperoleh dari satu kegiatan. Surplus atau keuntungan digunakan untuk memperoleh akses sumber daya produktif yang lebih tinggi baik dari pertanian

⁵ Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) merupakan data level individu pertama yang tersedia sebagai dasar dari program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin. PSE dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti pada data kemiskinan makro. Indikator-indikator yang digunakan sebanyak 14 variabel, yaitu 1) luas lantai rumah, 2) jenis lantai rumah, 3) jenis dinding rumah, 4) fasilitas tempat buang air besar, 5) sumber air minum, 6) penerangan yang digunakan, 7) bahan bakar yang digunakan, 8) frekuensi makan dalam sehari, 9) kebiasaan membeli daging/ayam/susu, 10) kemampuan membeli pakaian, 11) kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik, 12) lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, 13) pendidikan kepala rumah tangga, dan 14) kepemilikan aset. Metode yang digunakan untuk menentukan kategori rumah tangga tersebut miskin atau tidak adalah menggunakan sistem *scoring* dan pembobotan pada setiap variabel (Kementerian Sosial RI dan BPS, 2012).

⁶ *Proporsional random sampling* merupakan teknik pengumpulan data menggunakan sampel populasi. Sampel populasi didapat dari tiap-tiap subpopulasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut (Yunus, 2010).

maupun nonpertanian. Kelompok ini yang memungkinkan melakukan diversifikasi usaha dan berinteraksi, bahkan berkompetensi dengan pasar luar.

2. Strategi konsolidasi (*consolidation strategy*), yaitu strategi kelompok menengah yang mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan dari pengolahan sumber daya yang dimiliki. Bila mereka berhasil melakukan konsolidasi aset sumber daya dan meningkatkan produksi, maka secara bertahap akan masuk ke kelompok untuk melakukan strategi akumulasi. Sebaliknya, bila mengalami kegagalan dalam melakukan strategi konsolidasi, dapat pula merosot menjadi petani miskin yang harus melakukan strategi *survival* bertahan hidup.
3. Strategi bertahan hidup (*survival strategy*), yaitu strategi bertahan hidup oleh para petani atau kelompok kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Kelompok ini mengolah sumber daya alam yang amat terbatas atau terpaksa bekerja apa saja, terutama sebagai buruh tani atau buruh industri perdesaan dan jasa dengan imbalan yang rendah. Kegiatannya hanya untuk sekadar menyambung hidup tanpa mampu menabung bagi pengembangan modal.

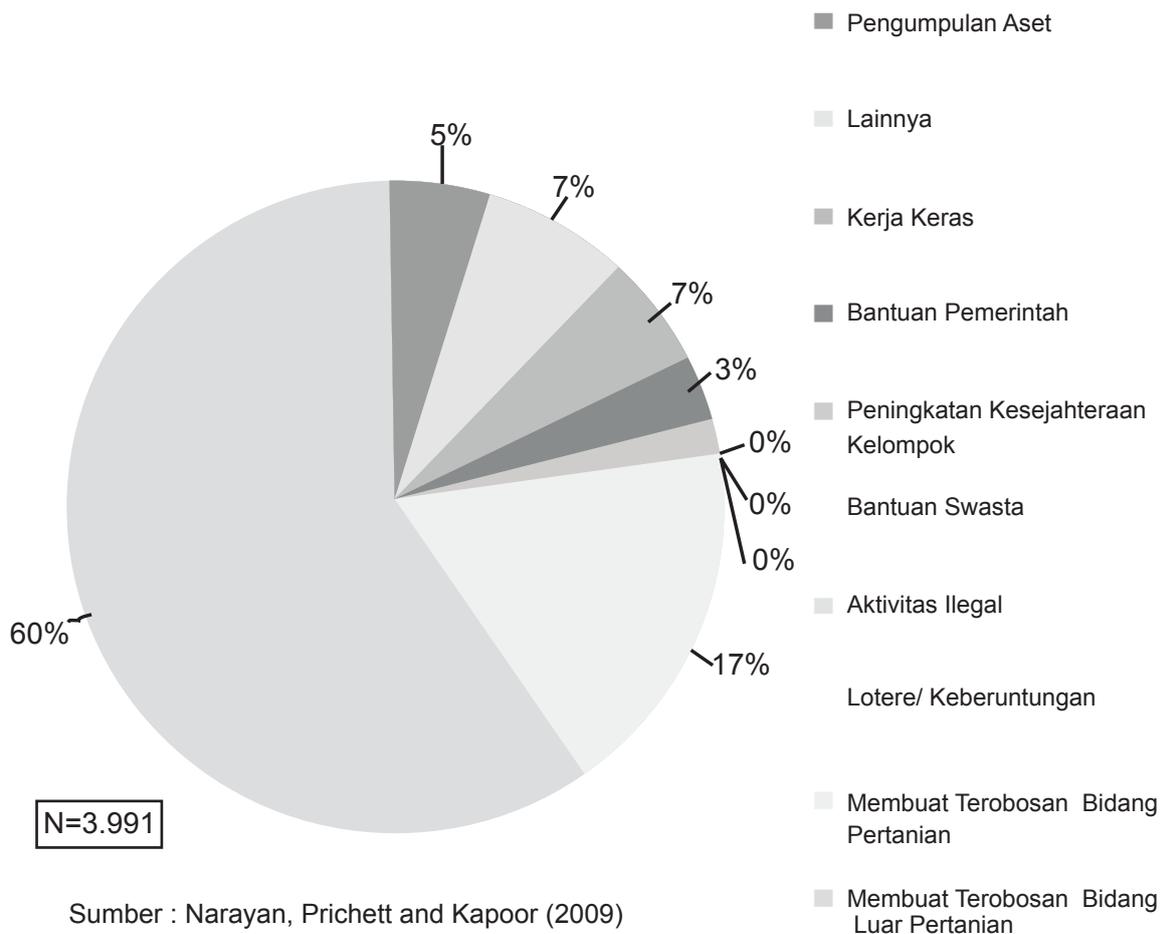
Strategi Penduduk Miskin Keluar dari Kemiskinan

Lewis (1956, 1966) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu budaya.⁷ Penduduk miskin diidentikkan dengan berbagai karakteristik yang kompleks, seperti

terasing, pasif, malas, tidak berdaya, tidak bernilai, memiliki aspirasi yang rendah, serta pecandu alkohol dan pelaku kriminal. Keadaan tersebut tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Narayan, Prichett, dan Kapoor (2009), penduduk miskin adalah pejuang yang andal. Berbagai cara mereka lakukan agar dapat keluar dari kemiskinan, bahkan ada temuan yang mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu budaya tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Berdasarkan survei yang dilakukan di 15 negara di dunia, diketahui bahwa penduduk miskin menggunakan berbagai macam strategi untuk keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi.

Berdasarkan Gambar 2, penyebab seseorang keluar dari kemiskinan adalah mengusahakan jenis kegiatan baru di luar pertanian secara mandiri. Jenis kegiatan tersebut, antara lain, adalah mencari pekerjaan di bidang lain, terjun ke dunia bisnis, dan bermigrasi (Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Di sebagian daerah di Indonesia, melakukan migrasi ke luar negeri merupakan salah satu cara seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Dengan mengirimkan remitan hasil bekerja di luar negeri, kesejahteraan keluarga akan meningkat dan menyebabkan mereka keluar dari kemiskinannya (Pitoyo, 2007). Sementara itu, strategi lain yang sering digunakan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan membuat terobosan di bidang pertanian. Memperbaiki sistem drainase, diversifikasi pola tanam, menggunakan bibit unggul, dan menggunakan teknologi untuk mengolah lahan pertanian merupakan contoh dari terobosan yang dibuat oleh penduduk

⁷ Oscar Lewis mengatakan dalam bukunya *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty* (1959) bahwa orientasi nilai, pola hidup, dan cara berpikir orang miskin mencerminkan kebudayaan kemiskinan. Tesis utamanya adalah orang miskin memiliki karakteristik dan nilai-nilai budaya yang berbeda dengan orang kebanyakan, yang kemudian membentuk subkultur tersendiri. Sementara itu, Lewis (1966) menjelaskan bahwa penduduk menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan. Penduduk miskin memiliki karakter apatis dan mudah menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak kuat, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, serta dekat dengan budaya kejahatan dan kekerasan.



Gambar 2 Penyebab Penduduk Miskin Keluar dari Kemiskinan di 15 Negara

miskin untuk keluar dari kemiskinan (Polak, 2008). Hal tersebut sekaligus menjelaskan bahwa penduduk miskin sebenarnya sangat jauh dari budaya malas, pasif, dan cenderung melakukan kriminalitas.

Faktor Geografis sebagai Penentu Strategi Penghidupan

Hubungan manusia dengan lingkungan yang menjelaskan mengenai adaptasi ekologi secara umum terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme lingkungan mengatakan bahwa alam adalah satu-satunya faktor yang menentukan adaptasi penduduk (Ernste dan Philo, 2009). Kemudian posibilisme lingkungan memandang manusia sebagai penentu perubahan lingkungan

dengan cara melakukan adaptasi tertentu (Berdoulay, 2009). Pandangan lain dari keduanya adalah probabilisme lingkungan, yaitu jalan tengah antara determinisme dan posibilisme (Flowerdew, 2009). Strategi penghidupan merupakan respons adaptasi manusia terhadap perubahan yang terjadi padanya, baik yang berkaitan dengan lingkungan fisik maupun lingkungan nonfisik. Perbedaan strategi penghidupan yang dilakukan ditentukan oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki (Scoones, 1998; Baiquni, 2006; Bank Dunia, 2007; Sesabo, 2007; Sutanto, 2008; Vogelij, 2008; Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009).

Rumah tangga yang berada pada daerah geografis dan memiliki akses terbatas akan memiliki pilihan yang lebih sedikit untuk keluar dari kemiskinan daripada rumah tangga

yang berada pada daerah dengan kondisi geografis dan akses yang baik (Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Perbedaannya berada pada kesempatan yang tersedia. Studi yang dilakukan di Kagera (Tanzania) dan Kamsoni (perbatasan Uganda-Tanzania) menyebutkan dari survei yang dilakukan di 51 distrik, diketahui bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor geografis. Selain itu, proses untuk keluar dari kemiskinan juga dipengaruhi oleh akses dan faktor geografis wilayahnya. Faktor geografis ini lebih ditekankan pada kondisi fisik wilayahnya. Narayan, Prichett, dan Kapoor (2009) menjelaskan bahwa daerah Kagera yang merupakan daerah dengan akses yang terbatas sangat lambat penduduknya untuk keluar dari kemiskinan. Akan tetapi, daerah Kamsoni yang memiliki akses jalan yang baik serta ekonomi dan perdagangan yang berkembang memiliki waktu yang cepat bagi penduduknya untuk keluar dari kemiskinan.

Pembahasan

Identifikasi Penduduk Miskin yang Mampu Keluar dari Kemiskinan

Penduduk miskin perdesaan yang telah keluar dari kemiskinan didefinisikan sebagai penduduk yang mampu meningkatkan kesejahteraannya dari keadaan semula dan telah keluar dari strategi bertahan hidup (White, 1991; Scoones, 1998; Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009).⁸ Pengelompokan penduduk yang telah keluar dari kemiskinan diperoleh dari kepemilikan aset serta

penerapan strategi penghidupan yang mereka pilih dan strategi yang diterapkan telah mengarah pada strategi konsolidasi dan akumulasi. Berdasarkan pengelompokan tersebut, penduduk miskin di tiga desa tidak semua dikategorikan sebagai penduduk miskin kronis. Terdapat beberapa rumah tangga yang mulai mampu meningkatkan pendapatannya dan mencoba keluar dari kemiskinan yang mereka alami.

Penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan teridentifikasi dari penerapan strategi yang telah beralih dari strategi bertahan hidup menuju konsolidasi.⁹ Sementara itu, penduduk yang belum keluar dari kemiskinan masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan hidup dasar dengan kegiatannya hanya untuk menyambung hidup tanpa mampu menabung untuk peningkatan modal. Jumlah penduduk miskin yang belum dapat keluar dari kemiskinan di tiga desa lokasi penelitian tergolong sangat tinggi. Hampir separuh lebih dari total populasi penduduk miskin di tiga desa tersebut belum mampu keluar dari kemiskinan (Tabel 2).

Penduduk miskin yang dapat dikatakan keluar dari kemiskinan di seluruh desa penelitian baru 31 persen (101 KK) dari total populasi yang diteliti (323 KK), sedangkan sisanya belum dapat dikatakan keluar dari kemiskinan. Berdasarkan Tabel 2, sepertiga penduduk miskin di tiga daerah kajian telah mampu keluar dari kemiskinan. Persentase terbesar adalah penduduk miskin di Banjarsari yang mewakili daerah peralihan antara dataran rendah dan daerah perbukitan.

⁸ White (1991) menjelaskan bahwa strategi penghidupan dalam rumah tangga pertanian di perdesaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu strategi bertahan hidup, strategi konsolidasi, dan strategi akumulasi. Strategi bertahan hidup dilakukan bagi mereka yang berada pada kategori miskin. Scoones (1998) menjelaskan bahwa peningkatan aset yang dikelola oleh rumah tangga akan menentukan strategi yang nantinya diterapkan. Narayan, Prichett dan Kapoor (2009) menjelaskan bahwa penduduk miskin dapat mengalami transisi ekonomi. Penduduk miskin dalam perjalanannya dapat meningkatkan kesejahteraannya (*mover*) atau dalam perjalanannya penduduk miskin dapat menjadi lebih miskin lagi atau tetap kondisinya seperti itu (*chronic poor*). Konsep penduduk miskin yang keluar dari kemiskinan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penduduk miskin yang telah mampu meningkatkan kesejahteraannya serta telah keluar dari strategi bertahan hidup.

⁹ Rumah tangga yang telah keluar dari kemiskinan merupakan rumah tangga yang telah menerapkan strategi konsolidasi dalam kehidupannya. Penerapan strategi konsolidasi menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Cara kedua adalah dengan meningkatkan pendapatannya dengan cara diversifikas pekerjaan.

Tabel 2 Kategori Rumah Tangga Miskin menurut Desa

Kategori	Desa			Total
	Banjararum (Daerah Dataran Rendah)	Banjarsari (Daerah Transisi)	Pagerharjo (Daerah Tinggi Perbukitan)	
Keluar dari kemiskinan	27,8	35,9	34,7	31,3
Belum keluar dari kemiskinan	72,3	64,1	65,3	68,7
Total (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0
N	173	78	72	323

Sumber: Data Primer, 2013

Kemudian berdasarkan Tabel 3, penduduk yang telah berhasil keluar dari kemiskinan didominasi oleh rumah tangga dengan kepala keluarga yang berumur produktif. Marianti (2009) mengatakan kepala rumah tangga produktif memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berada pada usia nonproduktif. Hal itu karena kepala rumah tangga produktif memiliki peluang berinisiatif lebih banyak dengan berbagai usaha agar mereka cepat keluar dari kemiskinannya (Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Selain mayoritas kepala rumah tangga berusia produktif, karakteristik penduduk yang telah keluar dari kemiskinan, antara lain, adalah mayoritas kepala rumah tangga pernah berpendidikan SMP atau SMA, memiliki pendapatan yang stabil dan

umumnya memiliki diversifikasi pekerjaan, serta tingkat partisipasi sosial lebih tinggi.

Hambatan Penduduk Miskin Keluar dari Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin yang belum keluar dari kemiskinan di tiga desa kajian sangat tinggi, yaitu mencapai 69 persen. Tingginya jumlah penduduk yang belum keluar dari kemiskinan di tiga desa ini disebabkan oleh beberapa hal. Penelitian oleh Marianti (2009) menjelaskan bahwa di beberapa komunitas, seperti di Timor Barat, beban untuk memenuhi kewajiban adat dan keluarga dapat menurunkan kesejahteraan. Hal ini sepertinya juga dialami oleh penduduk di tiga desa sebagai salah satu penyebab penduduk sulit untuk keluar dari kemiskinannya.

Tabel 3 Kategori Kepala Keluarga menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Banjararum (Daerah Dataran Rendah)		Banjarsari (Daerah Transisi)		Pagerharjo (Daerah Tinggi Perbukitan)	
	K	BK	K	BK	K	BK
< 25	2,1	0,8	0,0	0,0	4,0	0,0
25-49	62,5	42,4	64,3	22,0	52,0	21,3
50-64	18,8	24,8	17,9	40,0	32,0	38,3
65+	16,6	32,0	17,8	38,0	12,0	40,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	48	125	28	50	25	47

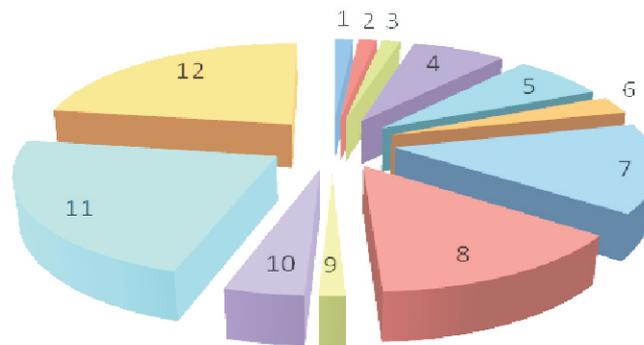
Sumber: Data Primer, 2013

Keterangan: K= Keluar kemiskinan; BK= Belum Keluar kemiskinan

Kebutuhan terhadap pengeluaran biaya sosial yang tinggi menjadi salah satu penyebab penduduk miskin sulit keluar dari kemiskinannya. Berdasarkan wawancara dengan informan SJ (56 tahun), diketahui bahwa kebutuhan sosial masyarakat paling banyak terjadi pada bulan Dulkaidah dan bulan besar. Saat itu biaya sosial yang dibutuhkan sangat tinggi karena banyak rumah tangga menyelenggarakan berbagai

hajatan.¹⁰ Gambar 3 merupakan siklus kegiatan sosial masyarakat di tiga desa yang menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tertentu beban masyarakat miskin begitu tinggi. Diagram lingkaran tersebut didapatkan dengan *skoring* kegiatan sosial masyarakat selama satu tahun penuh.

Deininger dan Squire (1998) menjelaskan bahwa penguasaan dan



Bulan Ke-	Bulan Islam	Bulan Jawa	Intensitas ¹¹ Kegiatan Sosial di Masyarakat Perdesaan
1	Muharram	Suro	Hampir Tidak Ada
2	Syafar	Sapar	Rendah
3	Rabiul Awal	Mulud	Rendah
4	Rabiul Akhir	Bakda Mulud	Rendah
5	Jumadil Ula	Jumadil Awal	Mulai Sering
6	Jumadil Tsani	Jumadil Akhir	Mulai Sering
7	Rajab	Rejeb	Tinggi
8	Syaban	Ruwah	Sangat Tinggi
9	Ramadhan	Poso	Hampir Tidak Ada
10	Syawal	Sawal	Mulai Sering
11	Dzulkaidah	Dulkaidah	Tinggi
12	Dzulhijjah	Besar	Sangat Tinggi

Sumber: Wawancara Lapangan, 2013

Gambar 3 Siklus Kegiatan Sosial di Masyarakat Perdesaan

¹⁰ Hajatan yang dimaksudkan adalah acara adat yang berupa selamat. Selamat adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Selamat merupakan akulturasi budaya antara budaya Jawa dan Islam. Selamat dilakukan untuk merayakan hampir semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, pindah rumah, dan sebagainya (Almirzanah, 2007).

¹¹ Intensitas kegiatan sosial di masyarakat diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat di tiga desa. Penentuan kategori intensitas kegiatan diperoleh dari penjelasan jumlah kegiatan dengan metode *skoring*. Skor < 1 kategori hampir tidak ada, skor 1-2 kategori rendah, skor 3-4 kategori mulai sering, skor 5-6 kategori tinggi, dan skor > 6 kategori sangat tinggi.

distribusi lahan pertanian di masyarakat perdesaan merupakan jaminan kesejahteraan agar mereka keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, jika penduduk miskin terbatas dalam penguasaan lahan atau memiliki distribusi lahan yang kecil, maka potensi mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin kecil. Jika dirinci berdasarkan penguasaan lahannya, kepala rumah tangga miskin yang menguasai lahan milik sendiri sebesar 17 persen dan yang berstatus sewa sebesar 15 persen. Kemudian sisanya adalah penduduk yang tidak memiliki lahan dan hanya sebagai penggarap.

Rendahnya penguasaan lahan menjadi halangan ketika pertanian menjadi mata pencaharian utama. Apalagi berdasarkan luas lahan yang dikuasai, rata-rata luas lahan yang diusahakan sangat kecil, yaitu sebesar 0,14 hektar per rumah tangga. Proporsi rumah tangga miskin yang memiliki

penduduk miskin di tiga desa untuk keluar dari kemiskinannya.

Strategi Penduduk Miskin Keluar dari Kemiskinannya

Strategi peningkatan pendapatan dengan menambah aset merupakan salah satu cara penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinannya (Ellis, 1998; Akter, *et.al.*, 2008; Deshingkar, *et.al.*, 2008). Selain strategi tersebut, strategi lain yang dilakukan adalah terjun ke dunia bisnis, mencari pekerjaan lain di luar kegiatan pertanian, memanfaatkan bantuan pemerintah dan nonpemerintah, serta strategi lainnya (Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Strategi yang diterapkan penduduk miskin di tiga desa untuk keluar dari kemiskinannya didominasi oleh peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pekerjaan. (Lihat Tabel 4). Strategi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan di tiga

Tabel 4 Strategi untuk Keluar dari Kemiskinan menurut Desa

Strategi Keluar dari Kemiskinan	Desa			
	Banjararum (Daerah Dataran Rendah)	Banjarsari (Daerah Transisi)	Pagerharjo (Daerah Tinggi Perbukitan)	Total
Diversifikasi pekerjaan	68,7	43,6	72,0	65,4
Anak ikut bekerja	29,2	32,1	16,0	26,7
Memanfaatkan jasa keuangan	2,1	14,3	12,0	7,9
Persentase	100,0	100,0	100,0	100,0
N Mover	48	28	25	101

Sumber: Data Primer, 2013

lebih dari 1 hektar lahan hanya 37 persen (38 KK) dari 103 rumah tangga yang menguasai lahan. Mereka inilah yang biasanya dapat keluar dari kemiskinan karena lahannya dapat diusahakan, sedangkan sisanya adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Dengan kata lain, faktor kepemilikan lahan merupakan penyebab berikutnya masih sangat sulit

desa memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi geografisnya. Desa Banjararum merupakan daerah dataran rendah dengan pertanian lahan basah sebagai basisnya. Peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pekerjaan merupakan strategi terbanyak yang dilakukan penduduk miskin di desa ini untuk keluar dari kemiskinannya. Strategi ini meliputi penambahan ternak sedang, seperti

kambing¹² atau budidaya ikan air tawar, dan peningkatan aset sarana mobilitas, seperti motor. Peningkatan aset motor digunakan rumah tangga miskin untuk bekerja ke pasar. Desa Banjararum memiliki pasar yang ramai dikunjungi dan dimanfaatkan oleh sebagian penduduk miskin untuk bekerja di sana sebagai pedagang kecil. Strategi lain yang diterapkan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan memanfaatkan anak untuk ikut bekerja. Anak yang bekerja sebagian besar berada pada kegiatan nonpertanian. Umumnya mereka adalah lulusan SMA yang belum menikah dan bekerja sebagai karyawan di kota.

Strategi yang diterapkan di Desa Banjarsari untuk keluar dari kemiskinan didominasi oleh peningkatan pendapatan dengan diversifikasi pekerjaan. Strategi tersebut meliputi pengelolaan dan pengembangan ternak dan peningkatan tanaman kakao. Penambahan dan pengembangan aset di bidang ternak di Desa Banjarsari diawali dengan menjadi penggaduh ternak yang kemudian dikembangkan. Sementara itu, peningkatan kakao dilakukan dengan menambah jumlah pohon di pekarangan dan lahan yang dimilikinya. Tidak seperti di dua desa lainnya, tanaman kakao sangat cocok dikembangkan di daerah ini. Secara geografis, kesesuaian lahan tanaman kakao di Desa Banjarsari sangat tinggi.

Fatahillah (2011) menyebutkan bahwa tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman kakao di Desa Banjarsari sebesar 60 persen. Hanya daerah-daerah dengan lereng curam yang tidak dapat ditanami tumbuhan kakao.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 menyebutkan bahwa desa ini termasuk daerah kawasan peruntukan tanaman budidaya kakao.¹³ Faktor geografis yang mendukung untuk diusahakan tanaman kakao dimanfaatkan oleh penduduk miskin agar mereka keluar dari kemiskinannya. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) yang mengatakan bahwa 76 persen rumah tangga miskin memanfaatkan kakao sebagai strategi penghidupan di samping mengelola ternak untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Selain mengelola aset ternak, strategi lain yang dilakukan di Desa Banjarsari adalah dengan memanfaatkan jasa keuangan dan anak yang ikut bekerja. Strategi pemanfaatan jasa keuangan secara persentase paling tinggi jika dibandingkan dengan dua desa lainnya. Pemanfaatan jasa keuangan ini digunakan untuk menambah modal dalam proses pembibitan sampai perawatan tanaman kakao yang dimiliki. Lembaga keuangan yang dimanfaatkan, antara lain, adalah Dasawisma, koperasi kelompok, koperasi desa, dan bank.

Sementara itu, strategi penduduk di Desa Pagerharjo hampir sama dengan strategi yang diterapkan di Desa Banjarsari, yaitu dengan meningkatkan ternak dan mengoptimalkan tanaman kakao. Namun tanaman kakao tidak banyak diupayakan seperti di Desa Banjararum karena desa ini memiliki beberapa daerah dengan kemiringan lereng yang curam (>40 persen). Selain itu, ketinggian tempat yang terlalu

¹² Penambahan ternak, baik ternak sedang atau ternak besar, dilakukan dengan membeli ternak ketika masih kecil. Ternak tersebut dipelihara dan dikembangkan jumlahnya. Jika telah besar, kemudian ternak dijual.

¹³ Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan perkebunan kakao di Kulon Progo pada pasal 43 ayat 6 meliputi 1. Kecamatan Temon, 2. Kecamatan Wates, 3. Kecamatan Panjatan, 4. Kecamatan Pengasih, 5. Kecamatan Kokap, 6. Kecamatan Girimulyo, 7. Kecamatan Nanggulan, 8. Kecamatan Kalibawang, dan 9. Kecamatan Samigaluh.

tinggi menyebabkan pertumbuhan kakao menjadi tidak optimal. Peningkatan ternak yang dikembangkan di Desa Pagerharjo lebih baik dibandingkan dengan dua desa lainnya. Tidak seperti dua desa lainnya, ternak yang banyak diusahakan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk miskin di Desa Pagerharjo adalah sapi.

Berdasarkan paparan di atas, mengusahakan tanaman pertanian dikombinasikan dengan ternak menjadi pilihan ketiga penduduk miskin di tiga desa. Hal ini merupakan cara terefektif bagi penduduk miskin perdesaan untuk keluar dari kemiskinannya (Akter, *et.al.*, 2008). Inisiasi strategi lokal yang diterapkan oleh penduduk disesuaikan dengan kondisi geografis di tiga desa tersebut yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan peternakan.

Kesimpulan

Cara yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan adalah berdasarkan dari strategi lokal yang diterapkan orang miskin itu sendiri (ILO, 2003; Narayan, Prichett, dan Kapoor, 2009). Inisiasi lokal merupakan contoh yang harus diterapkan untuk menurunkan kemiskinan dengan kondisi geografis yang hampir sama. Berdasarkan karakteristiknya, penduduk miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan di tiga desa memiliki karakteristik umum. Karakteristik umum penduduk tersebut, antara lain, adalah 1) mayoritas kepala rumah tangga berusia produktif, 2) mayoritas kepala rumah tangga pernah berpendidikan SMP atau SMA, 3) memiliki pendapatan yang stabil dan umumnya memiliki diversifikasi pekerjaan, serta 4) tingkat partisipasi sosial lebih tinggi.

Strategi yang digunakan oleh penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan berbeda-beda sesuai karakteristik daerahnya.

Strategi yang dilakukan penduduk Desa Banjararum untuk keluar dari kemiskinan, antara lain, dengan meningkatkan aset ternak sedang dan memanfaatkan anak untuk ikut bekerja. Strategi yang diterapkan di Desa Banjararum adalah dengan menambah aset pohon kakao di samping mengelola ternak. Kemudian strategi di Desa Pagerharjo lebih menggunakan peningkatan aset ternak besar, seperti sapi.

Perbedaan pemilihan strategi tersebut disebabkan oleh faktor perbedaan faktor geografis di setiap wilayah dan karakteristik rumah tangga. Meskipun telah mampu menjawab pengaruh faktor geografis dalam perbedaan strategi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinannya, penelitian ini memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut, antara lain, mengenai metode operasional penduduk yang keluar dari kemiskinan yang mengombinasikan tiga sumber, yaitu dari Narayan (2009), Scoones (1998), dan White (1991). Hal ini dilakukan karena penulis tidak memiliki data perubahan dalam dua titik waktu sehingga konsep telah meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin antarwaktu dari konsep Narayan (2009) tidak dapat dipenuhi. Untuk meminimalkan kekurangan tersebut, penulis menggunakan konsep Scoones (1998) dan White (1991) tentang tingkatan dalam strategi penghidupan penduduk perdesaan.

Daftar Pustaka

- Akram-Lodhi, A. H., Borrás Jr., S.M., and Kay, C. 2007. *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*. New York: Routledge. ISBN 0-203-96225-7.
- Akter, S., Farrington, J., Deshingkar, P. and Freeman, A. 2008. "Livestock, Vulnerability, and Poverty Dynamics in

- India”, from the ODI Livelihood Options Project Panel Survey. *Discussion Paper No. 10. Targeting and Innovation*. ILRI (International Livestock Research Institute), Nairobi, Kenya. Available at http://www.ilri.org/Infoserv/webpub/fulldocs/TargetNov_DiscPaper10/Lives_VulnPover_DiscPaper10.pdf.
- Alfana, M. A. F. 2014. “Strategi Penghidupan Rumahtangga Miskin Perdesaan (Kasus di Tiga Desa Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Almirzanah, S. 2007. “Islam and the Javanese Religion: Reconsidering Syncretism in the Slametan Ritual”. *International Conference on Religion and Culture*. Institute of Religion, Culture and Peace Payap University, Chiang Mai, Thailand. June 24-30-2007.
- Arief, A.A. dan Agusanty, H. 2007. *Inisiatif Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Eksploitasidan Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara)*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Baiquni, M. 2006. “Pengelolaan Sumberdaya Perdesaan Dan Strategi Penghidupan Rumah Tangga Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di Masa Krisis (1998-2003)”. *Disertasi*. Bidang Studi Ilmu Geografi. UGM. Yogyakarta.
- Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Bank Dunia.
- Bappenas. 2012. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011*. Jakarta, Bappenas.
- Berdoulay, V. 2009. “Possibilism” in Kitchin, R And Thrift, N. 2009. *International Encyclopedia Of Human Geography*. Amsterdam, Elsevier.
- Bird, K. and Shinyekwa, I. 2004. “Chronic Poverty In Rural Uganda: Harsh Realities and Constrained Choices”, in Ellis, F. and Freeman, H. A. (eds.). 2004. *Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies*. New York, Routledge.
- BKKBN. 2014. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013*. Jakarta, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Borras Jr, S. M., C Kay and Akram-Lodhi, A.H. 2007. Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues. in Akram-Lodhi, A.H., Borras Jr. and S. M., C. Kay (eds). 2007 *Land, Poverty And Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives From Developing And Transition Countries*. London: Routledge.
- Brandt, H. Dan O. Otzen. 2007. *Poverty Orientated Agricultural and Rural Development*. Routledge, New York.
- Ellis, F. 1998. “Household Strategies and Rural Livelihood Diversification”. *Journal of Development Studies*. Vol. 35. Number 1 - October 1998 - Pages 1-38.
- Ernste, H and Philo, C. 2009. “Determinism/ Environmental Determinism” in Kitchin, R and Thrift, N. 2009. *International Encyclopedia Of Human Geography*. Amsterdam, Elsevier.
- Flowerdew, R. 2009. “Probabilism” in Kitchin, R and Thrift, N. 2009. *International Encyclopedia Of Human Geography*. Amsterdam, Elsevier.
- Department for International Development. 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. London: Department for International Development.

- Deshingkar, P., Farrington, J., Rao, L., Akter, S., Sharma, P., Freeman, A. and Reddy, J. 2008. Livestock and Poverty Reduction in India: Findings from the ODI Livelihood Options Project. *Discussion Paper No. 8. Targeting and Innovation*. ILRI (International Livestock Research Institute), Nairobi, Kenya. Available at <http://www.ilri.org/Infoserv/>. [webpub/fulldocs/TargetInov_DiscusPaper8/LivesPovertReduc_Discer8.pdf](http://www.ilri.org/Infoserv/fulldocs/TargetInov_DiscusPaper8/LivesPovertReduc_Discer8.pdf).
- Deininger, K. and Lyn, S. 1998. "New Ways at Looking at Old Issues: Inequality and Development". *Journal of Development Economics*. 52: 259–88.
- Ellis, F. and Freeman, H. A. 2004. "Conceptual framework and overview of themes" in Ellis, F. and Freeman, H. A. (eds.). 2004. *Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies*. New York, Routledge.
- Fatahillah, G. 2011. "Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kakao (Theobroma Cacao L) di Desa Banjarsari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Gunasinge, C. 2010. "The Significance of Capital Assets in Moving Out of Poverty: A Case Study of Sri Lanka". *South Asia Economic Journal*. Volume 11(2) pp. 245 –285.
- ILO, 2003. "Report Of The Director-General: Working Out of Poverty". *International Labour Conference 91st Session 2003*. International Labour Office Geneva. ISBN 92-2-112870-9.
- Kementrian Sosial RI dan BPS. 2012. *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011*. Jakarta, Kementerian Sosial RI dan BPS.
- Lewis, A. C. 1994. "Education Is the Only Way out of Poverty". *The Phi Delta Kappan*, Vol. 76, No. 3 (Nov., 1994), pp. 180-181.
- Lewis, O. 1959. *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. New York: Basic Books.
- . 1966. *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty: San Juan and New York*. New York: Random House.
- Maloney, W.F. 2003. "Informal Self-Employment: Poverty Trap or Decent Alternative?" in Fields, G.S. and Pfefferman, G. 2003. *Pathways Out of Poverty*. Boston, Kluwer Academic Publishers.
- Manning, C. and Miranti, R. 2015. "The Yudhoyono Legacy on Jobs, Poverty and Income Distribution: a Mixed Record" in Aspinall, E., Meitzner, M., and Tomsa, D. (eds.). 2012. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Marianti, R. 2014. "Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara dan Timor Barat". *Laporan Penelitian*. Jakarta, SMERU.
- Moyo, S. 2007. "Land policy, poverty reduction and public action in Zimbabwe". in Borras Jr, S. M., C Kay and Akram-Lodhi, A.H. (eds). 2007 *Land, Poverty And Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives From Developing And Transition Countries*. London, Routledge.
- Narayan, D., Prichett, L., and Kapoor, S. 2009. *Moving Out of Poverty, Voleme 2: Success from the Bottom Up*. Washinton D.C., World Bank
- Palacios, M.R., Huber-Sannwald, E., Barrios, L.G., de Paz, F.P., Hernández, J.C.,

- Mendoza, M.G.G. 2013. "Landscape diversity in a rural territory: Emerging land use mosaics to livelihood diversification". *Land Use Policy*. Volume 30. pp 814–824.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032*. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Pitoyo, A. J. 2007. Pemanfaatan Produktif Remitan dalam Tukiran, Kutanegara, P. M, Pitoyo, A. J. dan Latief, M.S (eds). 2007. *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. No ISBN 978-979-3969-41-1.
- Polak, P. 2008. *Out Of Poverty : What Works When Traditional Approaches Fail*. San Francisco, Berrett-Koehler Publishers.
- Scoones, I. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. Institute of Development Studies University of Sussex.
- Sesabo, J. K. 2007. "Marine Conservation and Poverty Reduction Strategies in Tanzania". *Journal of Springer*. Hamburg Studies on Maritim Affarirs Volume 8 ISBN 978-3-540-69941-5.
- Sutanto, A. 2008. "Livelihoods and Coping Responses to the Crisis in Four Villages with Different Farm Systems in the Special Region of Yogyakarta" in Titus, M.J and Burgers, P.P.M. (eds). 2009. *Rural Livelihoods, Resources and Coping with Crisis in Indonesia A Comparative Study*. ISBN 978 90 8964 055 0. Singapore: ISEAS Publishing.
- TIM BPTP NTB. 2005. "Kegiatan Inisiatif Lokal". *Laporan Akhir*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Indonesia.
- Vogelij, R. 2008. "The Asian Crisis, Livelihood Conditions, and Resource Use in the Coastal Village of Tamasaju, South Sulawesi" in Titus, M.J and Burgers, P.P.M. (eds.). 2009. *Rural Livelihoods, Resources and Coping with Crisis in Indonesia A Comparative Study*. ISBN 978 90 8964 055 0. Singapore: ISEAS Publishing.
- Wijayanti, V. R. 2010. "Usaha Tani Kakao dan Tingkat Ekonomi Petani di Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yunus, H.S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERAN GANDA PEDAGANG PEREMPUAN DI PASAR SENI MERTHA NADI LEGIAN, BALI

Wayan Hesty Mayaswari¹ dan I Gusti Wayan Murjana Yasa¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Korespondensi: Wayan Hesty Mayaswari (*e-mail*: mayaswari.hesty@yahoo.com)

Abstrak

Zaman sekarang banyak perempuan telah berpartisipasi dalam sektor publik. Namun hal ini dapat menimbulkan konflik pembagian waktu bagi perempuan, yaitu dalam tugas domestik dan aktivitas sosial sebagai perempuan Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggungan keluarga, pendapatan nonkerja, dan pelaksanaan kegiatan adat istiadat terhadap alokasi waktu perempuan pedagang cenderamata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian, baik secara simultan maupun secara parsial. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik sampling yang digunakan adalah systematic random sampling menggunakan sampel sebanyak 70 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pendapatan nonkerja tidak memengaruhi perubahan konsumsi waktu luang dan alokasi waktu kerja perempuan di sektor publik. Jika intensitas untuk kegiatan adat sedang tinggi, maka waktu mereka untuk bekerja akan berkurang. Pedagang perempuan di Pasar Seni Mertha Nadi Legian selalu memiliki alasan untuk tetap bekerja selain banyaknya pekerjaan domestik yang seharusnya mereka lakukan demi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarganya.

Kata kunci: tenaga kerja, perempuan, alokasi waktu

THE DUAL ROLES OF WOMEN TRADERS IN THE ART MARKET OF MERTHA NADI, LEGIAN, BALI

Abstract

Women now have a lot of participation in the public sector. However, this would create a conflict of time division for women, both in domestic affairs and social activities as Balinese women. The objective of this study is to determine the influence of the number of dependents load, non-labor income and cultural activities to the allocation of women's time among souvenir traders at Mertha Nadi Legian Art Market simultaneously and partially. Data are collected by observation, questionnaires and unstructured interviews. The sampling technique uses systematic random sampling with a sample of 70 respondents. The results showed that non-work income change doesn't affect the length of leisure time and working time allocation of women in the public sector. If the intensity is high for cultural activities, their time for work will be reduced. Women traders at Mertha Nadi Legian Art Market always have a reason to keep working besides many domestic job they are supposed to do for the sake of self-development and the welfare of her family.

Keywords: manpower, women, allocation of time

Pendahuluan

Tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari faktor produksi yang sangat penting selain sumber daya alam (SDA), teknologi, dan modal. SDM dan SDA merupakan faktor produksi asli, sedangkan teknologi dan modal merupakan faktor turunan. Pada zaman dulu manusia dapat memproduksi hanya dengan mengandalkan tenaga kerja dan alam, tanpa dibantu oleh teknologi yang canggih seperti sekarang. Dalam studi kependudukan,

globalisasi bukan saja membawa kemajuan dalam modernisasi dalam bidang industri dan teknologi, tetapi juga kesetaraan gender.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat dari total penduduk yang bekerja, peran partisipasi perempuan sebesar 44,5 persen dan hampir setara dengan persentase partisipasi laki-laki yang bekerja. Sebagaimana diketahui, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor ini, antara lain, adalah umur, status perkawinan, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan

Tabel 1 Kondisi Ketenagakerjaan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2014

Uraian	Laki-laki	Laki-laki (%)	Perempuan	Perempuan (%)	Jumlah
Penduduk Usia Kerja (orang)	1.546.498	50	1.546.382	50	3.092.880
Angkatan Kerja (orang)	1.276.593	55	1.040.165	45	2.316.758
Bekerja (orang)	1.259.845	54,5	1.024.044	44,5	2.272.632
Pengangguran Terbuka (orang)	28.005	63,5	16.121	37,5	44.126
Bukan Angkatan Kerja (orang)	269.905	34,8	506.127	63,2	776.122
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,55		67,26		74,91
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19		1,55		1,90

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015

tenaga kerja dapat diartikan sebagai seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif (Adioetomo dan Omas, 2010: 199). Populasi perempuan yang hampir sama dengan laki-laki adalah sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan. Biasanya yang paling dianggap potensial untuk bekerja adalah laki-laki dan di dalam masyarakat telah ditanamkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanya di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Kini perempuan mulai berkembang dalam dunia kerja dan mulai mencari kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Muncul berbagai upaya kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan gender itu dalam era globalisasi ini. Dapat dikatakan bahwa era

pendapatan. Faktor-faktor tersebut tidak terlalu memengaruhi tingkat partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Berbeda halnya dengan laki-laki, fungsi utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu rumah tangga, serta melahirkan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Kemungkinan lain yang menyebabkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang ada (Haryanto, 2008). Kemajuan dalam bidang industri teknologi

memacu semangat perempuan mengejar kesetaraan dengan laki-laki. Mereka bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga untuk sebuah pengakuan di masyarakat, terlebih bagi perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Berbagai pekerjaan rumah tangga kini lebih dimudahkan dengan berbagai peralatan rumah tangga yang modern sehingga dapat membantu menghemat waktu mengurus rumah tangga. Dengan demikian, perempuan dapat mengambil pekerjaan di luar sektor domestik. Untuk memasak nasi, mereka tidak perlu menanak nasi dalam proses yang lama karena sebagian besar telah menggunakan *rice cooker* yang lebih praktis untuk memasak nasi. Contoh lainnya adalah mereka tidak perlu mencuci baju dengan waktu yang lama lagi karena penggunaan mesin cuci dirasakan lebih praktis dan efisien

Kesempatan perempuan untuk keluar dari sektor domestik dan bekerja dapat disebabkan oleh kesadaran perempuan sendiri atau karena penggeseran sistem nilai yang memungkinkan mereka meninggalkan wilayah domestik. Kehadiran industri besar dan sedang memberikan alternatif baru dalam membuka kesempatan kerja bagi perempuan. Akan tetapi, untuk dapat bekerja pada industri-industri ini, diperlukan keterampilan yang memungkinkan penggunaan tenaga kerja perempuan secara produktif dan efisien (Fadah dan Yuswanto, 2004). Salah satu lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah kegiatan informal, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pelayanan jasa masyarakat.

Ketika mereka memilih meluangkan waktu untuk bekerja pada sektor formal yang jam kerjanya terikat, maka mereka akan kesulitan membagi waktu antara kegiatan adat, mengurus anak, dan bekerja. Terlebih lagi bagi perempuan yang berada dalam

tahun pertama setelah melahirkan anak karena anak usia 0-1 tahun biasanya sangat memerlukan kehadiran ibunya. Hal itu terkait terutama dengan pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama sehingga waktu yang diperlukan untuk mengurus anak lebih banyak (Jayaraman, et.al., 2009). Pembagian waktu yang ada harus jelas agar tugas utama mengurus rumah tangga tidak terbengkalai karena risiko perceraian pada perempuan menikah dapat meningkat apabila mereka menelantarkan kewajiban dalam rumah tangganya (Juhn dan Potter, 2006).

Legian merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal di Bali dan adalah salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Badung. Peran perempuan di sektor informal perdagangan sangat berkembang di daerah ini. Dalam partisipasinya di sektor informal perdagangan, perempuan di Legian memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya untuk berdagang berbagai cendera mata khas Bali yang menjadi pilihan favorit wisatawan sebagai oleh-oleh ketika berlibur di Bali. Pihak desa adat turut mendukung melalui penyediaan lahan untuk pembangunan pasar seni. Dengan adanya kesempatan tersebut, perempuan dapat membagi waktunya untuk bekerja di samping peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.

Menurut hasil observasi di Pasar Seni Mertha Nadi Legian, didapatkan hasil bahwa keputusan mereka untuk membuka kios untuk berjualan cendera mata terhambat oleh masalah pembagian waktu antara mengurus rumah tangga dan mencari tambahan pendapatan. Namun perempuan di Legian tidak hanya memiliki konflik antara urusan bekerja dan domestik saja karena kini konflik sosial juga turut memengaruhi keputusan perempuan mengalokasikan waktu untuk bekerja. Hal ini karena warga di Legian

masih memegang teguh warisan budaya dan mayoritas penduduknya adalah penduduk asli sehingga tingkat kekerabatannya masih sangat kuat. Kenyataan ini berbeda dengan daerah yang penduduknya cenderung memilih merantau. Apabila mereka memiliki kesibukan di daerah perantauan, mereka dapat membayar denda yang telah disepakati setiap daerah. Denda tersebut merupakan sebuah sanksi karena yang bersangkutan tidak dapat mengikuti upacara adat di daerahnya. Denda dapat berupa uang tunai, beras, dan berbagai keperluan upacara lainnya yang telah disepakati di daerah bersangkutan.

Landasan Teori

Tidak hanya membagi waktu bekerja, perempuan juga memikirkan cara menyeimbangkan waktu agar dapat mengurus keluarga dan memberi perhatian lebih kepada anak-anaknya. Perempuan memiliki peran yang penting sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya mulai dari merawat, mendidik, dan memperhatikan asupan makanan anak sehingga mereka harus tetap menyediakan waktu luang untuk keluarga. Becker (1965) dengan *A Theory of the Allocation of Time* menyatakan bahwa semua orang memiliki waktu yang dialokasikan untuk bekerja atau untuk berbagai kegiatan lainnya. Menurut Sudarsono (dalam Marhaeni dan Manuati, 2004: 11), waktu yang dimiliki akan digunakan untuk bekerja sebesar X jam sehingga waktu luang yang dimiliki adalah sebesar $(24-X)$ jam dalam satu hari.

Ehrenberg dan Smith (2012: 171) dengan teori *A Theory of the Decision to Work* menyatakan pengalokasian waktu bekerja atau waktu luang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu biaya kesempatan, tingkat kesejahteraan, dan seperangkat pilihan dari seseorang yang ditentukan sendiri dan

tidak terjadi secara seketika. Seseorang akan memutuskan untuk mempergunakan waktunya lebih banyak untuk bekerja atau mempergunakan lebih banyak waktu luang tergantung pada pilihan yang tersedia.

Selain masalah pembagian waktu, besar kecilnya jumlah beban tanggungan keluarga memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Apabila semakin besar jumlah tanggungan keluarga, maka pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan semakin besar, baik kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Meningkatnya jumlah anak akan diikuti dengan meningkatnya jumlah beban tanggungan keluarga. Oleh karena itu, demi peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, selain kepala keluarga, anggota keluarga lain akan diharuskan untuk bekerja. Perempuan sebagai istri akan ikut bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya tersebut (Purwanti dan Rohayati, 2014). Jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan positif terhadap curahan jam kerja perempuan. Hal ini berarti setiap penambahan jumlah tanggungan keluarga dalam keluarga akan menambah jam kerja perempuan karena tingginya biaya keperluan keluarganya, seperti sekolah dan makan (Payaman dalam Riana, 2013).

Selanjutnya pendapatan nonkerja merupakan pendapatan yang diperoleh individu bukan karena bekerja, melainkan pendapatan dari hasil penyewaan rumah, bunga tabungan, dan bunga deposito. Secara teoretis jika pendapatan nonkerja (kekayaan) meningkat dan kesempatan waktu luang tetap, maka seseorang akan mengonsumsi waktu luang yang lebih banyak sehingga akan mengurangi alokasi waktu kerja. Hal ini berarti meningkatnya pendapatan nonkerja seseorang akan menyebabkan penurunan jam kerja dan inilah yang disebut dengan *income effect* (Marhaeni dan Manuati,

2004: 25). Ketika *substitution effect* lebih dominan daripada *income effect*, keinginan individu untuk bekerja lebih lama sehingga jam kerjanya meningkat. Sebaliknya, apabila *income effect* lebih besar daripada *substitution effect*, kenaikan tingkat upah akan menyebabkan keinginan untuk bekerja semakin sedikit.

Budaya suatu daerah juga dapat menentukan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja (Marhaeni dan Manuati, 2004: 36). Salah satu kegiatan di sektor domestik nonkodrati yang dikerjakan perempuan Bali selain mengurus rumah tangga adalah menjalankan kegiatan sosial berupa partisipasi dalam kegiatan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Peranan ganda seorang perempuan juga mengacu pada masyarakat luas (*public role*), salah satunya adalah peran kekerabatan (*kin role*) dan peran dalam masyarakat (*community role*) (Juliartini, 2012).

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antarmasyarakat merupakan bagian yang sangat penting. Hubungan antaranggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat tampak dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan rukun tetangga (RT), Dasawisma, dan pertemuan yang bersifat keagamaan, misalnya tahlilan. Semua itu dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan-pertemuan dalam rangka kehidupan sosial bermasyarakat tentunya akan merupakan penyisihan waktu tersendiri bagi seseorang yang harus mencari nafkah jauh dari tempat tinggalnya. Bagi perempuan yang bekerja seperti ini, tentunya pengaturan waktu akan sangat penting ketika mereka harus berbagi waktu antara bekerja dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketika seseorang tidak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, maka sering kali ia akan merasa dasingkan dari lingkungannya.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya berbagai kegiatan adat yang ada di Bali. Kontribusi perempuan Bali begitu terlihat di dalam berbagai kegiatan upacara di Bali, bahkan dalam upacara-upacara tertentu yang rutin setiap bulan, seperti upacara bulan purnama, *tilem*, dan *kajeng kliwon*. Menyiapkan persembahan berupa nasi dengan lauk pauk yang disebut dengan *banten saiban*, *segehan*, dan *canang sari* pun hampir semuanya dilaksanakan dan disiapkan oleh perempuan (Yasa, 2000). Jika intensitas untuk kegiatan adat sedang tinggi, maka waktu untuk bekerja akan berkurang. Marhaeni (dalam Riana, 2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa budaya berpengaruh negatif terhadap alokasi jam kerja publik tenaga kerja perempuan.

Kegiatan adat, seperti upacara keagamaan, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bali. Mulai dari seseorang di dalam kandungan hingga meninggal dunia, mereka selalu dihormati dengan berbagai upacara keagamaan. Tidak hanya untuk diri sendiri, upacara itu adalah bentuk persembahan kepada Tuhan, leluhur, dan lingkungan yang tidak terlepas dari kegiatan adat di Bali. Sebagai contoh, pada hari tertentu, seperti saat bulan penuh (purnama) dan bulan mati (*tilem*), umat Hindu menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kemudian saat seorang bayi berusia 3 bulan dan 6 bulan menurut kalender Bali, maka mereka akan diupacarai secara agama Hindu. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan pihak yang memiliki hajatan, tetapi juga melibatkan keluarga lainnya dan masyarakat di sekitar sehingga mereka akan tolong-menolong. Dengan demikian, masyarakat harus menyediakan waktunya untuk kegiatan adat agar budaya gotong royong dan kekeluargaan tersebut tidak pudar di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan adat di Bali, khususnya di Legian, terhadap pembagian waktu bekerja perempuan selain faktor ekonomi. Kegiatan adat yang masih melekat kuat di masyarakat menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti, terlebih lagi kegiatan tersebut turut menyita waktu yang dimiliki perempuan selain mengurus berbagai kebutuhan rumah tangganya.

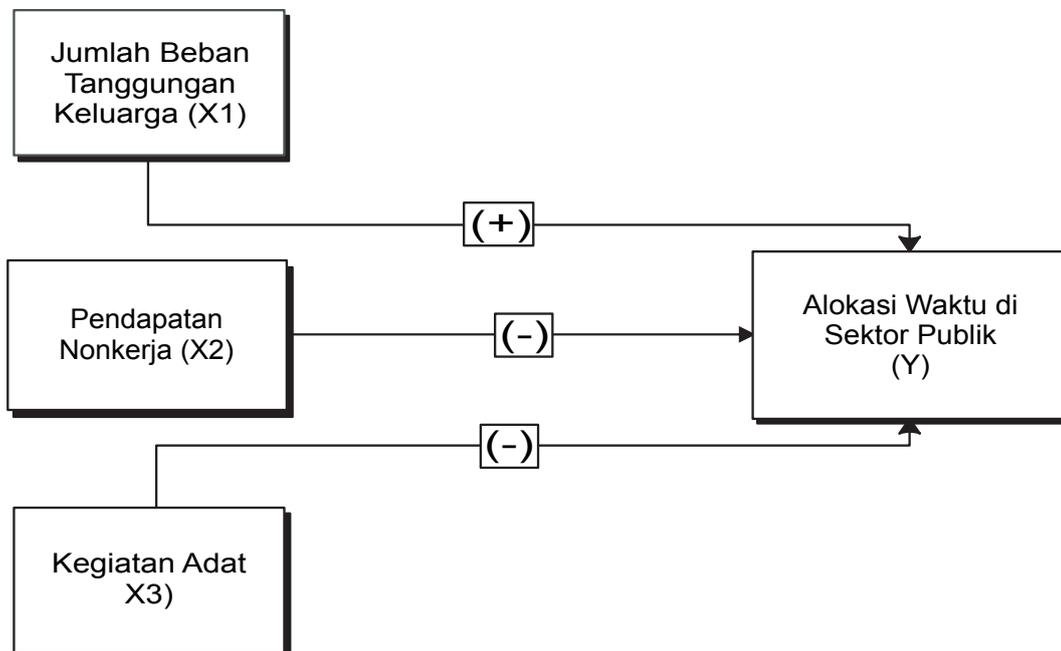
Tahapan dari penelitian ini adalah mencari permasalahan yang bersifat empiris maupun teoretis yang kemudian akan diidentifikasi. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, digunakan berbagai teori konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk diduga melalui dugaan sementara yang disebut hipotesis. Hipotesis itu terbentuk

dalam kerangka konsep penelitian sebagai berikut.

Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini.

H₁: Jumlah beban tanggungan keluarga, pendapatan nonkerja, dan intensitas kegiatan adat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap alokasi waktu sektor publik perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian.

H₂: Jumlah beban tanggungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap alokasi waktu sektor publik perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Sementara itu, pendapatan nonkerja dan intensitas kegiatan adat masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap alokasi waktu sektor publik perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian.



Sumber : Dimodifikasi dari beberapa sumber (Komala dan Sudibia, 2012; Marhaeni dan Manuati, 2004; Marhaeni, dalam Riana, 2003).

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Metode Penelitian

Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Kemudian data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2007: 13). Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data mengenai karakteristik umur, pendidikan, pendapatan per bulan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan nonkerja responden, dan kegiatan adat yang didapatkan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 70 pedagang perempuan di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Pengelola Pasar Seni Mertha Nadi Legian serta hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui buku-buku terbitan BPS dan melalui *website* www.bps.go.id.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan tiga teknik. Pertama adalah teknik observasi nonpartisipan dengan melakukan pengamatan secara independen terhadap aktivitas yang dilakukan oleh responden. Kedua adalah menggunakan kuesioner (angket), yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ketiga adalah wawancara tidak terstruktur untuk melengkapi hasil observasi yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap. Pedoman wawancaranya hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga didapat gambaran permasalahan dan variabel yang diteliti dari permasalahan yang ada pada objek.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Sebelum melakukan

analisis regresi berganda, terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik agar menghasilkan model regresi yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*). Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji otokorelasi karena uji otokorelasi hanya dilakukan pada penelitian yang bersifat *time series*.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian (Y). Variabel terikat ini dimaksudkan untuk mengetahui produktivitas mereka jika dilihat dari banyak waktu yang dicurahkan perempuan menikah di samping perannya di sektor domestik. Kemudian variabel bebas yang digunakan adalah jumlah beban tanggungan keluarga (X_1), pendapatan nonkerja (X_2), dan kegiatan adat (X_3).

Menurut Sugiyono (2013: 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang cendera mata perempuan yang telah menikah di Pasar Seni Mertha Nadi Legian dan berjumlah 230 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 pedagang cendera mata perempuan di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 70 responden. Selanjutnya teknik *sampling* menggunakan *systematic random sampling*, yaitu menentukan sampel melalui pemberian nomor pada anggota populasi kemudian peneliti menentukan sampel yang diambil berdasarkan interval yang ditentukan.

Secara teknis peneliti menggunakan interval 4 yang didapat dari hasil pembagian antara jumlah populasi dan jumlah sampel yang didapatkan dari rumus Slovin. Nomor awal untuk memulai interval dilakukan dengan cara menunjuk urutan populasi dengan acak sehingga didapatkan nomor awal, yaitu

populasi dengan nomor urut 12, sehingga sampel yang diambil adalah urutan 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya hingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Jika sampai nomor populasi terakhir belum mendapatkan sebanyak 70 responden, maka akan dilanjutkan lagi dengan nomor awal dengan interval yang sama.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi diinterpretasikan, terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik agar menghasilkan model regresi yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikoleniaritas.

Uji normalitas dilakukan melalui uji Kolmogorof-Smirnov yang dalam penelitian ini data berdistribusi secara normal karena nilai *Unstandardized Residual* lebih besar dari 0,05. Tahapan kedua adalah melakukan uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antarvariabel bebas. Penelitian ini tidak mengandung multikoninearitas sehingga tidak adanya korelasi antarvariabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Keseluruhan nilai *tolerance* dalam penelitian ini adalah lebih dari 10 persen. Terakhir dilakukan

uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser. Hasil yang didapatkan adalah tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada variabel bebas yang signifikan secara statistik dengan tingkat kesalahan sebesar 5 persen (0,05). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hasil perhitungan regresi terhadap variabel jumlah beban tanggungan keluarga (X_1), pendapatan nonkerja (X_2), dan kegiatan adat (X_3) terhadap alokasi waktu bekerja perempuan (Y) pada penelitian terhadap 70 pedagang cendera mata perempuan di Pasar Seni Mertha Nadi Legian ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut.

Koefisien regresi variabel jumlah beban tanggungan keluarga adalah sebesar 4,910. Ini berarti apabila jumlah beban tanggungan keluarga bertambah 1 orang, maka akan mengakibatkan kenaikan alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata sebanyak 4,910 jam/minggu dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Kemudian koefisien regresi variabel pendapatan nonkerja sebesar -0,048. Ini berarti apabila pendapatan nonkerja bertambah 1 juta rupiah/bulan, maka alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata akan berkurang sebesar 0,048 jam/minggu. Atau dapat berlaku hal sebaliknya,

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

	Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi
1	Konstanta	58,606	24,064	0,000
2	Jumlah Beban Tanggungan Keluarga (X_1)	4,910	6,934	0,000
3	Pendapatan Nonkerja (X_2)	0,048	-0,354	0,724
4	Kegiatan Adat (X_3)	-0,815	-3,800	0,000
$R^2 = 0,470$				
F hitung = 19,527				
Sig. F = 0,000				
Variabel terikat Y = Alokasi Waktu Bekerja Perempuan Pedagang Cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian				

Sumber: Data diolah, 2015

yaitu apabila pendapatan nonkerja menurun 1 rupiah/bulan, maka alokasi waktu perempuan pedagang cendera mata di sektor publik akan bertambah sebesar 0,048 jam/minggu.

Koefisien regresi variabel kegiatan adat adalah sebesar -0,815. Ini berarti apabila kegiatan adat bertambah 1 jam/minggu, maka alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata akan berkurang sebesar 0,815 jam/minggu. Begitu juga sebaliknya, yaitu apabila kegiatan adat berkurang 1 jam/minggu, maka alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata akan bertambah sebesar 0,815 jam/minggu dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Selanjutnya uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara serempak atau simultan terhadap variabel terikat dalam model. Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada Tabel 5, hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $19,527 > 2,76$ serta sig. uji $F < 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu, hal ini berarti jumlah beban tanggungan keluarga, pendapatan nonkerja, dan kegiatan adat secara serempak berpengaruh signifikan terhadap alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Nilai R^2 dalam penelitian sebesar 0,470. Ini berarti 47 persen alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata dalam penelitian ini dipengaruhi oleh jumlah beban tanggungan keluarga, pendapatan nonkerja, dan kegiatan adat. Kemudian sisanya sebesar 53 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Pengaruh Jumlah Beban Tanggungan Keluarga terhadap Alokasi Waktu di Sektor Publik

Hasil uji parsial pengaruh jumlah beban tanggungan keluarga terhadap alokasi waktu bekerja adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,934 >$

$1,671$) dan signifikansi Uji $t < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara jumlah beban tanggungan keluarga terhadap alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Sudibia (2012). Secara parsial hasil penelitian itu menemukan bahwa variabel jumlah tanggungan rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi waktu kerja perempuan pada sektor informal perdagangan.

Semakin banyak seseorang memiliki tanggungan rumah tangga akan semakin banyak tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Dari permasalahan itu, muncul motivasi para perempuan untuk lebih giat bekerja di tengah kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga demi menambah pendapatan suami untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi keluarga. Karena memutuskan untuk bekerja, maka waktu yang dialokasikan untuk itu akan meningkat dan akan mengurangi waktu mereka untuk mengurus rumah tangga. Selain untuk pemenuhan kebutuhan keluarga inti, perempuan yang memiliki pendapatan sendiri akan mampu membantu membiayai jumlah tanggungan lainnya, misalkan untuk tanggungan lansia. Mereka akan mampu memberikan santunan sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua dan mertua.

Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2014) yang menjelaskan bahwa variabel jumlah tanggungan keluarga perempuan menikah berpengaruh positif terhadap curahan jam kerja perempuan menikah di IKM Mebel Kabupaten Jepara. Ketika jumlah anak dan tanggungan semakin besar, maka biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin tinggi dan biaya sekolah yang relatif

mahal. Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dan mutlak dimiliki oleh setiap orang sehingga para orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik dan layak bagi anaknya. Perempuan sebagai seorang ibu tentu saja akan memikirkan hal tersebut. Ketika pendapatan suami dirasakan masih kurang untuk biaya hidup, maka perempuan akan mengambil inisiatif untuk ikut bekerja demi pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya.

Pengaruh Pendapatan Nonkerja terhadap Alokasi Waktu di Sektor Publik

Hasil uji parsial pengaruh pendapatan nonkerja terhadap alokasi waktu bekerja menunjukkan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,354 \leq 1,671$) dan signifikansi Uji $t > 0,05$, yaitu $0,724 < 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara pendapatan nonkerja terhadap alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian. Hasil ini bertentangan dengan teori yang menyatakan jika pendapatan nonkerja (kekayaan) meningkat dan *opportunity cost of leisure time* tetap, maka seseorang akan mengonsumsi waktu luang lebih banyak sehingga akan mengurangi alokasi waktu kerja (Marhaeni dan Manuati, 2004: 25).

Hasil yang berbeda tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan individu untuk bekerja. Tingginya pendapatan nonkerja yang dimiliki responden tidak memengaruhi alokasi waktunya untuk berjualan di kios. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, mereka tetap membuka kios seperti biasa dengan alasan untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Selain itu, dengan membuka kios mereka dapat melakukan interaksi sosial satu sama lain, yaitu dapat saling berdiskusi, misalnya mengenai

pengasuhan anak, berbagi resep masakan, dan pendidikan anak.

Alasan lain adalah agar tetap memiliki penghasilan sendiri. Responden tidak ingin terlalu menggantungkan segala kebutuhannya pada suami dan pendapatan nonkerja yang tinggi. Dengan memiliki penghasilan sendiri, mereka dapat mengelola penghasilan tersebut untuk ditabung, menyantuni orang tua kandung atau digunakan untuk sekadar membeli pakaian, kebaya, merawat diri, dan membeli berbagai macam kosmetik yang diinginkan tanpa harus membebankan biaya tersebut pada suaminya. Dengan demikian, penghasilan suami dan pendapatan nonkerja lebih cenderung dialokasikan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarga. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Made Sorniasih yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan pendapatan nonkerja terbesar. Ia berpendapat sebagai berikut.

Pendapatan yang saya terima dari hasil sewa lumayan tinggi per bulannya, itu berasal dari hasil sewa kos-kosan dan vila. Dengan memiliki pendapatan pasif, tidak menyurutkan keinginan saya untuk tetap berdagang. Dari hasil berdagang, saya mampu memberikan satuan kepada orang tua kandung saya, bisa saya gunakan membeli kebaya yang saya inginkan tanpa meminta kepada suami. Selain itu, saya bisa bertemu dengan ibu-ibu lainnya untuk mencari teman dibandingkan jika saya hanya diam di rumah, saya tidak akan berkembang dan bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu dari banjar lainnya di Legian (Made Sorniasih, wawancara, 18 Juni 2015).

Besarnya pendapatan nonkerja yang dimiliki Ibu Made Sorniasih tidak mengurungkan keinginannya untuk bekerja. Karena motivasinya bekerja tidak hanya sebatas untuk mencari penghasilan

tambahan, tetapi juga sebagai akses pengembangan diri. Ketika telah bertemu ibu pedagang lainnya, maka ia dapat saling berbagi cerita dan mendengarkan saran mengenai berbagai informasi sehingga akan membantu membuka wawasan yang dapat dibagikan kepada keluarga.

Pengaruh Kegiatan Adat terhadap Alokasi Waktu di Sektor Publik

Uji parsial pengaruh kegiatan adat terhadap alokasi waktu bekerja menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,800 > 1,671$) dan signifikansi Uji $t < 0,05$, yaitu $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya adalah ada pengaruh negatif dan signifikan antara kegiatan adat terhadap alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian secara parsial.

Hasil penelitian mengenai hubungan antara kegiatan adat terhadap alokasi waktu bekerja memperoleh hasil yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu menunjukkan hubungan signifikan dan negatif. Jika intensitas untuk kegiatan adat (budaya) sedang meninggi, maka waktu untuk bekerja akan berkurang. Menurut hasil penelitian Marhaeni (dalam Riana, 2013), ada tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi jam kerja publik tenaga kerja perempuan, yaitu umur anak terakhir yang berpengaruh positif, rata-rata upah per jam yang berpengaruh positif, dan budaya yang berpengaruh negatif.

Perempuan Hindu, khususnya di Bali, tidak hanya membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan bekerja saja, tetapi mereka harus membagi lagi waktunya untuk bermasyarakat. Kegiatan adat *menyama braya* dan *nguopin* merupakan salah satu kegiatan sosial masyarakat yang dan masih dilestarikan secara turun-temurun di Bali.

Perempuan akan mengurangi waktu untuk bekerja karena harus mengikuti kegiatan adat di daerah asalnya. Jika mereka mengabaikan kegiatan adat tersebut dan hanya fokus bekerja, mereka dapat dikucilkan dari lingkungan masyarakat karena mereka telah terikat sebagai masyarakat secara adat.

Perempuan pedagang cendera mata di Pasar Seni Mertha Nadi Legian harus mengorbankan jam kerja, yaitu dengan cara menutup kios selama mereka mengikuti kegiatan adat. Lamanya mereka menutup kios tergantung kegiatan adat yang diikuti, misalnya untuk upacara pernikahan di Bali membutuhkan waktu yang lama mulai dari persiapan hingga hari pernikahan. Oleh karena itu, biasanya keluarga mempelai akan meminta bantuan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, di lingkungannya untuk *nguopin* selama dua sampai tiga hari hingga puncak acara berlangsung. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Putu Widiati yang merupakan salah satu responden sebagai ibu rumah tangga dan pedagang, tetapi sangat aktif dalam kegiatan adat sebagai berikut.

Saya aktif dalam kegiatan adat keagamaan, dalam seminggu saja bisa mencapai 20 jam/minggu, khususnya pada upacara pernikahan dan upacara keagamaan di pura. Paling sering saya mengikuti upacara keagamaan di pura, persiapannya biasanya dimulai dari tiga hari sebelum puncak upacara. Dimulai dari pukul 07.30 WITA hingga 12.00 WITA dan pada saat saya aktif dalam kegiatan adat, kios saya tutup, dan kembali buka setelah persiapannya selesai, biasanya pukul 13.00 WITA saya memulai berdagang di kios ini. Begitulah saya membagi waktu agar semua kepentingan bisa sama-sama dilaksanakan (Putu Widiati, wawancara, 17 Juni 2015).

Ibu Putu Widiati dapat dikatakan sangat aktif dalam kegiatan adat karena rata-rata responden menghabiskan waktunya hanya 5-15 jam/minggu. Beliau mengatakan memiliki kewajiban lebih dalam berbagai kegiatan adat karena beliau ditunjuk untuk *ngayah* (mengabdikan tanpa imbalan) di pura. Karena kesibukannya tersebut, maka ia harus membagi waktu dengan baik agar tetap mampu menjalankan tugas adat dan bekerja. Bekerja sebagai pedagang menjadi pilihannya karena adanya fleksibilitas waktu dalam sektor informal sehingga ia pun bebas membuka dan menutup kiosnya kapan saja tanpa terikat aturan.

Perempuan yang ingin mencurahkan waktunya untuk bekerja memiliki berbagai pertimbangan untuk membagi waktunya. Hal-hal tersebut meliputi jumlah beban tanggungan keluarga yang dimiliki, besarnya pendapatan nonkerja, dan faktor sosial budaya, seperti kegiatan adat yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti hasil penelitian yang telah didapatkan, mereka selalu memiliki alasan untuk tetap bekerja selain banyaknya pekerjaan domestik yang seharusnya mereka lakukan demi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarganya. Pencapaian kedudukan yang hampir sama antara perempuan dan laki-laki tidak terlepas dari kemampuan dan motivasi diri tanpa harus meninggalkan peran utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil uji secara parsial, maka didapatkan hasil jumlah beban tanggungan keluarga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap alokasi waktu bekerja perempuan pedagang cendera mata. Pendapatan nonkerja tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi waktu perempuan

pedagang cendera mata di sektor publik. Hal ini berarti perubahan pendapatan nonkerja (kekayaan) tidak memengaruhi perubahan konsumsi waktu luang dan alokasi waktu kerja perempuan. Kegiatan adat berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap alokasi waktu perempuan pedagang cendera mata di sektor publik. Hal ini berarti jika intensitas untuk kegiatan adat (budaya) sedang tinggi, maka waktu untuk bekerja akan berkurang.

Keputusan perempuan untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah beban tanggungan dan kegiatan adat. Mereka tentu saja harus memikirkan waktu untuk keluarga dan tidak hanya fokus mengejar karier. Bagaimanapun juga, perempuan adalah seorang ibu yang wajib memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Merawat dan mendidik anak adalah hal dasar yang wajib mereka jalankan. Apabila sebagian besar waktu mereka luangkan untuk bekerja, maka anak-anak dan keluarga akan terbelah dan fungsi kodrati perempuan tidak dapat berjalan seimbang.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Pelatihan dalam pengembangan sektor informal bagi perempuan sangat dibutuhkan. Bekerja di sektor informal merupakan pilihan yang tepat agar mampu menjalankan tugas utama sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karier dengan seimbang. Dengan diberikan pelatihan yang benar, mereka akan mampu mengelola waktu dan mengelola usaha lebih baik sehingga terus mengalami perkembangan. Urusan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik dan pendapatan keluarga juga bertambah dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Mengenai konflik kegiatan adat, dapat diberlakukan kebijakan yang lebih fleksibel terkait kegiatan adat untuk dapat menyeimbangkan waktu perempuan antara adat dan bekerja. Ada dua kebijakan yang dapat diambil oleh pihak desa adat. Pertama, dapat membuat aturan mengenai jam untuk kegiatan adat. Misalkan, untuk kegiatan adat tertentu, waktu kegiatan *nguopin* yang dilakukan perempuan dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi sehingga sebelum pukul 7 pagi mereka dapat menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Kemudian setelah pukul 9 pagi mereka telah dapat memulai bekerja. Kedua, membagi masyarakat dalam beberapa kelompok yang akan secara bergantian untuk mengikuti kegiatan adat. Dalam satu kegiatan adat, tidak semua warga secara bersama-sama berpartisipasi di dalamnya sehingga mereka dapat secara bergantian mengalokasikan waktunya untuk bekerja ketika kegiatan adat sedang berlangsung.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir. 2010. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Becker, Gary S. 1965. "A Theory of the Allocation of Time". *The Economic Journal*, 75(299), 493-517.
- BPS. 2014. "Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2014". http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=605001&od=5&id=5 Diunduh pada 10 Maret 2015.
- Ehrenberg, Ronald G. and Robert S. Smith. 2012. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy Eleventh Edition*. Pearson Education, Inc.
- Fadah, Isti dan Istatuk Budi Yuswanto. 2004. "Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi Buruh Wanita serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus pada Buruh Tembakau di Kabupaten Jember)". *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 6(2), 137-147.
- Haryanto, Sugeng. 2008. "Peran Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 216-227.
- Jayaraman, Anuja; Tesfayi Gebreselassie, and S. Chandrashekar. 2009. "Effect of Conflict on Age at Marriage and Age at First Birth in Rwanda". *Popul Res Policy Rev*, 28, 551-567.
- Juhn, Chinhui and Simon Potter. 2006. "Changes in Labor Force Participation in the United States". *Journal of Economic Perspectives*, 20(3), 27-46.
- Juliartini, Ketut. 2012. "Pengaruh Umur, Pendidikan, Jumlah Tanggungan Anak dan Intensitas Adat terhadap Pendapatan Wanita (Studi Kasus Pada Pedagang Acung Wanita di Pantai Legian, Kelurahan Legian Kecamatan Kuta". *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Denpasar: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Kantor Pengelola Pasar Seni Mertha Nadi Legian. 2015. *Data Pemilik Kios Pasar Seni Mertha Nadi Legian*. Badung: Kantor Pengelola Pasar Seni Mertha Nadi Legian.
- Sari, Mia Komala dan I Ketut Sudibia. 2012. "Alokasi Waktu Pekerja Perempuan pada Sektor Informal Perdagangan di Desa Daging Puri Klod Denpasar Timur". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 1(2), 61-73. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Marhaeni dan Manuati Dewi. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mantra, Ida B. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasa, I Gusti Wayan Murjana. 2000. "Aktivitas Produktif Penduduk Lanjut Usia: Studi Kasus Pada Dua Desa di Kabupaten Badung Bali". *Disertasi*. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Purwanti, Endang dan Erna Rohayati. 2014. "Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedelai di Tuntang, Kabupaten Semarang". *Among Makarti*, 7(13), 113-124.
- Riana, Ade. 2013. "Pengaruh Faktor Pendapatan Pedagang, Pendapatan Suami, Umur, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Curahan Jam Kerja Pedagang Bumbon Wanita (Studi Kasus di Pasar Johar Kota Semarang)". *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-17. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanti S., Ayu dan Nenik Woyanti. 2014. "Analisis Pengaruh Upah, Pendidikan, Pendapatan Suami dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Curahan Jam Kerja Perempuan Menikah di IKM Mebel Kabupaten Jepara". *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-11.

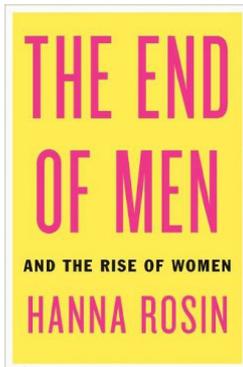
Resensi Buku

LAKI-LAKI KALAH ATAU MENGALAH?

Muhadjir Darwin

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik & Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan,
Universitas Gadjah Mada

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d_muhadjir@yahoo.com)



Data Buku

Judul : *The End of Men and the Rise of Women*
Penulis : Hanna Rosin
Penerbit : Riverhead Books
Cetakan : Pertama, 2012
Tebal : 310 hlm

Judul yang dipilih oleh Hanna Rosin sangat menohok mata laki-laki yang membaca bukunya. Judul pokok *The End of Men* dapat berarti berakhirnya (masa kekuasaan) laki-laki (atas perempuan) atau hilangnya patriarkat. Anak judul dari buku ini pun menegaskan kontrasnya: *The Rise of Women* yang berarti bangkitnya perempuan dan lahirnya matriarkat.

Dalam bukunya ini, Rosin menegaskan bahwa perempuan di mana pun di dunia menjadi lebih dominan di tempat kerja, pendidikan, rumah tangga, bahkan dalam cinta dan perkawinan. Boleh jadi di sejumlah negara, perempuan masih belum cukup menonjol di percaturan politik atau masih digaji lebih rendah daripada laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Untuk hal ini, Rosin menilainya sebagai artifak terakhir dari zaman lama yang sedang tenggelam, bukan sebagai konfigurasi yang permanen

Kemajuan yang dialami perempuan ini, menurut Rosin, bukan hasil dari perjuangan politik yang progresif, apakah

dari perempuan atau laki-laki. Namun ini hanya sebuah kebetulan sejarah, yaitu munculnya era ekonomi baru yang disebut Rosin sebagai ekonomi pelayanan baru (*the new service economy*). Ini adalah era yang secara kebetulan menguntungkan perempuan. Mengapa? Sistem baru ini tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik, tetapi kekuatan otak, komunikasi yang terbuka, kekuatan untuk duduk lebih lama, dan fokus. Semua ini bukanlah hal yang membuat laki-laki dapat menang dengan mudah. Era ini justru lebih cocok untuk perempuan sehingga mereka lebih mudah mengisinya.

Rosin bukanlah peneliti dan buku yang ia tulis ini bukan sebuah laporan hasil penelitian. Ia adalah seorang wartawan dan tulisannya merupakan kompilasi dari sejumlah hasil liputannya sebagai wartawan. Namun tulisan ini layak disebut sebagai karya ilmiah karena secara mendasar, Rosin mampu mendekonstruksi teori ketimpangan dan ketidakadilan gender. Banyak literatur gender yang masih berkuat pada tesis lama,

yaitu hegemoni laki-laki dan subordinasi perempuan. Di Amerika sekalipun, kaum feminis masih mengkritisi tidak adanya perempuan yang berhasil menjadi presiden meskipun hak memilih dan dipilih telah lama dibuat setara. Sementara itu, ketimpangan gender lebih mencolok terjadi di dunia ketiga. Strategi pembangunan harus terus-menerus dibongkar dan diganti dengan strategi baru yang lebih berkeadilan gender. Semula perjuangan gender hanya terbatas memperjuangkan perempuan untuk dapat masuk menjadi pelaku pembangunan, bukan hanya sekadar menjadi objeknya (*women in development*). Akan tetapi, penerapan pendekatan ini justru merugikan perempuan karena mereka harus mengemban peran ganda: di tempat kerja dan di rumah tangga. Lebih jauh dari itu, fenomena subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki masih berlangsung, baik di ranah domestik maupun di ranah publik.

Oleh karena itu, perjuangan kaum perempuan ditingkatkan dengan mengembangkan strategi baru yang secara eksplisit memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender (*gender and development*). Ketika dengan strategi ini pun situasi hubungan gender masih timpang dan tidak adil karena institusi politik, institusi birokrasi, atau institusi sosial belum menjadikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai nilai atau misinya, maka dikembangkanlah strategi terakhir yang disebut *gender mainstreaming*. Di sini gender harus menjadi arus utama pembangunan. Semua lembaga publik harus secara eksplisit menjadikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai misinya dan semua aktivitas pembangunan harus secara eksplisit memperjuangkannya.

Jika klaim Rosin benar, keadilan dan kesetaraan gender bukan lagi sebuah tuntutan. Hal ini karena perempuan telah mencapai hasil yang lebih jauh daripada situasi ideal yang diinginkan tersebut. Perempuan tidak

hanya telah setara dengan laki-laki, bahkan telah melampauinya. Perempuan bukan lagi dikuasai, tetapi justru telah menguasai laki-laki. Namun pertanyaan kritisnya adalah betulkah fenomena yang digambarkan Rosin tersebut? Laki-laki telah kalah ataukah yang sebenarnya terjadi adalah laki-laki telah mengalah? Dengan sukarela, laki-laki telah menanggalkan hegemoninya dan menggelar karpet merah untuk menyambut kehadiran perempuan di ranah yang dulu menjadi monopoli laki-laki.

Jika pernyataan pertama benar, kaum laki-laki layak marah. Dengan begitu, perang antara laki-laki dan perempuan akan berlanjut entah ke hasil akhir seperti apa. Namun jika pernyataan kedua yang benar, situasi baru ini patut dirayakan bersama karena tidak ada yang kalah atau menang dalam hal ini. Tampaknya inilah yang sebenarnya terjadi. Berbeda dengan yang disimpulkan Rosin, kemajuan ini merupakan hasil dari perjuangan kaum perempuan, yang sekaligus juga hasil dari dukungan kaum laki-laki. Di dunia ada gerakan feminisme global yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Gerakan ini mendapat respons positif dari laki-laki dengan munculnya konsep *The New Man* (laki-laki baru). Laki-laki baru adalah laki-laki yang memiliki kesadaran pada keadilan dan kesetaraan gender serta secara sadar, tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. *The New Man* telah menjadi sebuah gerakan global yang gemanya telah masuk sampai ke Indonesia. Rifka Annisa mensponsorinya dengan mendorong berdirinya Aliansi Laki-Laki Baru, sebuah gerakan yang secara proaktif mempopulerkan model baru laki-laki ke tengah-tengah masyarakat yang masih dibalut kultur hegemoni laki-laki. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kemajuan yang dialami kaum perempuan tidak lepas dari dukungan para pejuang laki-laki baru ini.

Pedoman untuk Penulis

Populasi adalah jurnal penelitian dan analisis kritis masalah-masalah terkait tema besar kependudukan dan kebijakan. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian, baik kepublikan maupun lapangan, dan resensi buku dalam lingkup tema tersebut. Naskah yang diajukan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh media lain, dan tidak mengandung unsur plagiarisme (dinyatakan dengan pernyataan tertulis).

Pengiriman Naskah

- *Populasi* menggunakan *Open Journal System* (OJS) dan menganjurkan para penulis melakukan register terlebih dahulu kemudian mengunggah naskah secara *online* di <http://jurnal.ugm.ac.id/populasi>. OJS mempermudah dewan redaksi, editor, *peer review*, dan penulis dapat memantau proses naskah, secara *online*.
- Naskah dalam bentuk MS-Word dikirim via *e-mail* ke jurnalpopulasi@ugm.ac.id atau jurnalpopulasi@gmail.com.
- Soft file boleh juga diserahkan langsung ke sekretariat Pengelola *Populasi*, di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Gedung Masri Singarimbun, Lt. 2. Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274-6491153, 547867.

Ketentuan Naskah

Mohon perhatikan instruksi di bawah ini dengan cermat. Penyunting berhak mengembalikan atau menolak naskah yang tidak sesuai dengan butir-butir instruksi di bawah ini.

- Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berformat MS-Word, huruf Times New Roman, 1 spasi, tidak melebihi 7.000 kata.
- Judul dan subjudul: Judul harus spesifik dan efektif sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya. Judul terdiri sebanyak-banyaknya 14 kata pada naskah berbahasa Indonesia atau 10 kata pada naskah berbahasa Inggris. Sub judul di dalam teks harus singkat dan jelas. Hindari terlalu banyak subjudul dan hindari penggunaan nomor. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai judul dalam bahasa Inggris.
- Penulis: nama (-nama) penulis ditulis di bawah judul tanpa mencantumkan gelar akademik atau jabatan apapun. Deskripsi singkat tentang penulis, meliputi institusi asal penulis dan e-mail korespondensi ditulis di bawah nama penulis.
- Catatan kaki: Gunakan catatan kaki dari pada catatan akhir.
- Abstrak (abstract) dan kata kunci (keywords): disusun dalam satu paragraf 100-200 kata, yang menjelaskan secara gamblang, utuh, dan lengkap keseluruhan isi tulisan. Intisari berisi ide-ide pokok tentang latar belakang, masalah dan tujuan, kerangka berpikir, metode, pembahasan, dan kesimpulan, serta ditulis dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa naskah. Abstrak disertai dengan *kata kunci* yang mencerminkan konsep-konsep paling penting yang dikandung naskah. Kata kunci terdiri

sekurang-kurangnya 2 kata dan sebanyak-banyaknya 4 kata. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- Tabel, grafik, gambar, ditulis dalam ukuran huruf yang sama, atau relatif sama, dengan ukuran huruf pada naskah. Judul tabel atau gambar ditulis dengan lay-out sebagai berikut:

Tabel 1 Kepemilikan Aset Berdasarkan Status Ekonomi

Gambar 1 Skema Penyaluran Bansos

- Setiap tabel atau gambar harus menyertakan sumber atau catatan di bawahnya.
- Pendahuluan: menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kajian teoretis yang relevan dan jika memungkinkan, menyebutkan hipotesis.
- Metode: menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk di dalamnya pemaparan tentang desain penelitian, sasaran penelitian, instrumen dan teknik/prosedur pengumpulan data, serta analisis data.
- Pembahasan: menyajikan secara naratif pokok-pokok hasil penelitian dengan didukung sajian tabel, grafik atau diagram, serta menjawab permasalahan penelitian dengan cara menafsirkan temuan dan mengaitkannya dengan struktur pengetahuan yang telah mapan.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Daftar Pustaka: memuat semua kepustakaan yang dirujuk dalam naskah dan tidak memuat kepustakaan yang tidak dirujuk. Yang menjadi pertimbangan kepustakaan adalah sebagai berikut. Derajat kemutakhiran kepustakaan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak kepustakaan primer diacu, semakin naskah bermutu.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Resensi buku. Naskah resensi buku harus menyertakan informasi mengenai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku yang dirensi. Isi resensi buku memuat informasi dan pemahaman mengenai apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut, serta penilaian dan pertimbangan kepada pembaca akan pentingnya buku tersebut. Naskah resensi buku berkisar antara 1.500-2.000 kata.

Penulisan Referensi

Dalam Naskah

- Karya yang dikutip dalam teks menggunakan format: (Gray, 2008: 501).
- Pengutipan dalam kelompok ditulis secara alfabetis menggunakan titik koma sebagai pemisah: (Brown, 2008; Gray & Gani, 1998; Stuart, 2002).
- Gunakan 'et.al.' atau 'dkk' ketika mengutip satu karya yang ditulis oleh lebih dari dua penulis, tetapi tulis semua pengarang di dalam Daftar Pustaka.
- Untuk membedakan karya yang berbeda oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama, gunakan huruf a, b, c, dst., seperti Arifin (2002a, 2002b)
- Tidak ada penulisan menggunakan garis bawah atau *underline* baik di dalam naskah, catatan kaki maupun daftar pustaka.

Dalam Daftar Pustaka

- Penulisan karya dalam daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis dan kronologis.
- Buku dengan satu penulis: Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku dengan lebih dari satu penulis: Baumert, Kevin; Ruchi Bhandari and Nancy Kete. 1999. *What Might a Developing Country Climate Commitment Look Like?* Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Penulis berbentuk korporasi atau lembaga: Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. "Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi". (Laporan akhir). Yogyakarta: Bekerja sama dengan Perum Bulog.
- Artikel majalah atau jurnal: Listyaningsih, Umi dan Eddy Kiswanto. 2008. "Bantuan Langsung Tunai: mengatasi Masalah dengan Masalah". *Populasi*, 19 (1), 13-26.
- Artikel dari surat kabar: Darwin, Muhadjir. 2008. "Strategi dan Pencapaian MDGs". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober, hlm. 9.
- Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain): Asmi, Handria. 2010. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam: Studi Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bumi Tanggal 30 September 2008". (Tesis). Yogyakarta: Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- *Makalah seminar: Milla, Mirra Noor. 2008. "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism". Makalah Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 10 September.*
- Artikel dari internet: Abimanyu, Anggito. 2006. "Kebijakan Publik Dalam Praktek". <http://www.paue.ugm.ac.id/seminar/update2007/anggito-1..ppt>, diakses 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- *Buku terjemahan: Jellinek, Lea. 1994. The Wheel of Fortune: the History of a Poor in Jakarta. Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri dengan judul Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES.*
- Pustaka tidak diketahui penulisnya: Anonim. 2007. *Kiat Sukses Modal Kepercayaan*. Yogyakarta: Sokolimo Press.

Kepastian naskah yang dimuat akan diberitahukan melalui *e-mail* korespondensi atau pos. Selagi penulis belum memperoleh kepastian tersebut, tidak boleh mengirimkan naskah untuk diterbitkan di tempat lain.

FORMULIR BERLANGGANAN

Nama (Instansi/Perorangan):

Alamat :
.....
.....
.....

Harap dicatat sebagai pelanggan *Jurnal POPULASI*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bersama ini saya kirimkan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri No. 137-00-0624454-1, atas nama YP3K-UGM sebesar Rp.

untukedisi, mulai nomor/bulan.....

dengan harga pereksemplar Rp 35.000,00

.....,.....201...

Pelanggan,

.....